



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



# INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2022



**INFORMASI  
STATISTIK  
INFRASTRUKTUR**  
PUPR 2022



# INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR

PUPR 2022

Setia Dewi Prihapsari  
Nida Ashma Adilah  
Ariyany Yaman  
Mayta Utari  
Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi  
Lintang Ayu Pratiwi  
Naufal Azaki  
Rozi Abrori Faturrochim  
Nita Fikhriani Azhari

November, 2022

## Pemegang Hak Cipta

Pusat Data dan Teknologi Informasi

## No. ISBN

ISBN 978-979-8230-34-9



## Diterbitkan Oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

## Informasi lebih lanjut

pusdatin@pu.go.id

## KATA PENGANTAR

Kami percaya bahwa data yang baik akan memberikan input bagi rancangan, keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang baik sehingga agenda pembangunan dapat terlaksana dengan optimal.

Pada tahun 2022 ini, BIS dirancang dengan menyesuaikan kontekstualisasi agenda prioritas nasional sehingga menyajikan berbagai data statistik progres maupun hasil pembangunan yang berada di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sumber data diperoleh baik dari internal Kementerian PUPR maupun sumber terkait lainnya dengan melewati proses pengolahan dan disajikan dalam satuan tingkat nasional, provinsi, dan beserta analisis singkatnya. Selain itu, transparansi dan visualisasi data Kementerian PUPR dapat diakses pula melalui kanal data.pu.go.id sebagai bentuk digitalisasi layanan data.

Semoga BIS Tahun 2022 ini dapat menjadi referensi data dan informasi Kementerian PUPR. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu kami sangat terbuka akan berbagai macam kritik dan saran perbaikan.

Jakarta, November 2022  
Sekretaris Jenderal

**Mohammad Zainal Fatah**



Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun arahan yang positif dalam penyusunan Buku Informasi Statistik (BIS) Tahun 2022 ini.

Pusdatin Kementerian PUPR sebagai institusi yang diamanahkan untuk pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi kementerian, menyusun Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR setiap tahunnya sebagai bentuk transparansi data. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2022 ini merupakan ikhtiar Pusdatin Kementerian PUPR dalam mendorong kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) yang bermanfaat bukan hanya untuk internal Kementerian PUPR, namun seluruh stakeholder, akademisi, dan masyarakat luas.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>5</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>6</b>

## Gambaran Umum Indonesia

Geografi Wilayah	12
Administrasi Wilayah	14
Demografi Wilayah	16
Ekonomi Wilayah	18

<b>APBN PUPR</b>	<b>24</b>
------------------	-----------



## Sumber Daya Air

Bendungan Beroperasi	30
Danau, Situ, Embung	32
Sabo Dam	35

## Bina Marga

Jalan Nasional	41
Jalan Daerah	44
Jalan Tol Beroperasi	48
Jalan Tol Konstruksi	52
Jembatan	54
Jembatan Khusus	57
Jembatan Gantung	59



## Cipta Karya

Sistem Penyediaan Air Minum	65
Kinerja BUMD Air Minum	67
TPA Sampah	72
IPAL	74
IPLT	76
Bina Penataan Bangunan PLBN	78
Penataan Bangunan dan Lingkungan	80
Fasilitas Pendidikan	82
Sarana Olahraga	84
Pasar Rakyat	85
Pengembangan Kawasan Permukiman	86

## Perumahan

Rumah Susun	91
Rumah Khusus	94
Bantuan Stimulan	98
Perumahan Swadaya (BSPS)	101
Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)	101



## Bina Konstruksi

Badan Usaha Jasa Konstruksi	107
Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi	109
Tenaga Kerja Konstruksi	112

## Sumber Daya Manusia

Pengarusutamaan Gender	122
------------------------	-----

<b>Penutup</b>	<b>126</b>
----------------	------------

Data dapat diakses melalui :



[data.pu.go.id](https://data.pu.go.id)

# PENDAHULUAN



## Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur utamanya layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai bukti kehadiran negara. Infrastruktur sendiri berperan besar dalam pembangunan wilayah, dimana keberadaan infrastruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aksesibilitas daerah, prevalensi *stunting* hingga pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya data dan informasi berkenaan dengan infrastruktur selalu dibutuhkan dalam setiap perumusan hingga evaluasi kebijakan baik oleh Pemerintah, akademisi maupun masyarakat secara umum.

Kementerian PUPR selain sebagai instansi pelaksana kebijakan dan pembangunan infrastruktur juga berperan sebagai pengolah data yang menghasilkan berbagai informasi terkait infrastruktur. Oleh karenanya kehadiran Buku Informasi Statistik (BIS) Tahun 2022 ini adalah bentuk transparansi Kementerian PUPR sekaligus untuk menyajikan data kondisi serta progres pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, serta informasi terkait lainnya. Buku ini disusun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi

(Pusdatin) Kementerian PUPR yang bertugas dalam pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik dan geospasial tematik. Kebutuhan akan kualitas data infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk mendorong terciptanya ekosistem *evidence-based policy*. BIS Tahun 2022 menyajikan data infrastruktur yang menjadi *core business* Kementerian PUPR dalam bentuk infografis yang disertai dengan analisis singkat.

## Tujuan

Penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menyajikan data dan informasi statistik yang berkualitas dan kredibel. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pembangunan infrastruktur bagi pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR, instansi pemerintah lain, akademisi serta masyarakat umum.

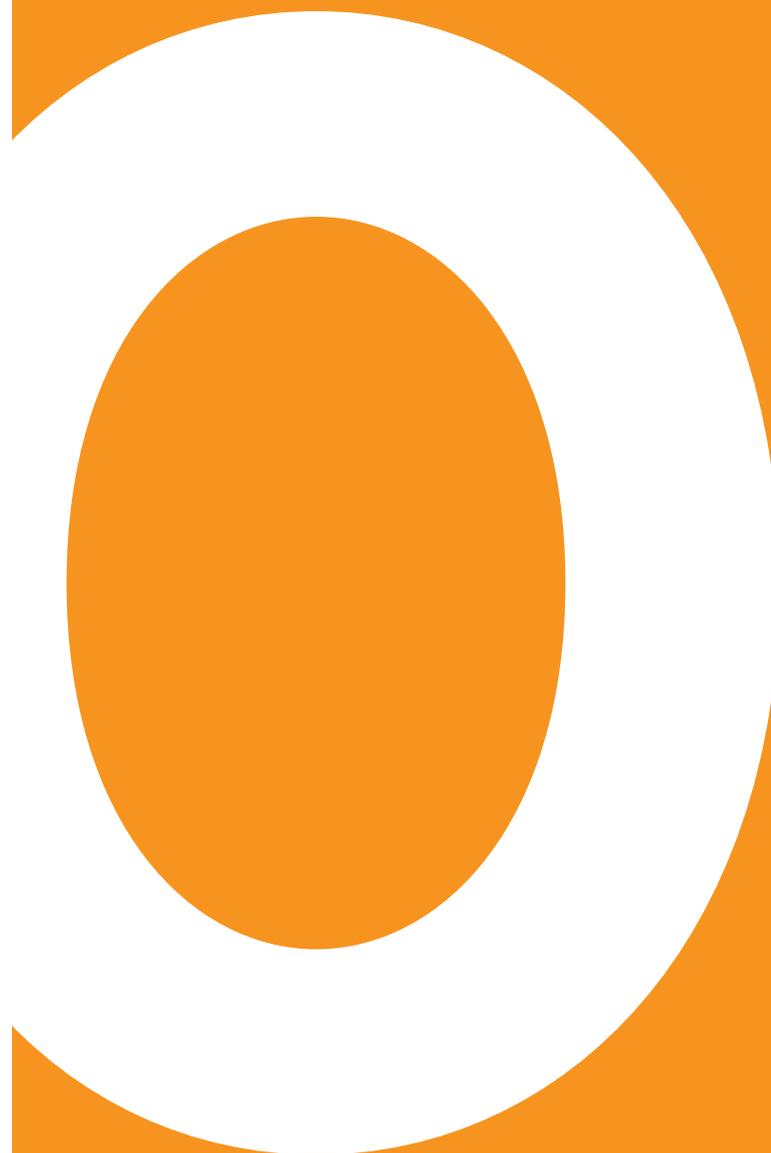


Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakaryaannya, serta perumahan.

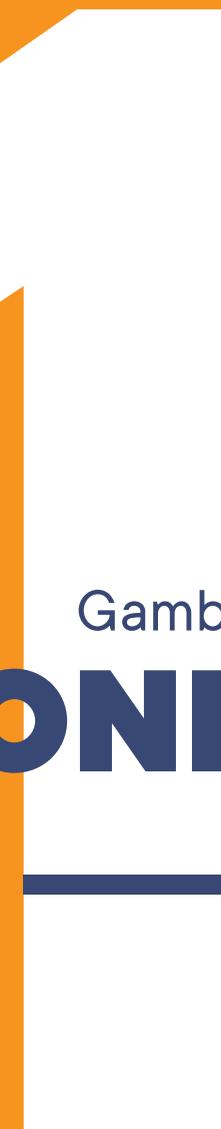




Geografi Wilayah  
Administrasi Wilayah  
Demografi Wilayah  
Ekonomi Wilayah



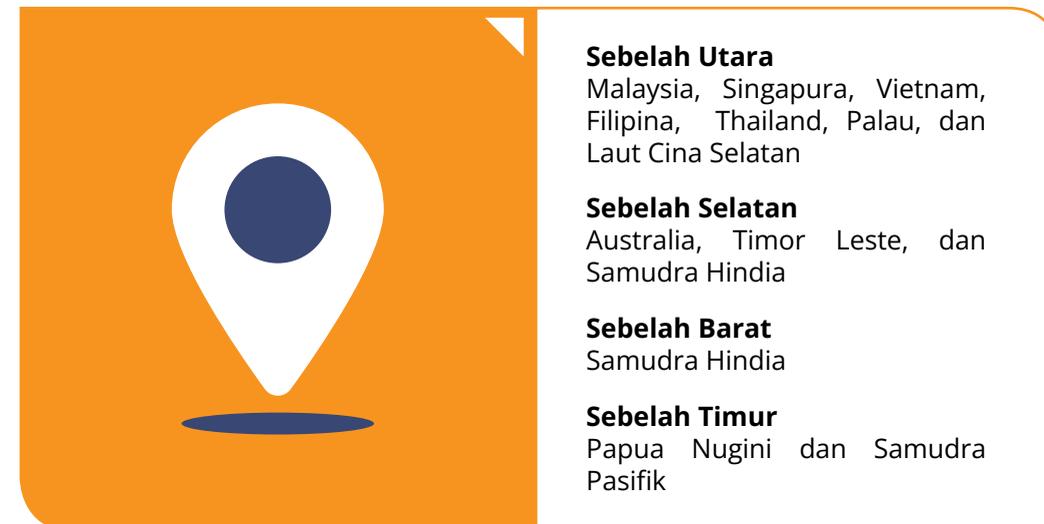
Gambaran Umum  
**INDONESIA**



# GEOGRAFIS WILAYAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 16.766 pulau yang meliputi 5 pulau besar dan 4 kepulauan serta terdiri dari 34 provinsi, namun menjadi 38 provinsi pasca disahkannya RUU tentang Daerah Otonom Baru di Papua dan Papua Barat di tahun 2022. Luas wilayah Indonesia mencapai 1.892.555,47 km<sup>2</sup> yang secara astronomis terletak di antara 6° 04' 30" Lintang Utara dan 11° 00' 36" Lintang Selatan serta antara 94° 58' 21" sampai dengan 141° 01' 10" Bujur Timur.

Oleh karena itu, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Sementara berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.



Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 28,38% dari total luas Indonesia atau sebesar 544.150,07 km<sup>2</sup>. Pulau Kalimantan juga merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk Papua Nugini).

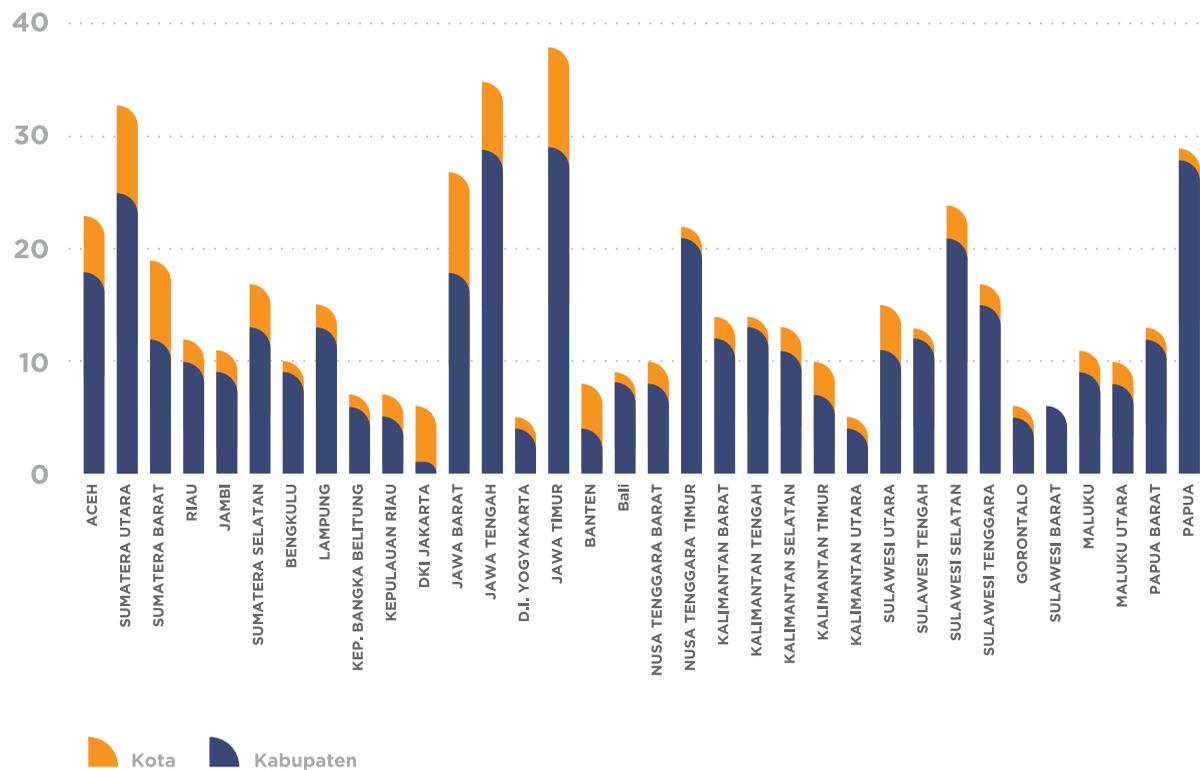
# ADMINISTRASI WILAYAH

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di tahun 2021, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 29 kabupaten. Provinsi yang memiliki kota terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dan

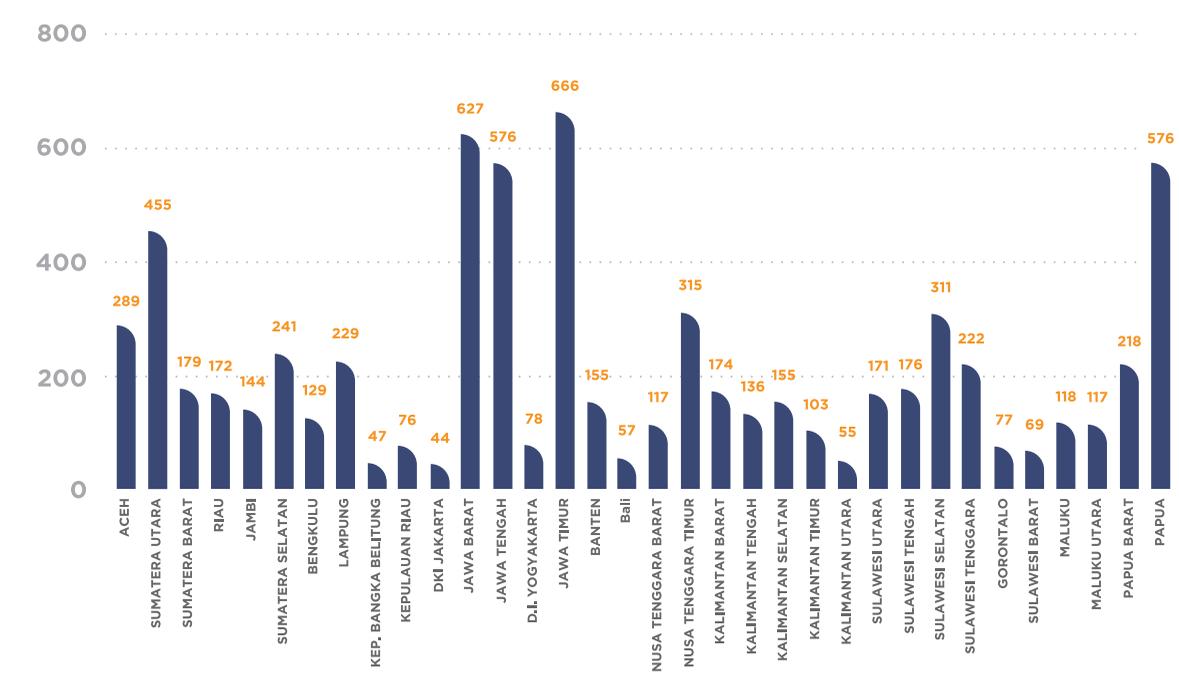
Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak 9 kota. Sementara untuk jumlah kecamatan dan desa di tahun 2021 tercatat sebanyak 7.274 kecamatan dan 83.843 desa. Adapun data yang digunakan dalam buku ini menggunakan acuan 34 provinsi mengingat penambahan 4 daerah otonom (provinsi) baru disahkan pada pertengahan tahun 2022.



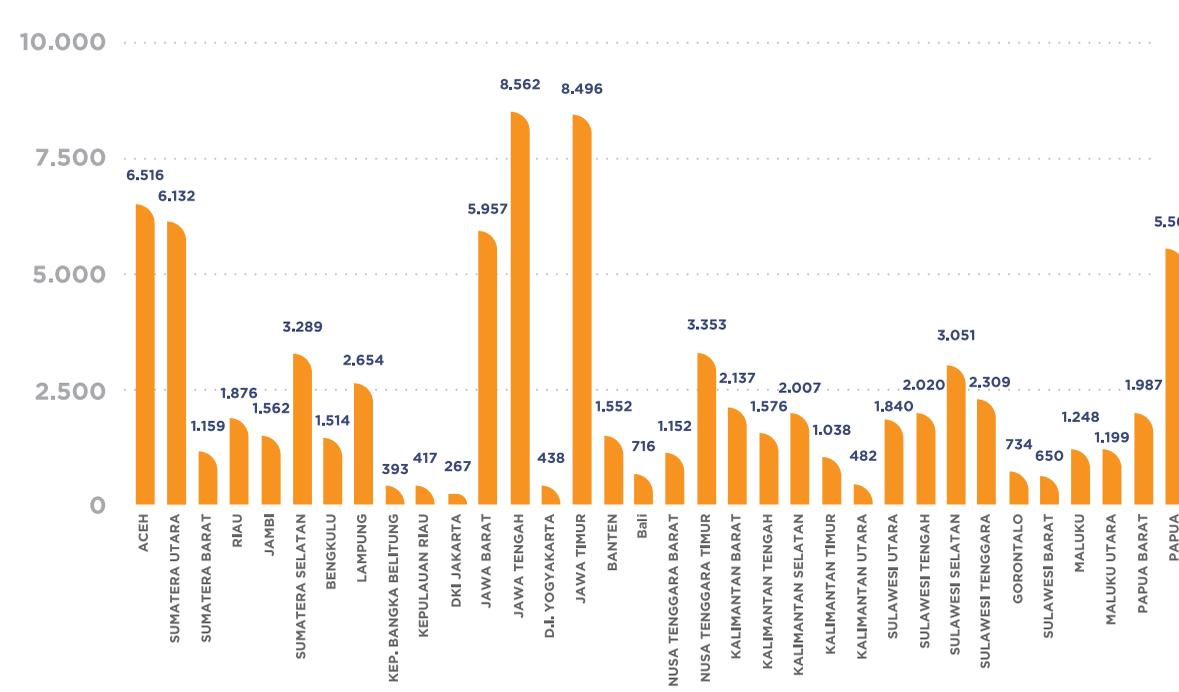
Kabupaten/Kota



Kecamatan



Desa/Kelurahan



# DEMOGRAFI WILAYAH



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang menjadikannya sebagai sebuah negara yang majemuk. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan jumlah populasinya sebanyak 95,2 juta jiwa atau sebesar 40% dari populasi Indonesia. Sementara dari segi bahasa daerah, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat sebanyak 718 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi (tidak termasuk dialek dan subdialek) dari 2.560 daerah pengamatan.

Indonesia sendiri juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 272.682,5 ribu jiwa berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 48.782,4 ribu jiwa sementara Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 713,6 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi BPS di tahun 2022 adalah sebesar 1,17%, melambat dibanding tahun 2021 yang mencapai 1,22%.

Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 152.787,8 ribu jiwa atau setara dengan 56,03% dari total penduduk Indonesia sehingga menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa terlihat dari semua provinsi di Pulau Jawa yang merupakan provinsi terpadat di Indonesia.



*Indonesia sendiri juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 272.682,5 ribu jiwa berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 Badan Pusat Statistik .*



# EKONOMI WILAYAH

## Perkembangan Ekonomi dan Sektor Konstruksi Indonesia

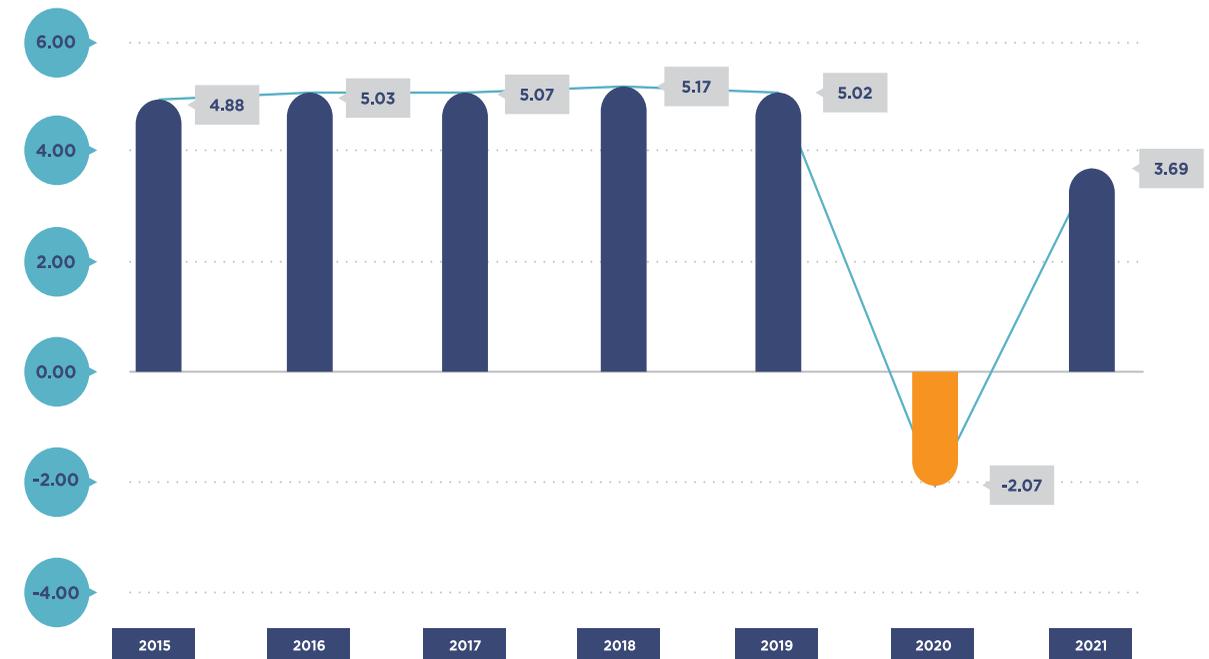
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu, sedangkan pada tingkat regional (provinsi) digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDB dan PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. PDB dan PDRB disusun dengan mencakup 17 kategori lapangan usaha, mulai dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, hingga Konstruksi.



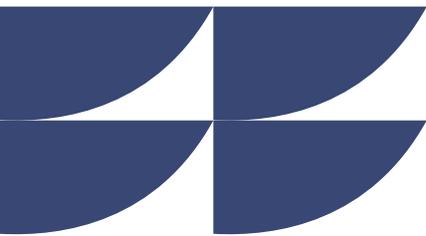
Perhitungan nilai PDB dan PDRB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang kemudian dijadikan dasar. PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada tahun tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dapat dilihat dari nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan.

Indikator laju pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi kemajuan dan keadaan ekonomi dalam periode tertentu. Perkembangan laju pertumbuhan kumulatif PDB Indonesia sendiri mengalami koreksi cukup tajam pada tahun 2020 sebagai imbas dari kondisi pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan PDB di tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga pertumbuhan berada pada level -2,07%. Di tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi pertumbuhan PDB mencapai 3,69%. Pada Triwulan I 2022 ini pertumbuhan mencapai 5,01% secara *year on year* dibandingkan Triwulan I 2021.

## Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan

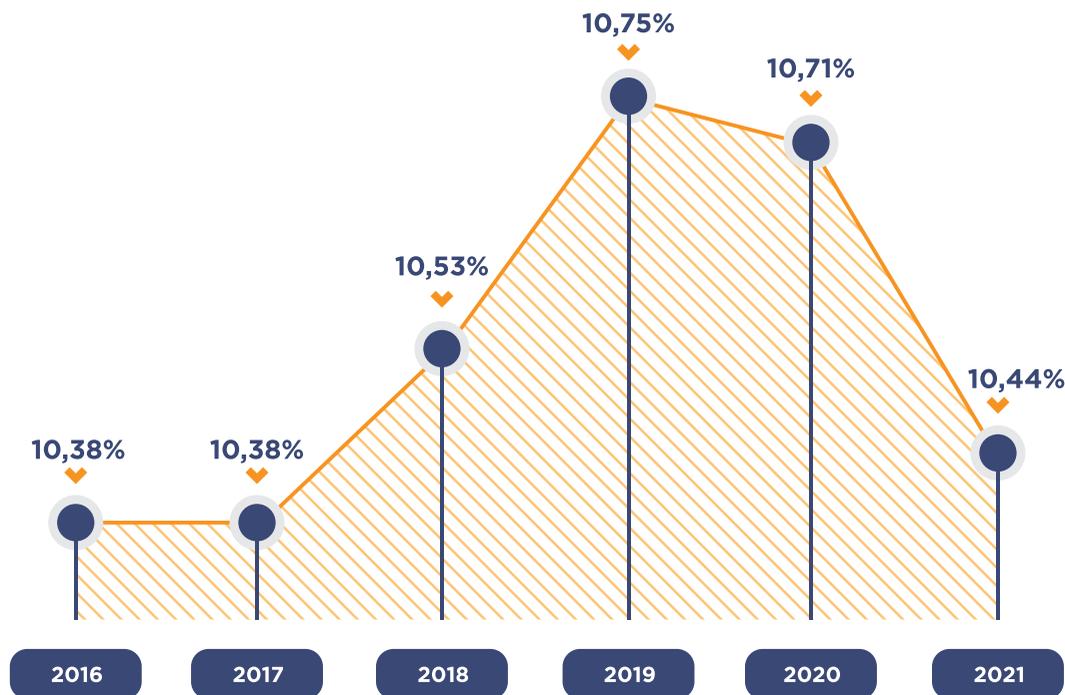


Di tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi pertumbuhan PDB mencapai 3,69%. Pada Triwulan I 2022 ini pertumbuhan mencapai 5,01% secara *year on year* dibandingkan Triwulan I 2021.



Infrastruktur adalah motor penggerak perekonomian suatu negara dan oleh karenanya pembangunan infrastruktur turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Aktivitas ini tercermin dalam sektor konstruksi dimana menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) konstruksi ialah kegiatan ekonomi berupa konstruksi umum dan konstruksi pekerjaan bangunan gedung dan

bangunan sipil. Peran sektor konstruksi sendiri cukup besar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setidaknya dalam 10 tahun terakhir dimana rata-rata kontribusinya mencapai 10,53%. Adapun pada Triwulan I 2022 kontribusinya mencapai 10,42% terhadap PDB Nasional.

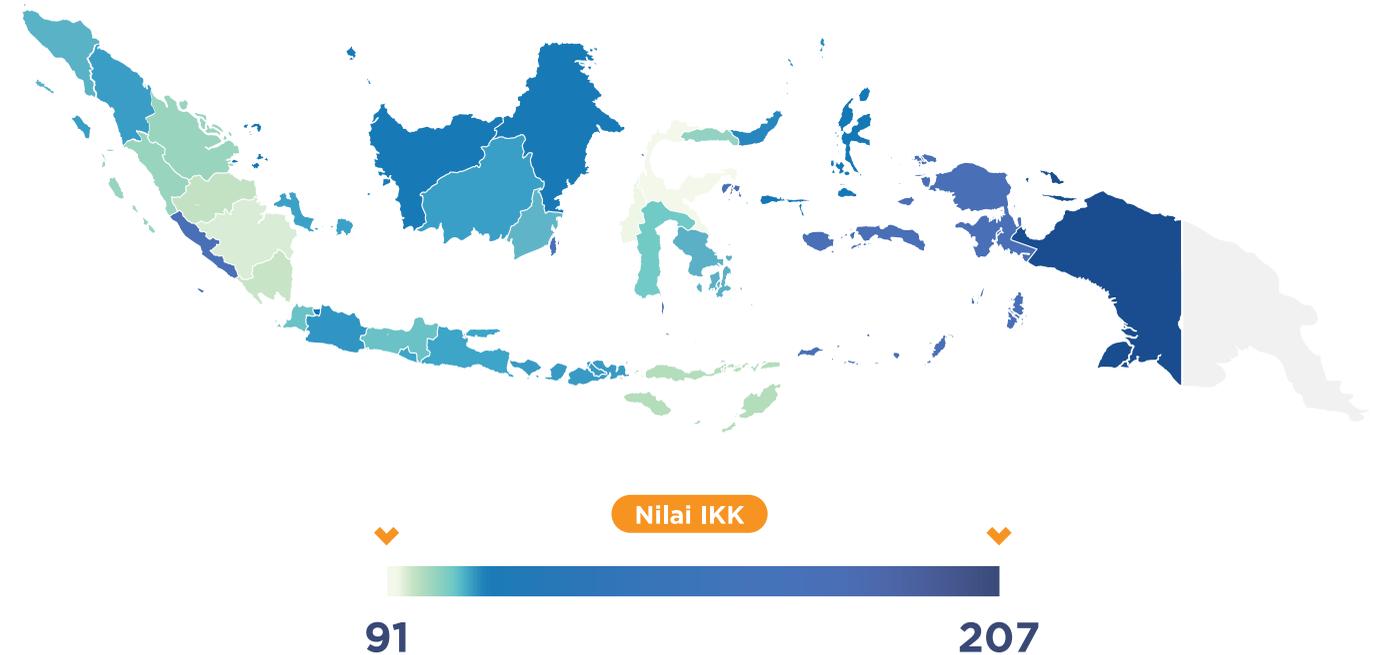


Peran sektor konstruksi sendiri cukup besar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setidaknya dalam 10 tahun terakhir dimana rata-rata kontribusinya mencapai 10,53%. Adapun pada Triwulan I 2022 kontribusinya mencapai 10,42% terhadap PDB Nasional.

## Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Berkaitan dengan sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah dimana semakin sulit letak geografisnya maka nilai IKK akan semakin

tinggi yang mencerminkan tingginya tingkat harga/biaya pembangunan di daerah tersebut. Indikator IKK telah dihitung dan digunakan sejak tahun 2003 dan terus mengalami penyesuaian dari segi metode dan formulasi perhitungannya. Indikator ini cocok digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan sekaligus kesulitan aksesibilitas infrastruktur dan sektor konstruksi di suatu daerah. Pada tahun 2021, provinsi dengan nilai IKK tertinggi berada di Papua (207,11) dan Papua Barat (130,59). Sementara itu kabupaten/kota dengan nilai IKK tertinggi berada di Kab. Puncak (478,12), Intan Jaya (447,97) dan Puncak Jaya (446,40).





APBN Kementerian PUPR

# 02

**APBN**  
KEMENTERIAN PUPR



# APBN KEMENTERIAN PUPR

Infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang handal tidak hanya menjadi roda penggerak sektor ekonomi, melainkan juga berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti pendidikan, sosial, aksesibilitas wilayah dan lainnya. Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk infrastruktur serta berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunannya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian/ lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar 161,3 Triliun. Anggaran ini mengalami tren kenaikan tiap tahunnya baik

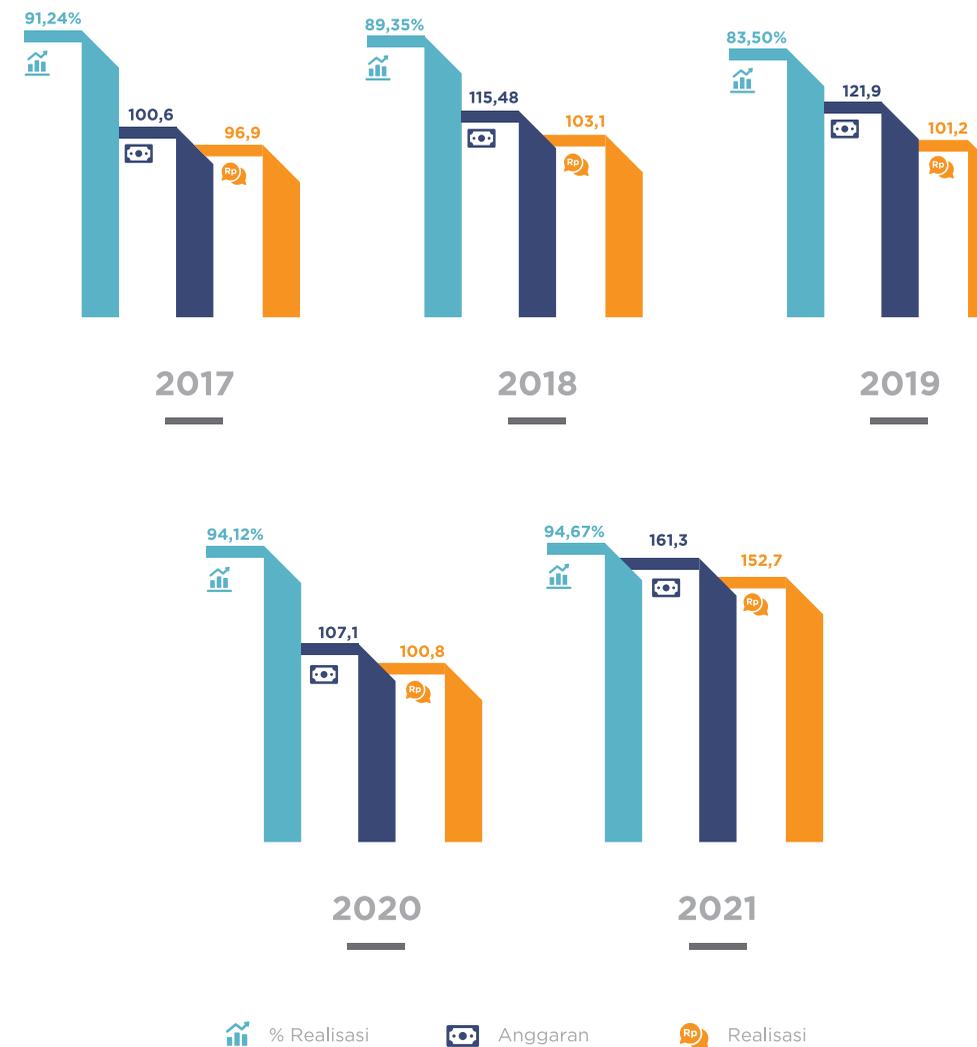
dari segi alokasi maupun realisasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur agar layanan dasar masyarakat terjamin. Adapun anggaran dialokasikan pada program pengelolaan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, pengembangan perumahan dan permukiman serta berbagai kegiatan terkait lainnya.



Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar 161,3 Triliun.

## APBN KEMENTERIAN PUPR

Triliun Rupiah



**Sumber**  
Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

**Status Data**  
2022





Berdasarkan jenis belanja, APBN dibagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Persentase terbesar pengalokasian APBN Kementerian PUPR Tahun 2021 adalah belanja modal yaitu sebesar 69% atau senilai 111.378,80 miliar rupiah. Belanja barang memiliki persentase sebesar 29% atau senilai 47.133,46 miliar rupiah, dan sebesar 2% dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 2.800,49 miliar rupiah.

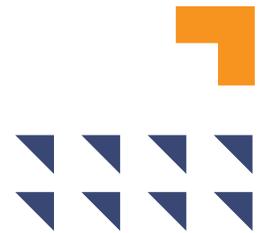
### APBN PUPR Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

Dalam Miliar



**Sumber**  
Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

**Status Data**  
2022

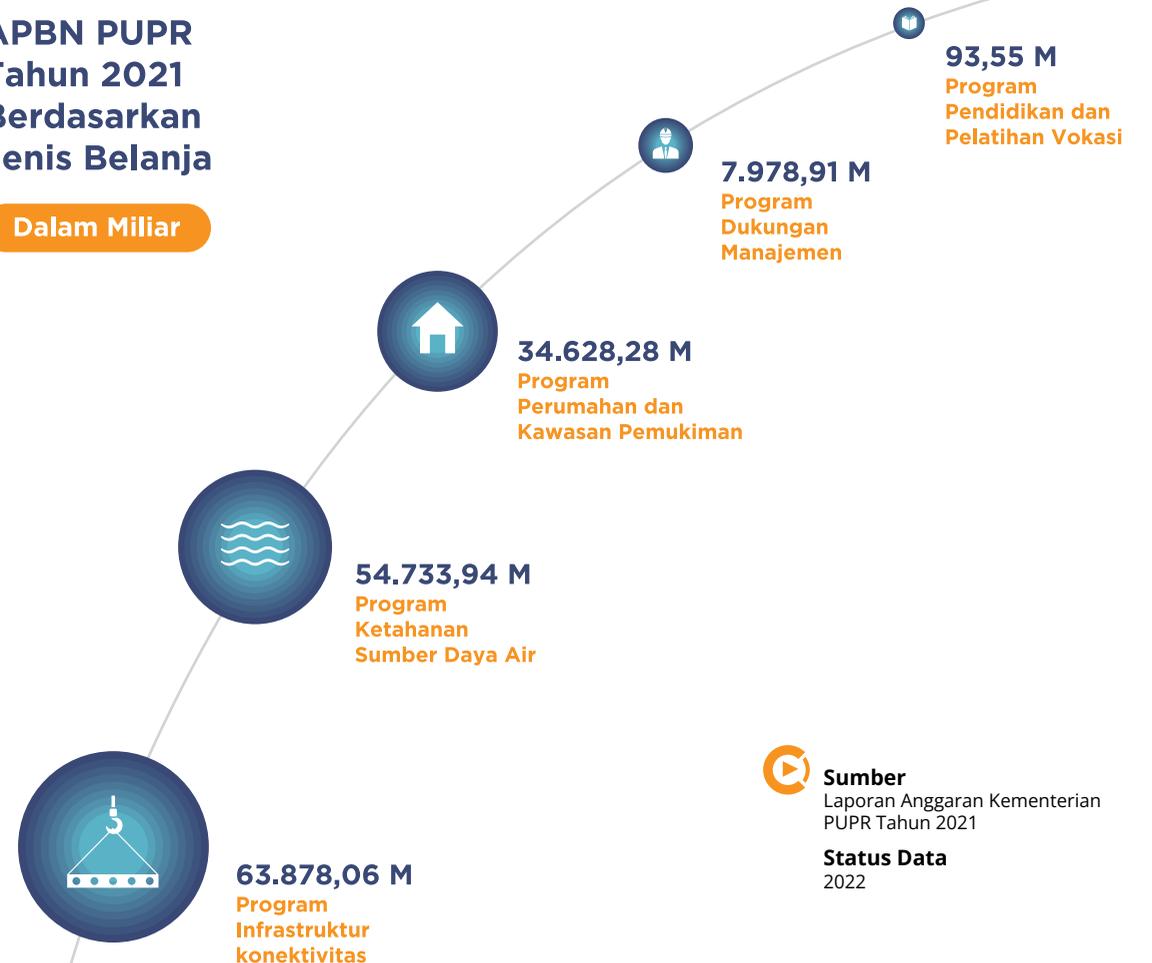


Berdasarkan jenis program, APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 dialokasikan untuk 5 jenis program. Anggaran terbesar dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas yaitu senilai 63.878,06 miliar rupiah atau sebesar

39,60% dan tertinggi kedua dialokasikan untuk program ketahanan sumber daya air yaitu senilai 54.733,94 miliar rupiah atau sebesar 33,93%.

### APBN PUPR Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

Dalam Miliar

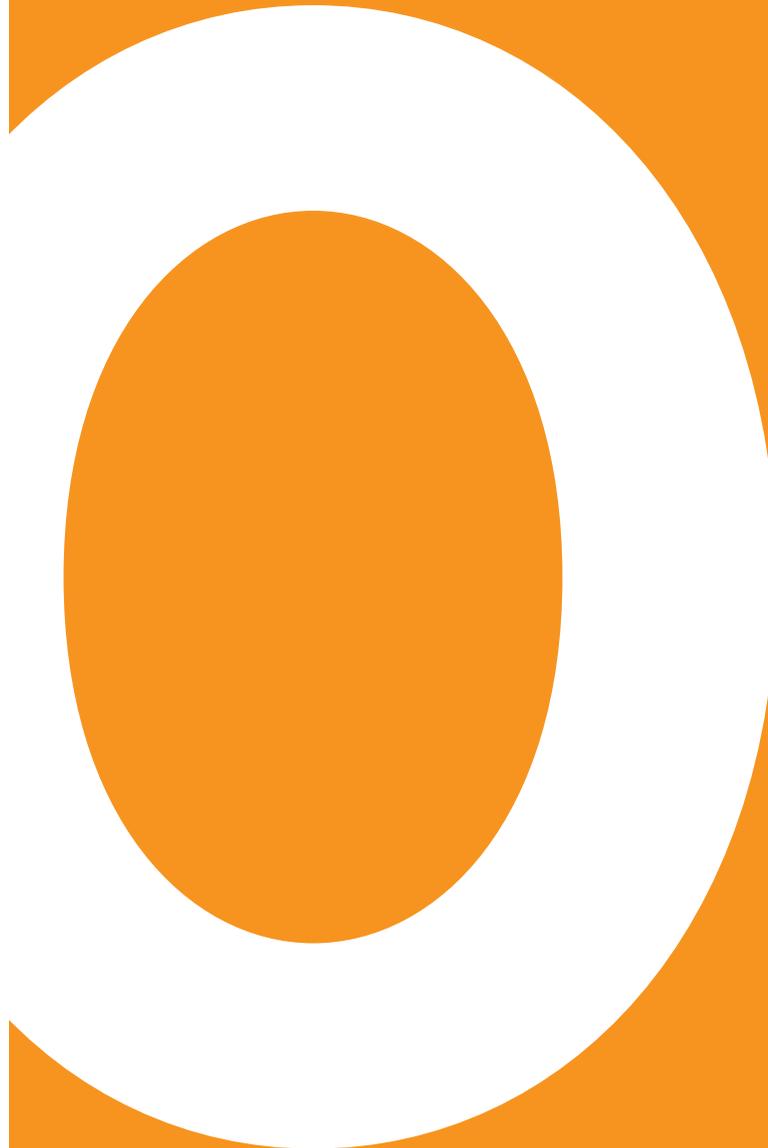


**Sumber**  
Laporan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2021

**Status Data**  
2022



Bendungan Beroperasi  
Danau, Situ, Embung  
Sabo Dam



DIREKTORAT JENDERAL

# SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PUPR



# SUMBER DAYA AIR

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan salah satu unit organisasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bagian ini akan disampaikan infrastruktur bidang pengelolaan sumber daya air.



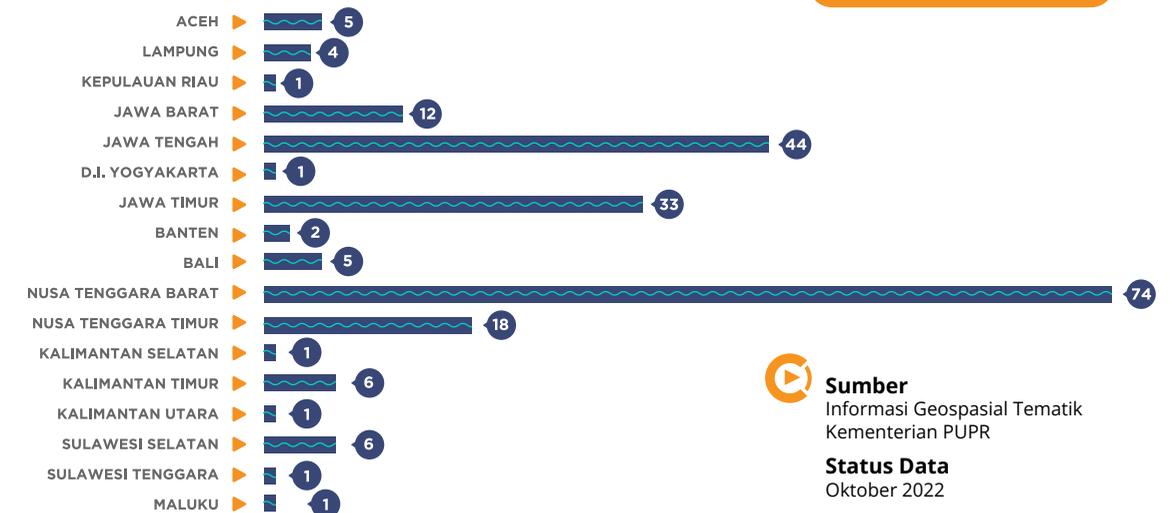
## A. BENDUNGAN BEROPERASI

Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, dijelaskan bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan antara lain adalah untuk meningkatkan manfaat serta fungsi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur.

Tak hanya itu bendungan juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan tempat berwisata. Tujuan pembangunan bendungan ada dua yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Berikut ini adalah jumlah bendungan di setiap provinsi yang berada dalam pengelolaan Kementerian PUPR.

### Sebaran Bendungan

di Indonesia



**Sumber**  
Informasi Geospasial Tematik  
Kementerian PUPR  
**Status Data**  
Oktober 2022

## B. DANAU, SITU, EMBUNG

Danau merupakan tampungan air yang dikelilingi oleh daratan dan terbentuk akibat dari proses alami seperti aktivitas tektonik, vulkanik, dan lain-lain. Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya. Sementara embung merupakan waduk berukuran mikro yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering. Pembangunan embung dapat mencegah banjir saat musim hujan dan menjadi persediaan air saat kemarau.

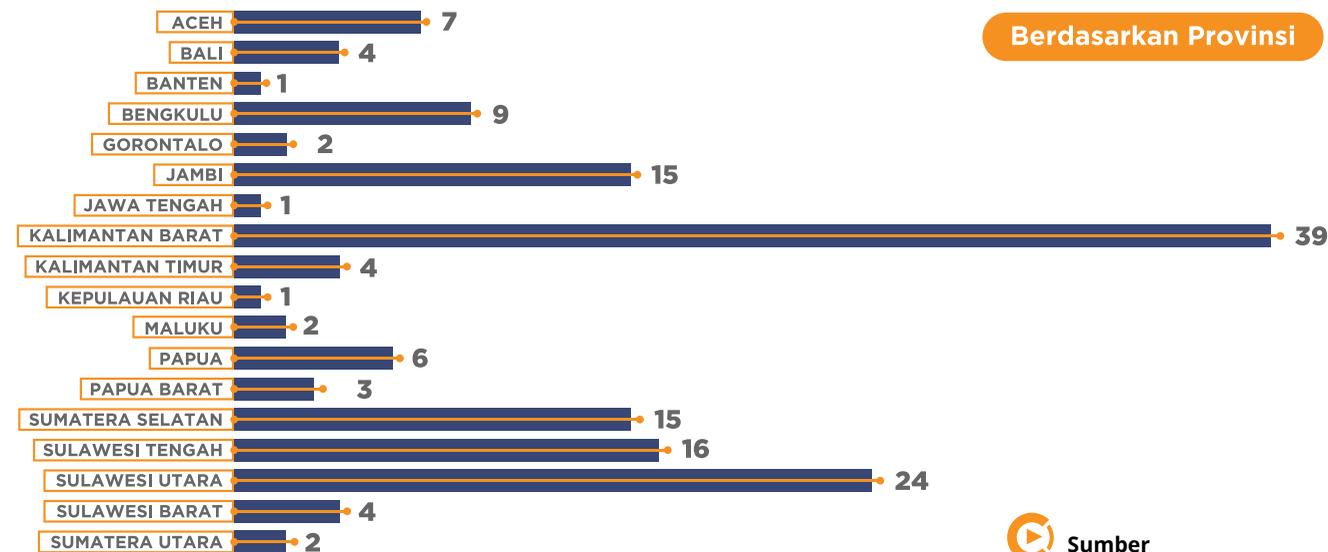
Selain infrastruktur bendungan, danau, situ dan embung menjadi aset infrastruktur sumber daya air yang berfungsi sebagai tampungan atau cadangan air bagi manusia. Beberapa danau di Indonesia mengalami kondisi kritis baik dari volume danau yang menyusut ataupun kualitas danau yang menurun. Terhadap danau-danau kritis tersebut, Kementerian PUPR melakukan revitalisasi untuk mengembalikan fungsi tampungan air.

Berikut ini sebaran danau, situ dan embung menurut provinsi yang tercatat di Kementerian PUPR.



### Jumlah Danau

Berdasarkan Provinsi



### Jumlah Situ

Berdasarkan Provinsi



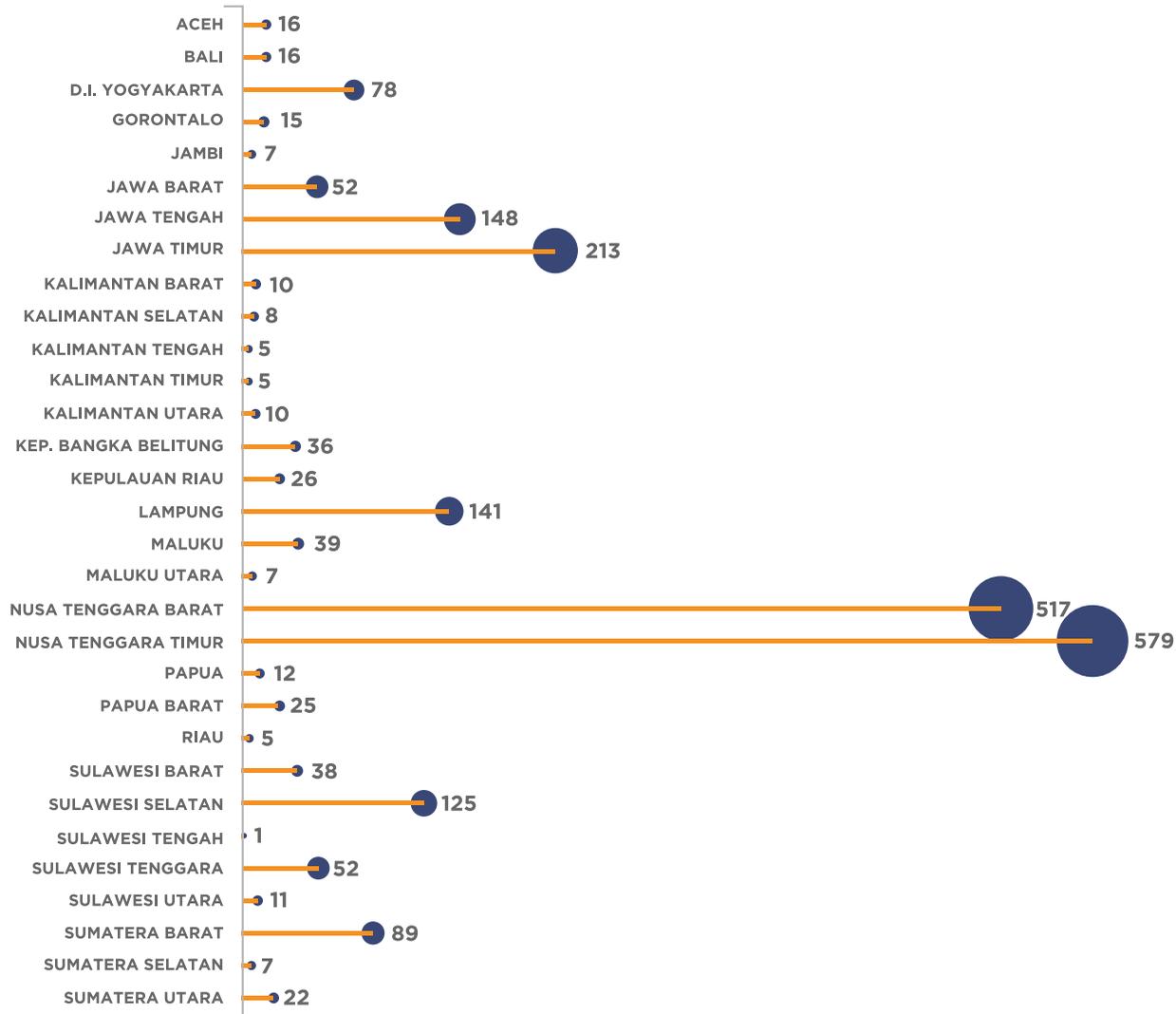
**Sumber**  
Informasi Geospasial Tematik  
Kementerian PUPR

**Status Data**  
Oktober 2022



## Jumlah Embung

Berdasarkan Provinsi



**Sumber**  
Informasi Geospasial Tematik  
Kementerian PUPR

**Status Data**  
Oktober 2022

## C. Sabo Dam

Sabo dam merupakan bangunan yang dipasang melintang alur di hulu sungai lahar. Bangunan tersebut berfungsi untuk mengendalikan dasar sungai bagian hilir agar tetap stabil meskipun ada suplai material, atau sedimen yang terangkut oleh aliran air. Dengan kata lain sabo dam akan mengarahkan laju aliran lahar, dan mengendalikan seberapa banyak material yang diizinkan menuju ke hilir. Sabo dam banyak dibangun untuk mengurangi risiko banjir lahar gunung api.



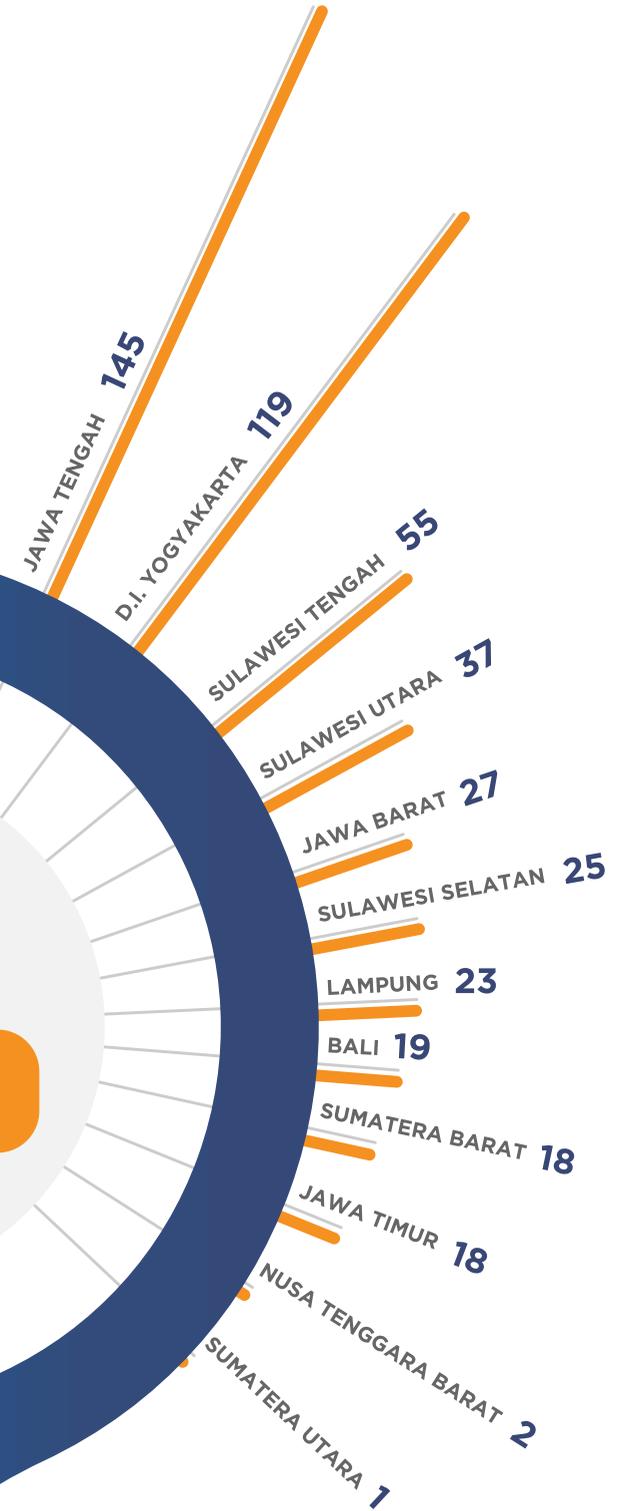


**Sumber**  
Informasi Geospasial Tematik  
Kementerian PUPR  
**Status Data**  
Oktober 2022



## Jumlah Sabo Dam

Berdasarkan Provinsi





Jalan Nasional  
Jalan Daerah  
Jalan Tol Beroperasi  
Jalan Tol Konstruksi  
Jembatan  
Jembatan Khusus  
Jembatan Gantung



# 04

DIREKTORAT JENDERAL

**BINA MARGA**

KEMENTERIAN PUPR



# BINA MARGA

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Adapun Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

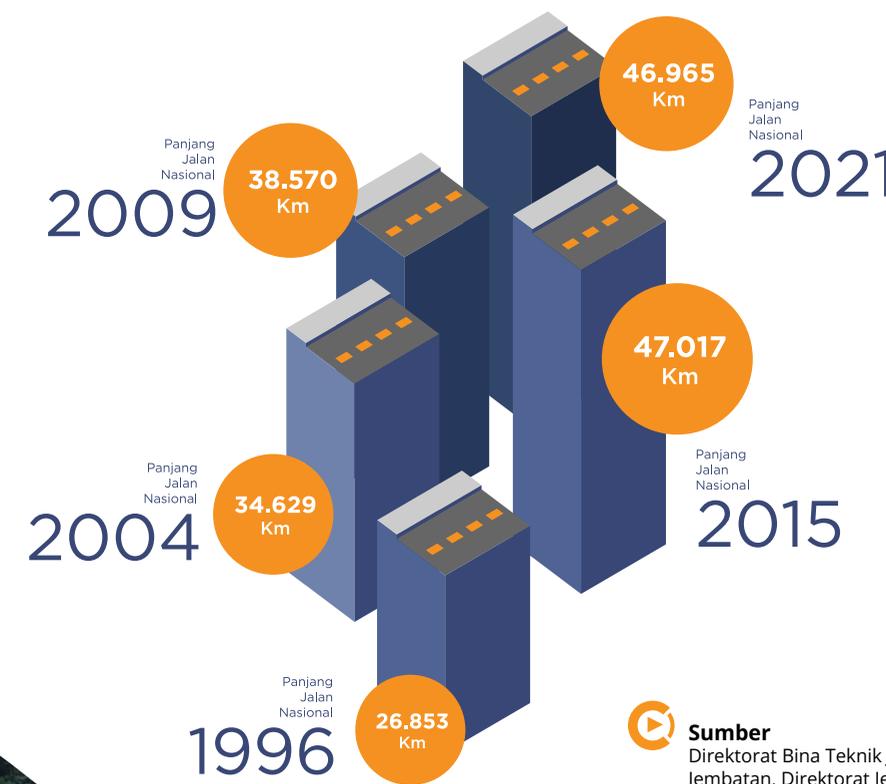
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 menyebut bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa. Undang Undang tersebut juga mengatur mengenai pembagian wewenang penyelenggaraan jalan, dimana Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam Pengembangan Sistem Jaringan jalan secara nasional, penyelenggaraan Jalan secara umum dan Jalan Nasional. Adapun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pada Jalan Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa yang berada di wilayahnya.



## 1. JALAN NASIONAL

Jalan nasional meliputi jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Kewenangan penyelenggaraan jalan nasional berada pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan.



**Sumber**  
Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

**Status Data**  
Maret 2022

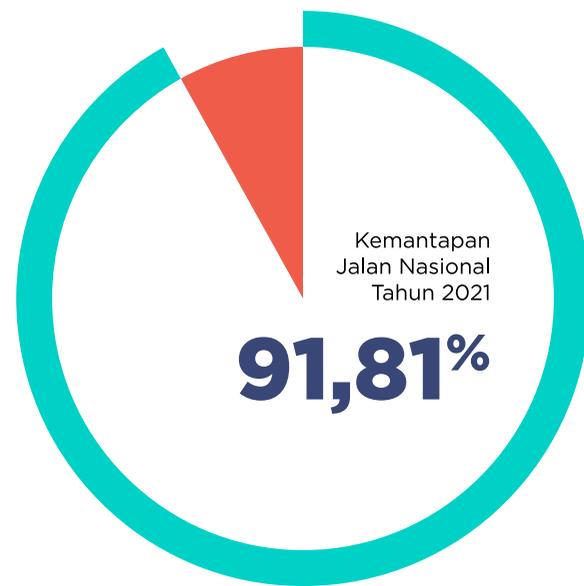


### Panjang Jalan Nasional

Tahun	1996	2004	2009	2015	2021
Panjang (Km)	26.853	34.629	38.570	47.017	46.965

Panjang jalan nasional dari tahun 1996 hingga 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan, panjang Jalan Nasional non tol seluruh Indonesia adalah 47.017,27 km. Kemudian terdapat 13 ruas Jalan Nasional telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.04.03-Mn/708. Maka total panjang Jalan Nasional menjadi 46.964,78 km.

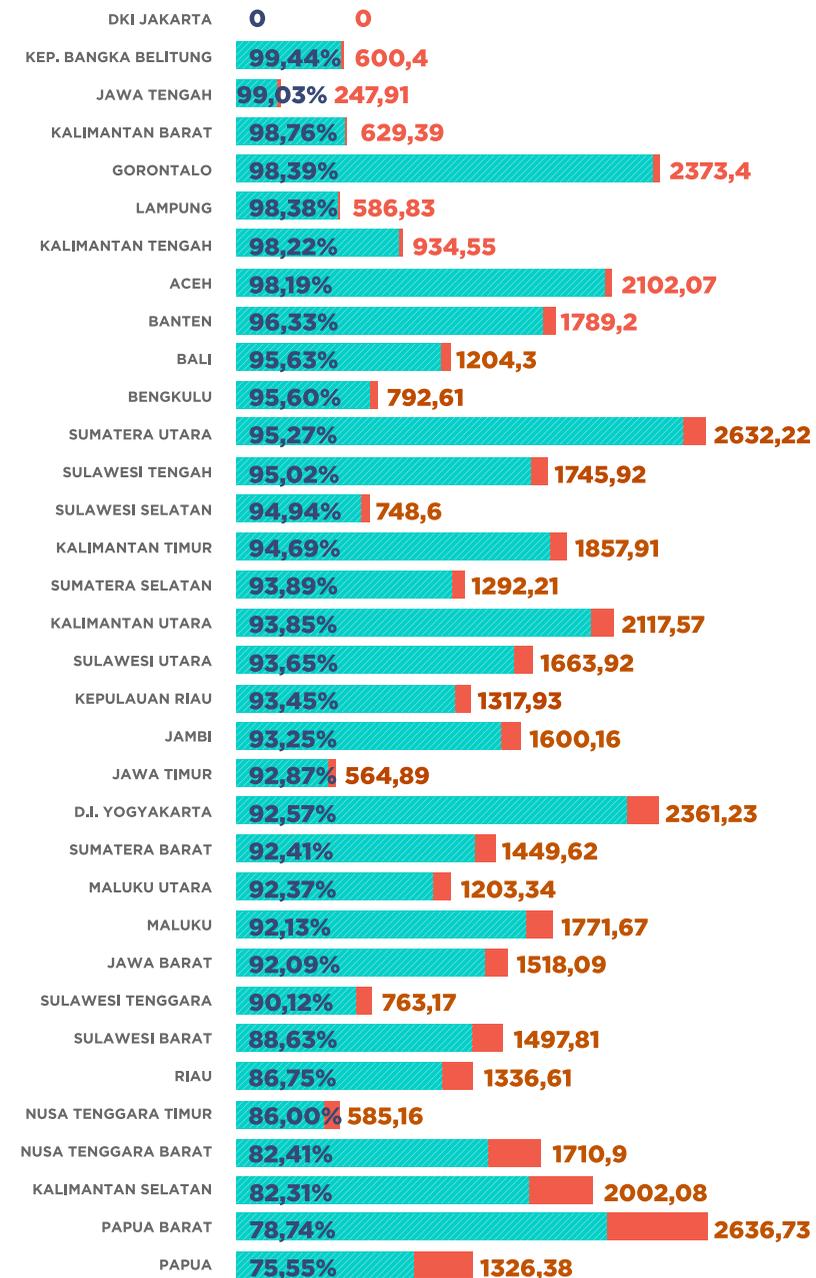
Kondisi Jalan Nasional di Indonesia secara umum di tahun 2021 dalam kondisi mantap dengan persentase 91,81%. Kondisi ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang mencapai 91,27%. Provinsi dengan persentase jalan mantap terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 99,44%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 75,55%.



Mantap Tidak Mantap

### Panjang Jalan Nasional

Berdasarkan Kemantapan (km)



Mantap Tidak Mantap

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah, pemerintah telah menetapkan beberapa target dalam penyelenggaraan jalan nasional. Penentuan target pembangunan diperlukan mengingat keberadaan infrastruktur jalan berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mempermudah akses distribusi barang dan jasa yang mana akan meningkatkan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya indikator jalan nasional tidak hanya dilihat dari segi kemantapan saja melainkan dari tingkat aksesibilitas, waktu tempuh, rating kondisi dan rating keselamatan jalan nasional.

Tingkat aksesibilitas jalan nasional di tahun 2021 mencapai 81,78% dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 81,70%. Namun hal tersebut belum berimplikasi pada penurunan waktu tempuh utamanya pada jalan lintas utama pulau yang di tahun 2021 mencapai 2,22 jam/100km; naik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 2,16 jam/100km.

Rating kondisi jalan nasional di tahun 2021 mencapai 2,64; turun dibanding tahun 2020 yang mencapai 2,66. Sementara itu pada indikator rating keselamatan jalan nasional di tahun 2021 mencapai 3,15; turun dibanding tahun 2020 yang mencapai 3,514.



**Keterangan**

Jalan nasional Provinsi DKI Jakarta masuk kedalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi.



**Sumber**

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

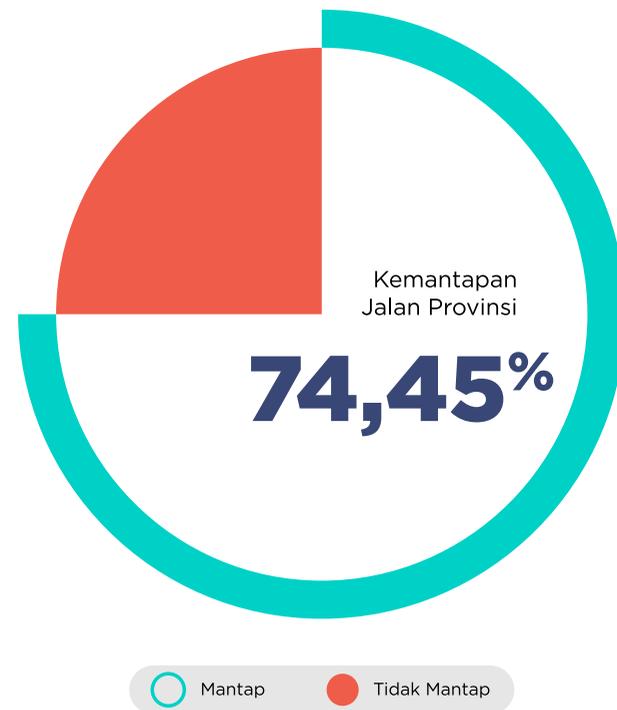
**Status Data**

Maret 2022

## 2. JALAN DAERAH

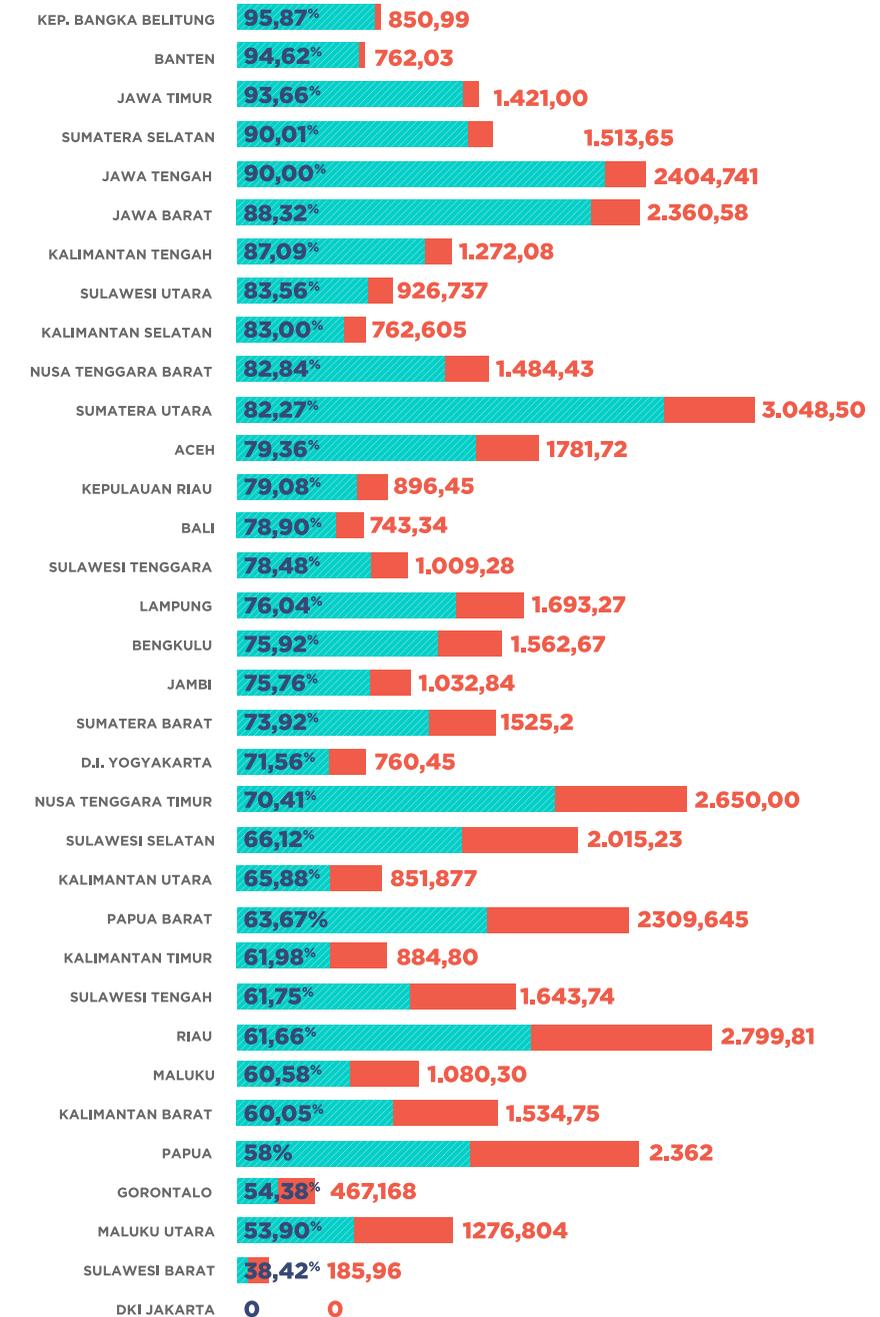
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota turut memiliki kewenangan atas penyelenggaraan infrastruktur jalan, yaitu Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Kewenangan dalam Penyelenggaraan jalan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Total panjang jalan daerah pada tahun 2021 mencapai 463.607,5 km yang terdiri atas 47.874 km jalan provinsi dan 415.733 km jalan kab/kota. Secara umum kondisi kemantapan jalan daerah di Indonesia dalam kondisi mantap dengan persentase sebesar 74,45% mantap untuk jalan provinsi dan 63,64% mantap jalan kabupaten/kota.

Untuk Jalan Provinsi, provinsi dengan kemantapan jalan provinsi tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan persentase sebesar 95,87% atau 815,87 km. sedangkan provinsi dengan kemantapan jalan provinsi terendah yaitu Sulawesi Barat dengan persentase sebesar 38,42% atau 71,45 km. Untuk Jalan kabupaten/Kota, Provinsi dengan kemantapan jalan kabupaten/Kota tertinggi adalah Jawa Timur dengan persentase sebesar 83,35% atau 31.548,24 km. sedangkan provinsi dengan kemantapan jalan kabupaten/kota terendah yaitu Gorontalo dengan persentase sebesar 45,97% atau 4.258,11 km.

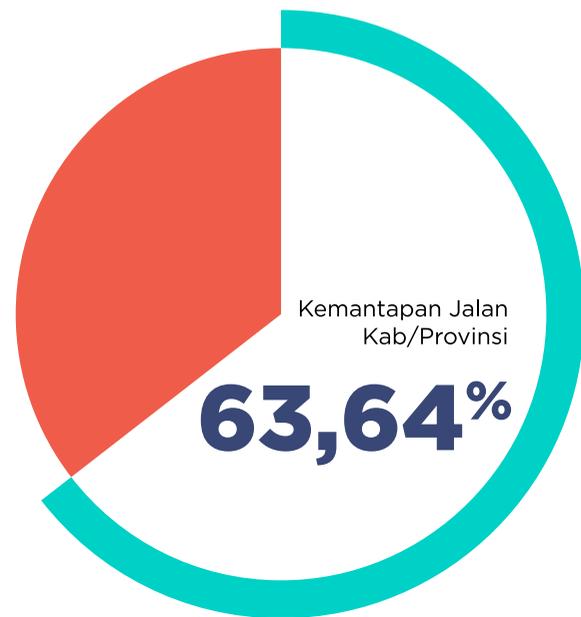


## Panjang Jalan Provinsi

Berdasarkan Kemantapan (km)



Mantap Tidak Mantap

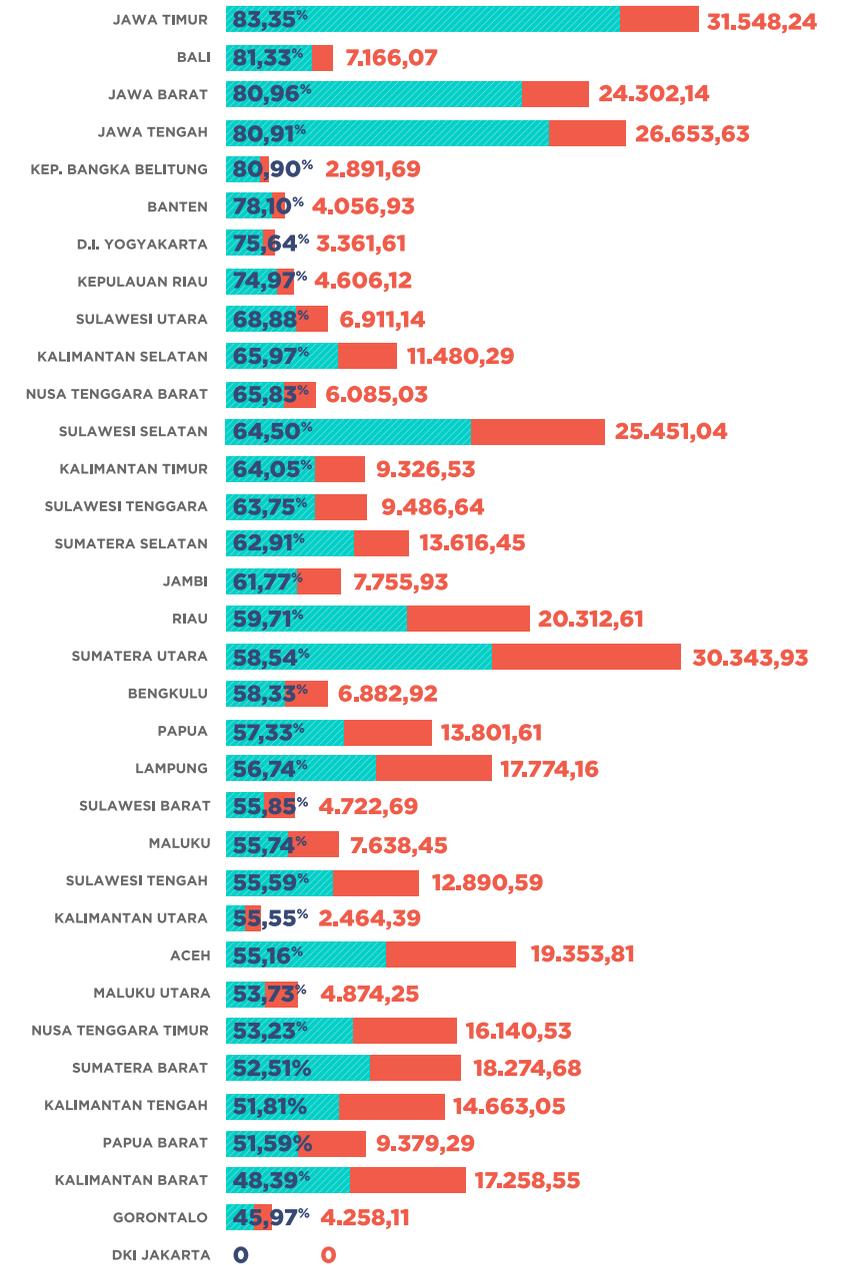


○ Mantap    ● Tidak Mantap



## Panjang Jalan Kab/Kota

Berdasarkan Kemantapan (km)



■ Mantap    ■ Tidak Mantap



**Sumber**  
Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga

**Status Data**  
Agustus 2022



### 3. **JALAN TOL BEROPERASI**

Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Jalan tol juga berkontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga arus barang & jasa antar wilayah dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah tersebut, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan jalan tol yang hingga saat ini terdapat 68 ruas jalan tol dengan panjang 2.545 km yang telah beroperasi serta 27 ruas (1.809 km) yang masih dalam proses pembangunan. Berikut adalah sebaran jalan tol baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses pembangunan.



Trans Sumatera

707,58 km



Kalimantan

92,27 km

Balikpapan - Samarinda 92,27 km

Sulawesi

61,46 km



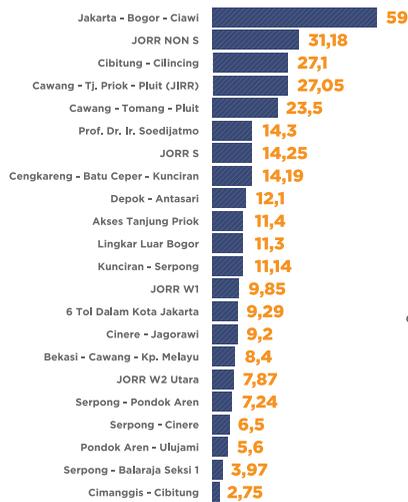
Non Trans

285,26 km



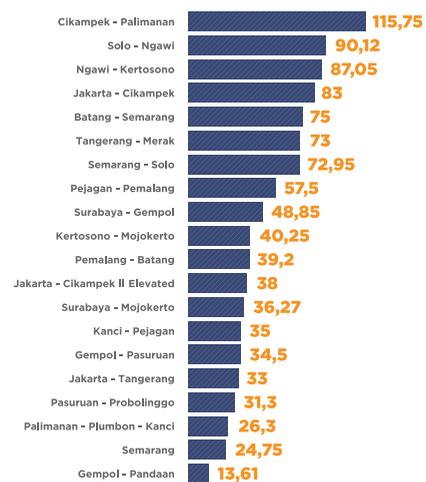
Jabodetabek

327,18 km



Trans Jawa

1055,4 km



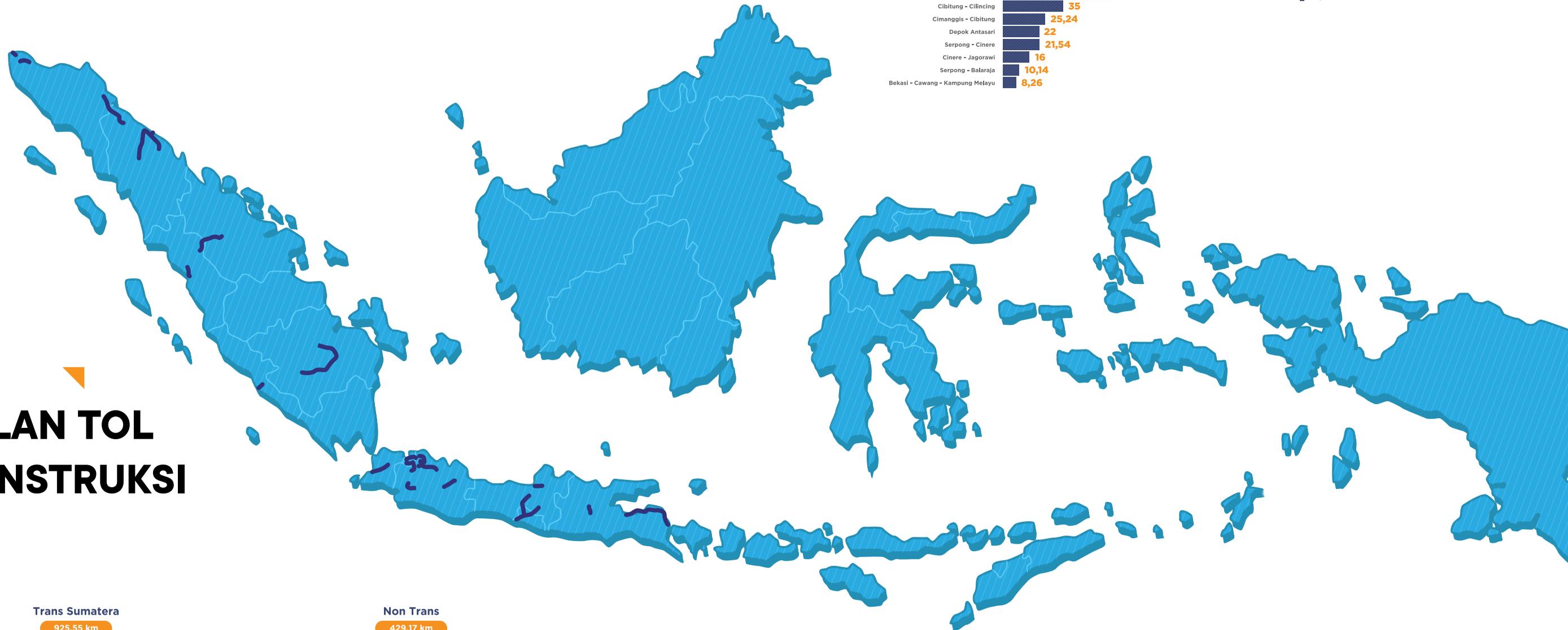
Bali

10,07 km

Bali - Mandara 10,07 km

68 Ruas Jalan Tol Beroperasi dengan panjang 2545 km

# 4. JALAN TOL KONSTRUKSI



Jabodetabek

271,95 km



Trans Jawa

185,65 km



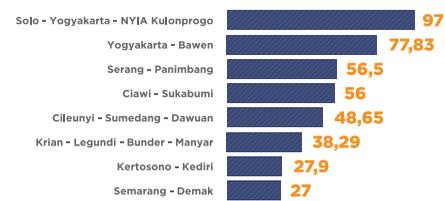
Trans Sumatera

925,55 km



Non Trans

429,17 km



27 Ruas Jalan Tol Dalam Pembangunan dengan panjang 1.813 km

# 5. JEMBATAN

Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat, rute atau lintasan yang terpisah karena faktor geografis seperti sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan kondisi lainnya. Keberadaan jembatan mendukung efisiensi baik dari segi waktu yang ditempuh maupun kemudahan akses yang mana turut berimplikasi pada pengurangan biaya transportasi.

Kementerian PUPR terus melanjutkan program pembangunan dan revitalisasi jembatan. Hingga tahun 2021 terdapat 18.925 unit Jembatan Nasional dengan total panjang mencapai 536.585 m. Provinsi yang memiliki jumlah jembatan terbanyak adalah Provinsi Aceh dengan jumlah jembatan 919 unit dan total panjang jembatan 22.527 m.

Secara umum jembatan di Indonesia dalam kondisi mantap dengan persentase sebesar 84,69%. Provinsi dengan kemandapan jembatan tertinggi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase 100%. sedangkan provinsi dengan kemandapan jembatan terendah yaitu Sulawesi Tengah dengan persentase sebesar 48,71%.

## Jumlah Jembatan Nasional

18.925 unit

### Kondisi Mantap

16.028 unit

### Kondisi Tidak Mantap

2.897 unit

## Total Panjang Jembatan Nasional

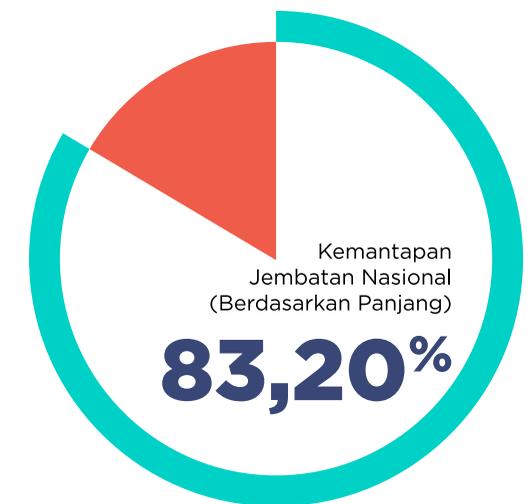
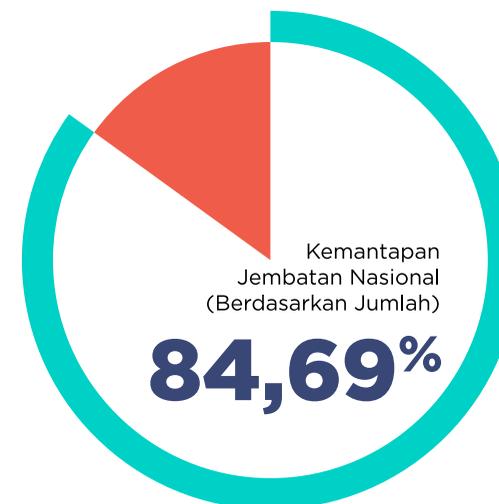
536.584,72 m

### Kondisi Mantap

446.414,28 m

### Kondisi Tidak Mantap

90.170,44 m

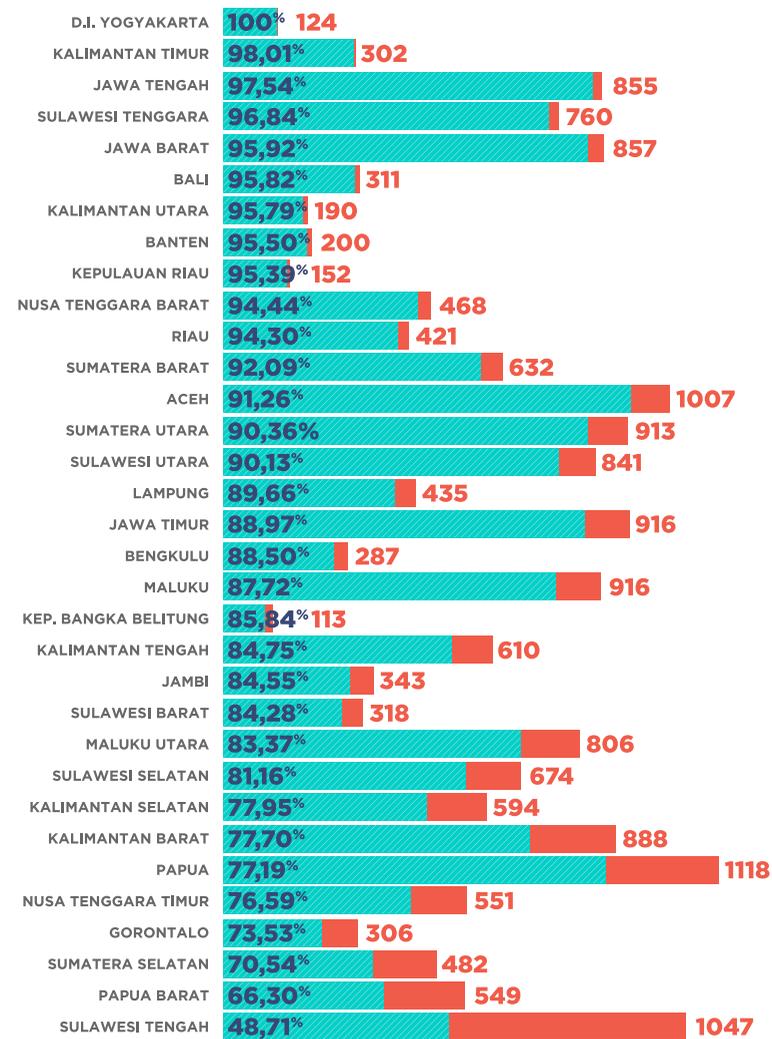


**Sumber**  
Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

**Status Data**  
September 2022

## Jumlah Jembatan

Berdasarkan Kondisi Kemantapan



Mantap Tidak Mantap

**Sumber**  
Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

**Status Data**  
September 2022



## 6. JEMBATAN KHUSUS

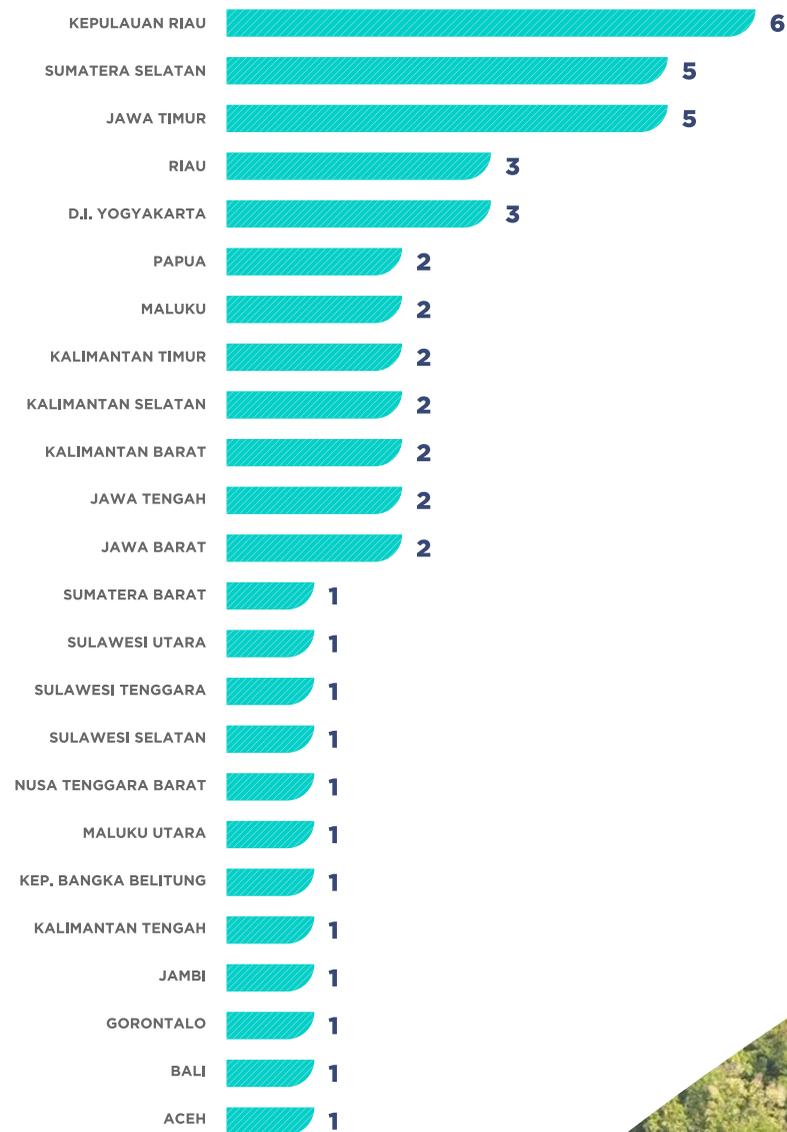
Jembatan Khusus merupakan jembatan yang memiliki spesifikasi teknis dan khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan dan spesifikasi peralatan utama yang dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi dengan keadaan yang khusus pula. Jembatan yang memiliki tinggi pilar diatas 40m dapat dikategorikan sebagai jembatan khusus.

Tercatat hingga Tahun 2021 terdapat sebanyak 48 unit jembatan khusus di Indonesia dengan total panjang 28.889 m. Provinsi dengan jumlah jembatan khusus terbanyak adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah jembatan khusus sebanyak 6 unit dan total panjang jembatan 2.262 m.



## Jumlah Jembatan Khusus

Berdasarkan Provinsi



**Sumber**  
sigi.pu.go.id

**Status Data**  
10 Oktober 2022

# 7. JEMBATAN GANTUNG

Jembatan gantung adalah jembatan dengan sistem struktur jembatan yang menggunakan *wire rope* (kabel) sebagai pemikul utama beban lalu lintas dan berat sendiri. Pada sistem ini *wire rope* utama memikul beberapa *hanger* (penggantung) yang menghubungkan antara *wire rope* utama dengan gelagar/ struktur jembatan.

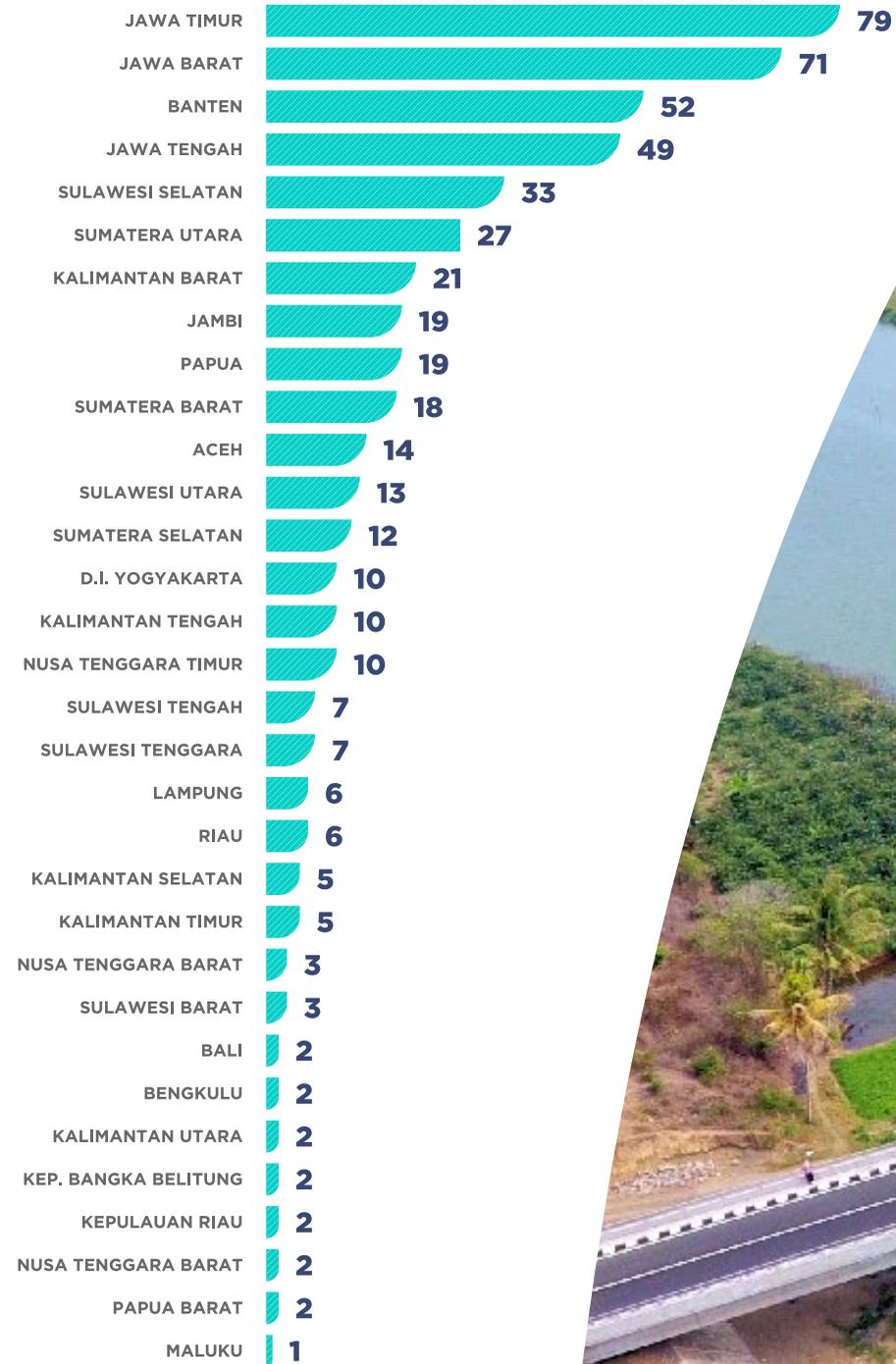
Hingga tahun 2021 tercatat ada sebanyak 514 jembatan gantung di Indonesia dengan total panjang 38.889 m. Provinsi yang memiliki jembatan gantung terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah jembatan gantung sebanyak 79 unit dan total panjang 5.418 m.





# Jumlah Jembatan Gantung

Berdasarkan Provinsi





- Sistem Penyediaan Air Minum
- Kinerja BUMD Air Minum
- TPA Sampah
- IPAL
- IPLT
- Bina Penataan Bangunan
- PLBN
- Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Fasilitas Pendidikan
- Sarana Olahraga
- Pasar Rakyat
- Pengembangan Kawasan Permukiman



DIREKTORAT JENDERAL

**CIPTA KARYA**  
KEMENTERIAN PUPR

# CIPTA KARYA

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pos lintas batas negara, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hingga tahun 2022, infrastruktur permukiman tersebut terus bertambah baik dari segi ketersediaan (kuantitas) maupun kualitasnya. Bab ini memaparkan berbagai data dan perkembangan pembangunan infrastruktur permukiman yang berada dalam ranah tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya.

## A. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem penyediaan air minum yang baik guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.



## Jumlah Infrastruktur SPAM

Berdasarkan Provinsi

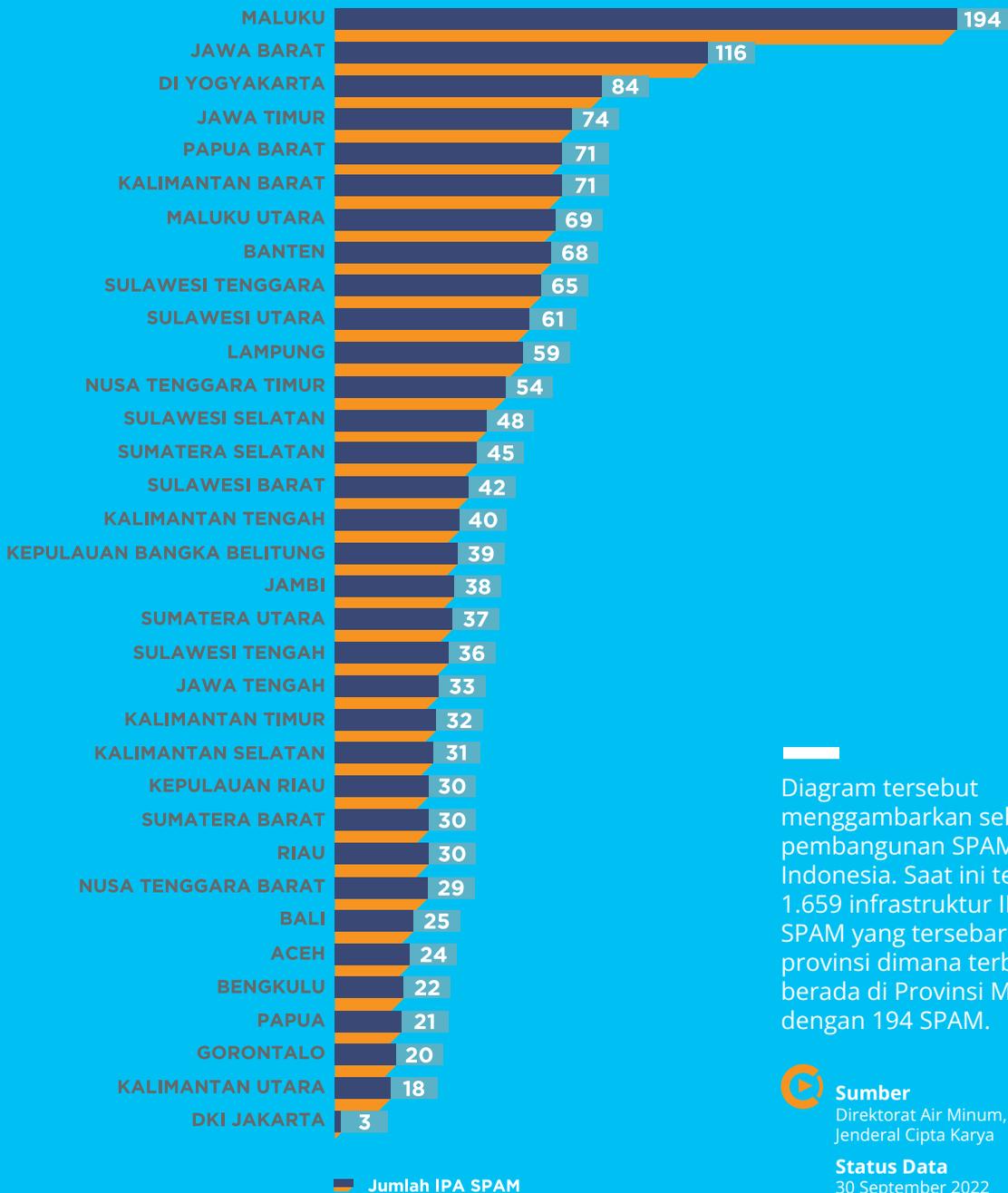


Diagram tersebut menggambarkan sebaran pembangunan SPAM di Indonesia. Saat ini terdapat 1.659 infrastruktur IPA SPAM yang tersebar di 34 provinsi dimana terbanyak berada di Provinsi Maluku dengan 194 SPAM.



**Sumber**  
Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya

**Status Data**  
30 September 2022

## B. KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) AIR MINUM

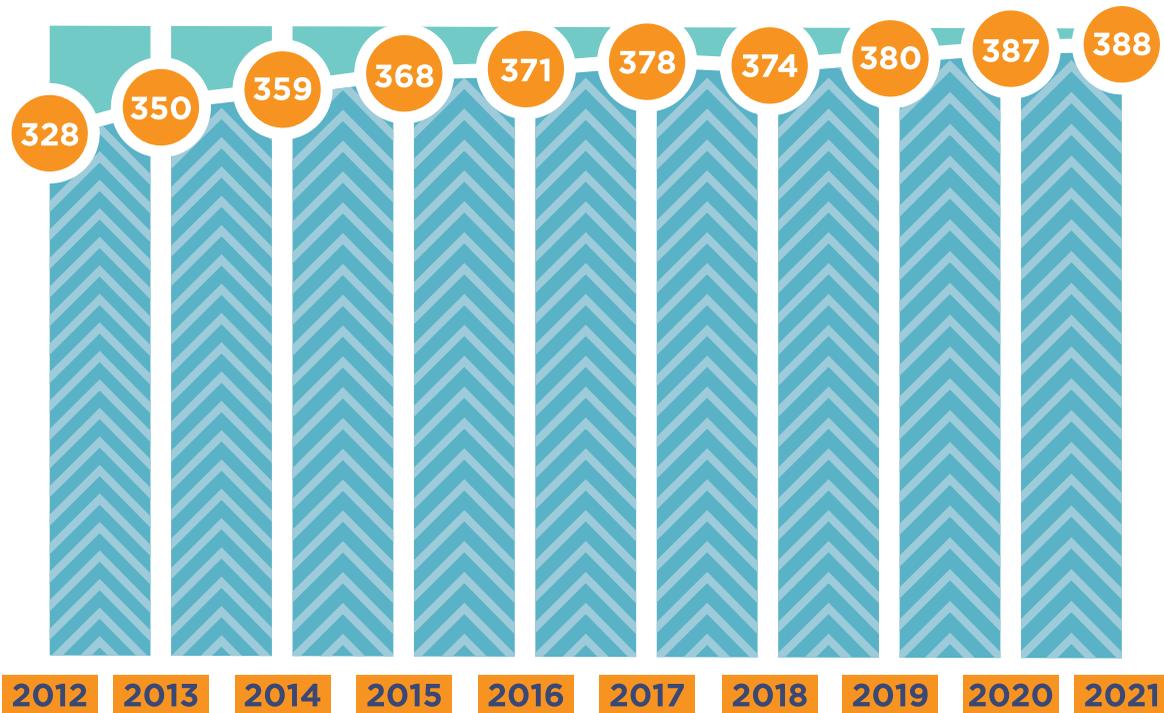
Penyelenggaraan SPAM bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD, kelompok masyarakat, dan badan usaha. Khusus penyelenggaraan yang dilakukan oleh BUMD Air Minum, Direktorat Air Minum Ditjen

Cipta Karya melakukan penilaian kinerja secara berkala setiap tahunnya untuk memastikan kualitasnya semakin meningkat. Penilaian tersebut dilakukan pada 4 aspek kinerja, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.



## BUMD Air Minum yang dinilai Kinerjanya

Tahun 2012-2021



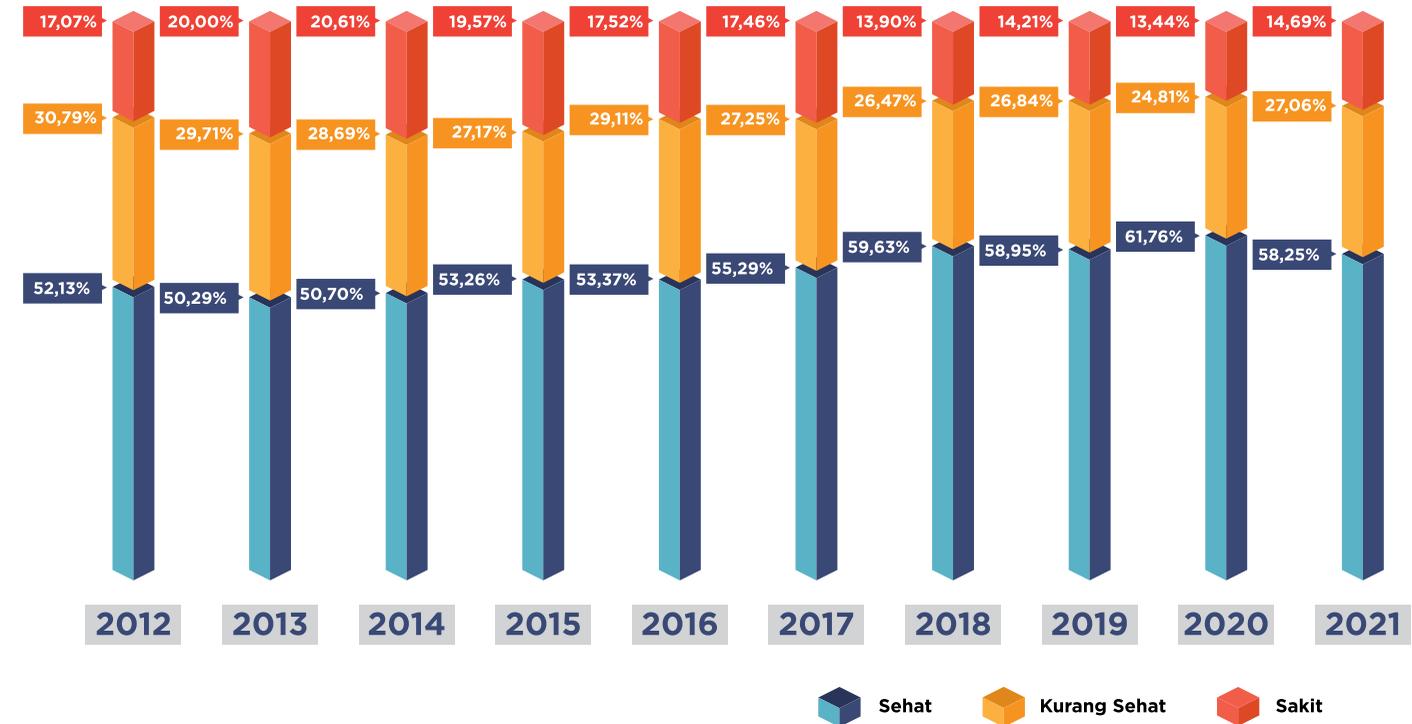
**Sumber**  
Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2021

Jumlah BUMD Air Minum yang dinilai terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 menjadi 388 BUMD. Jumlah ini meningkat sebanyak 1 BUMD dibandingkan dengan tahun 2020.



## Kinerja PDAM

Tahun 2012-2021



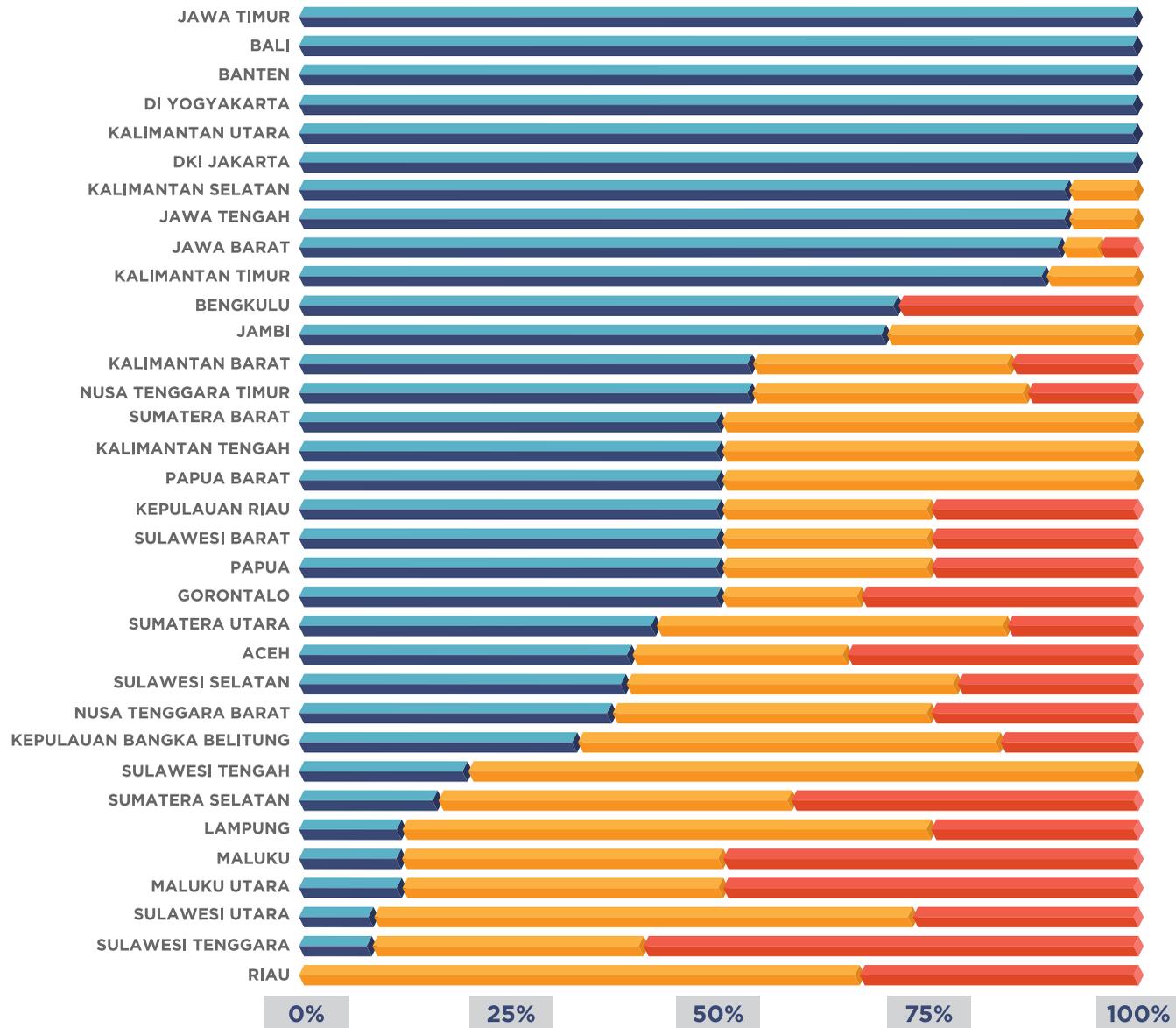
**Sumber**  
Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2021

Kinerja BUMD Air Minum di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 didominasi oleh kategori sehat dengan persentase 45% sampai dengan 60%. Pada tahun 2021 PDAM dengan kategori sehat mencapai 58,25%. Namun capaian tersebut mengalami penurunan 3,51% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 61,76%. Hal ini ditengarai akibat dari pandemi Covid-19 dimana jumlah kategori sehat mengalami penurunan sementara

kategori kurang sehat dan sakit mengalami kenaikan. Adapun persentase BUMD Air Minum kategori kurang sehat masih lebih tinggi dibanding BUMD Air Minum kategori sakit yaitu 24% sampai 28%. Meskipun demikian, secara relatif capaian tahun 2021 telah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 dimana persentase kategori sakit telah jauh berkurang dan kategori sehat naik cukup signifikan.

## Kinerja BUMD Air Minum

Tahun 2021

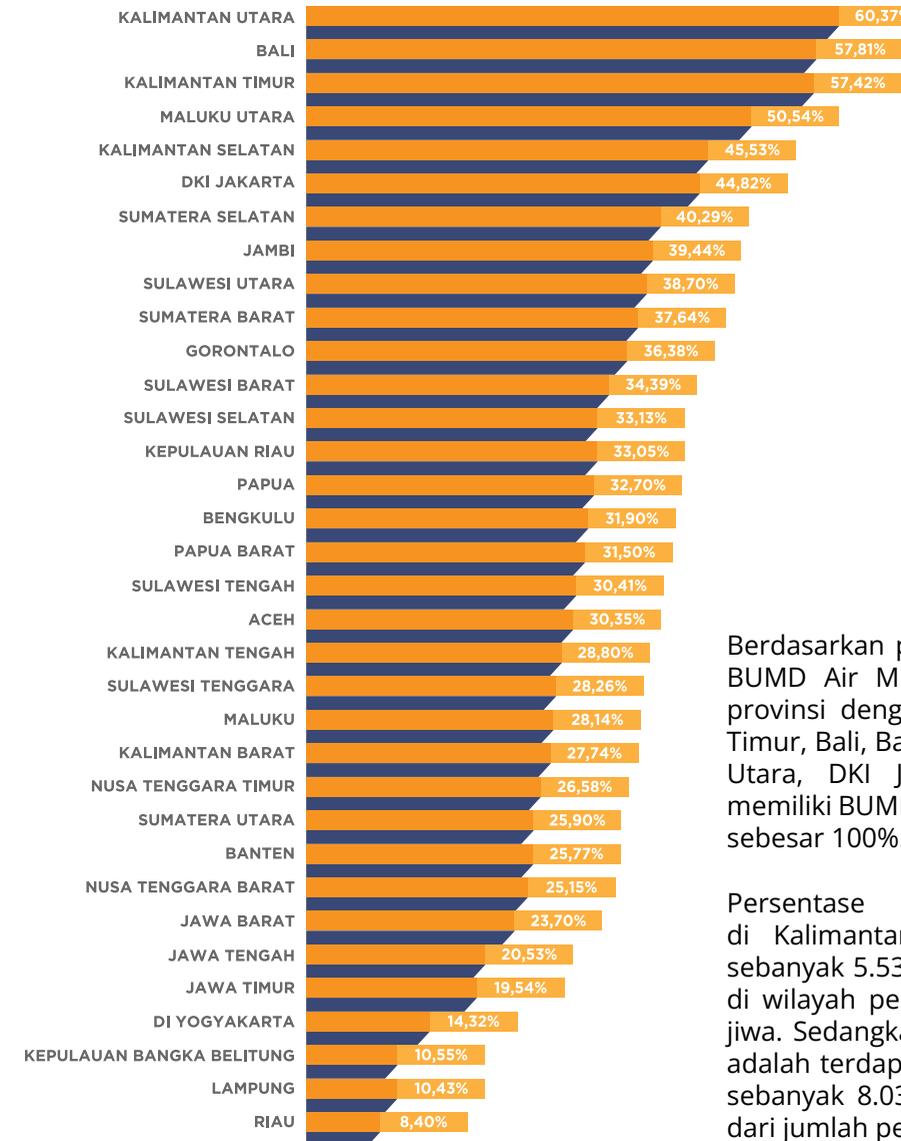


**Sumber**  
Kinerja BUMD Air Minum  
Tahun 2021

Sehat Kurang Sehat Sakit

## Persentase Penduduk Terlayani

Berdasarkan Provinsi



**Sumber**  
Kinerja BUMD Air Minum  
Tahun 2021

Berdasarkan provinsinya, hasil evaluasi kinerja BUMD Air Minum tahun 2021 menunjukkan provinsi dengan kinerja tertinggi adalah Jawa Timur, Bali, Banten, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, dengan masing-masing memiliki BUMD Air Minum dengan kondisi sehat sebesar 100%.

Persentase penduduk terlayani tertinggi di Kalimantan Utara sebesar 60,37% atau sebanyak 5.537.616 jiwa dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya sebanyak 28.338.107 jiwa. Sedangkan penduduk terlayani terbanyak adalah terdapat pada Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 8.030.879 jiwa atau sebesar 23,70% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Adapun persentase terendah berada di Provinsi Riau yang hanya mencapai 8,40%. Hal ini juga berkorelasi dengan kinerja BUMD Air Minum di Riau yang didominasi kategori kurang sehat dan sakit.

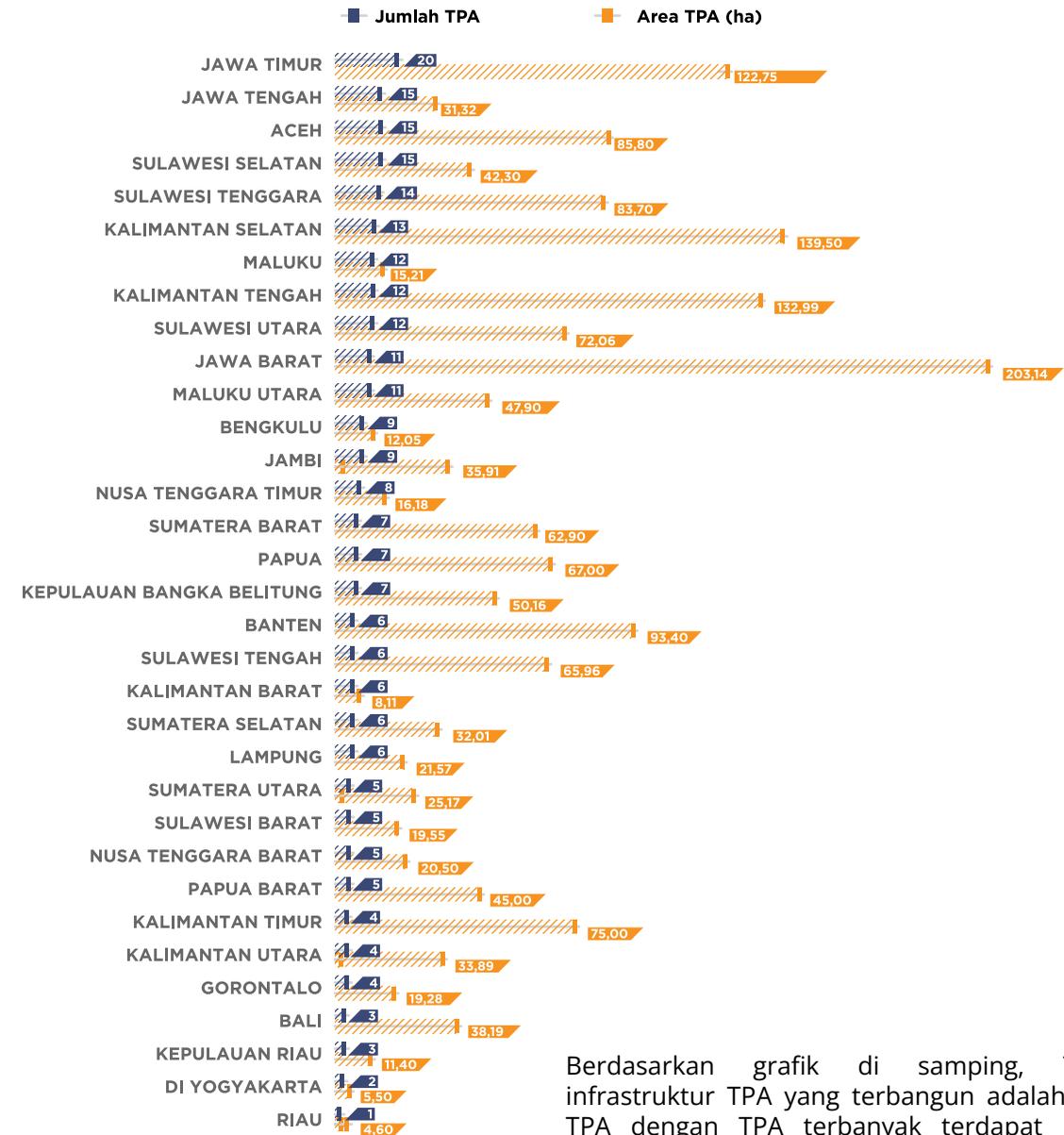
## C. TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan bersih sekaligus menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

Salah satu tugas yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR ialah infrastruktur tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kapasitas TPA yang memadai di kota-kota besar dan seluruh wilayah dibutuhkan untuk mengatasi kuantitas sampah yang masuk. Berikut ini adalah data jumlah TPA di tiap provinsi beserta kapasitas sampah yang masuk.

### Jumlah dan Area TPA (ha)

Berdasarkan Provinsi



Berdasarkan grafik di samping, Total infrastruktur TPA yang terbangun adalah 268 TPA dengan TPA terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 20 TPA dengan luas area TPA 122,75 Ha, sedangkan area TPA terluas terdapat pada provinsi Jawa Barat yaitu 203,14 Ha.

**Sumber**  
Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya  
30 September 2022

## D. INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)

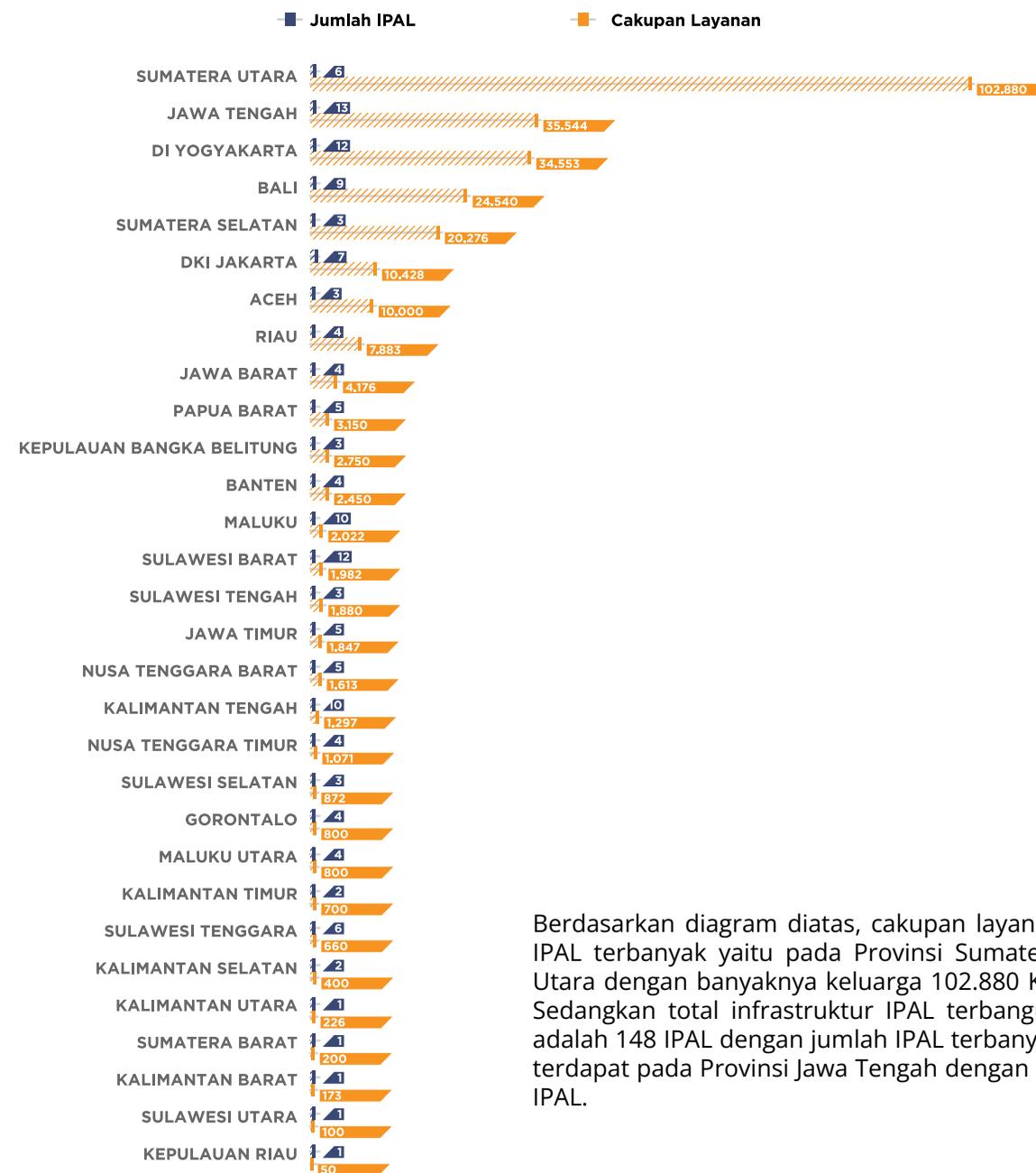
Lingkungan layak huni dan sehat adalah lingkungan yang terjaga kebersihan, kerapian dan kelestariannya. Salah satu tantangan terbesar saat ini selain sampah ialah limbah yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak kualitas tanah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tersebut maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Sistem pengelolaan limbah dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem setempat/kawasan (on site) dan sistem terpusat (off site). Kota-kota besar pada umumnya menggunakan IPAL terpusat yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Kendala dalam pengembangan IPAL terpusat adalah biaya investasi yang besar. Oleh sebab itu, dikembangkan pula IPAL kawasan yang dapat melayani daerah perkotaan maupun desa dengan sistem komunal.



### Jumlah IPAL dan Cakupan Layanan (KK)

Berdasarkan Provinsi



Berdasarkan diagram diatas, cakupan layanan IPAL terbanyak yaitu pada Provinsi Sumatera Utara dengan banyaknya keluarga 102.880 KK. Sedangkan total infrastruktur IPAL terbangun adalah 148 IPAL dengan jumlah IPAL terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan 13 IPAL.

**Sumber**  
 Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya  
 30 September 2022

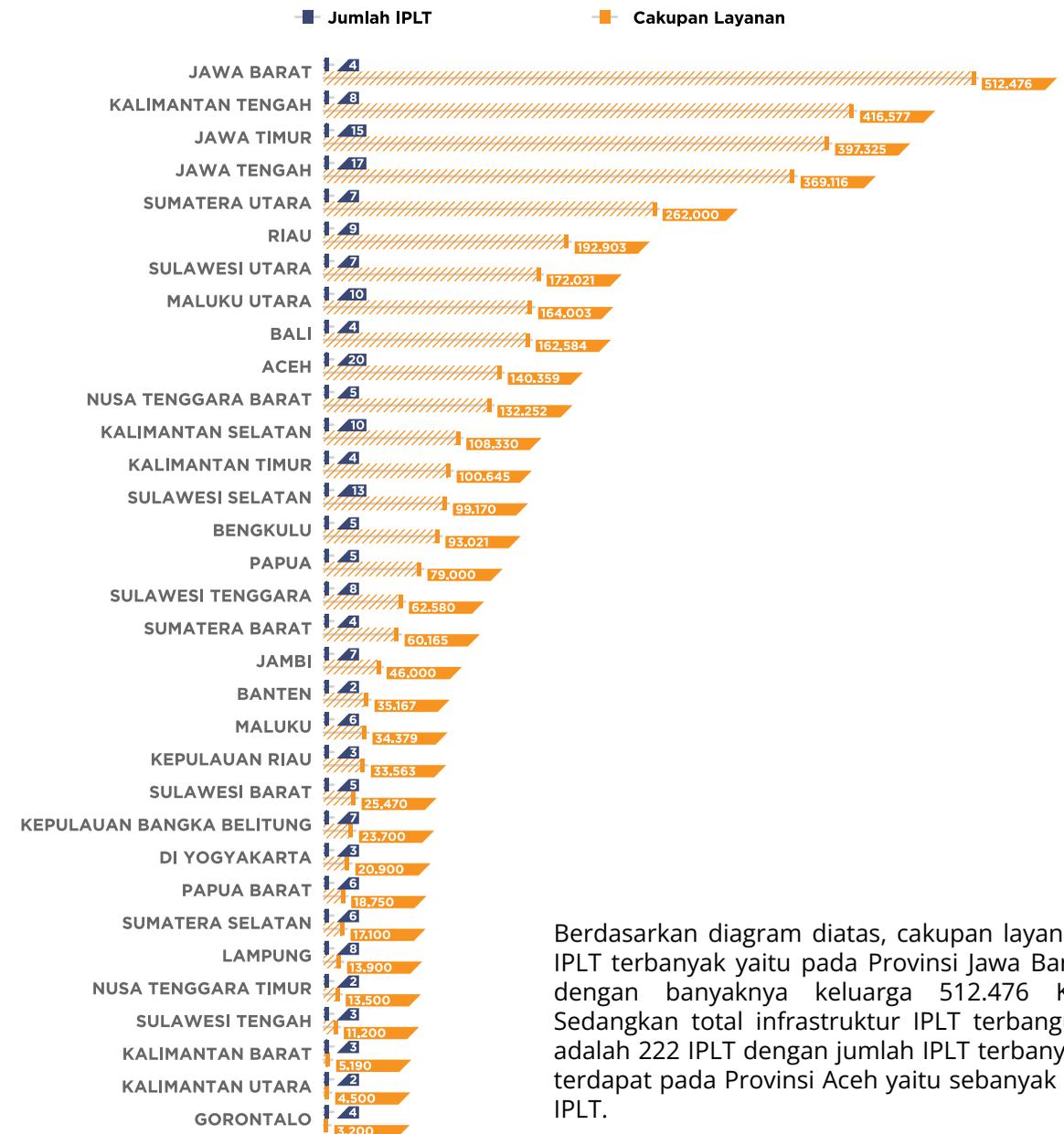
## E. INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)



Penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Keberadaan sanitasi layak dapat secara signifikan menurunkan tingkat kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Selain itu, keberadaan sanitasi layak dapat turut menurunkan prevalensi stunting dan tingkat penyakit yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat. Sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja merupakan salah satu yang terpenting dalam penyediaan sanitasi yang sehat. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah bangunan yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

### Jumlah IPLT dan Cakupan Layanan (KK)

Berdasarkan Provinsi



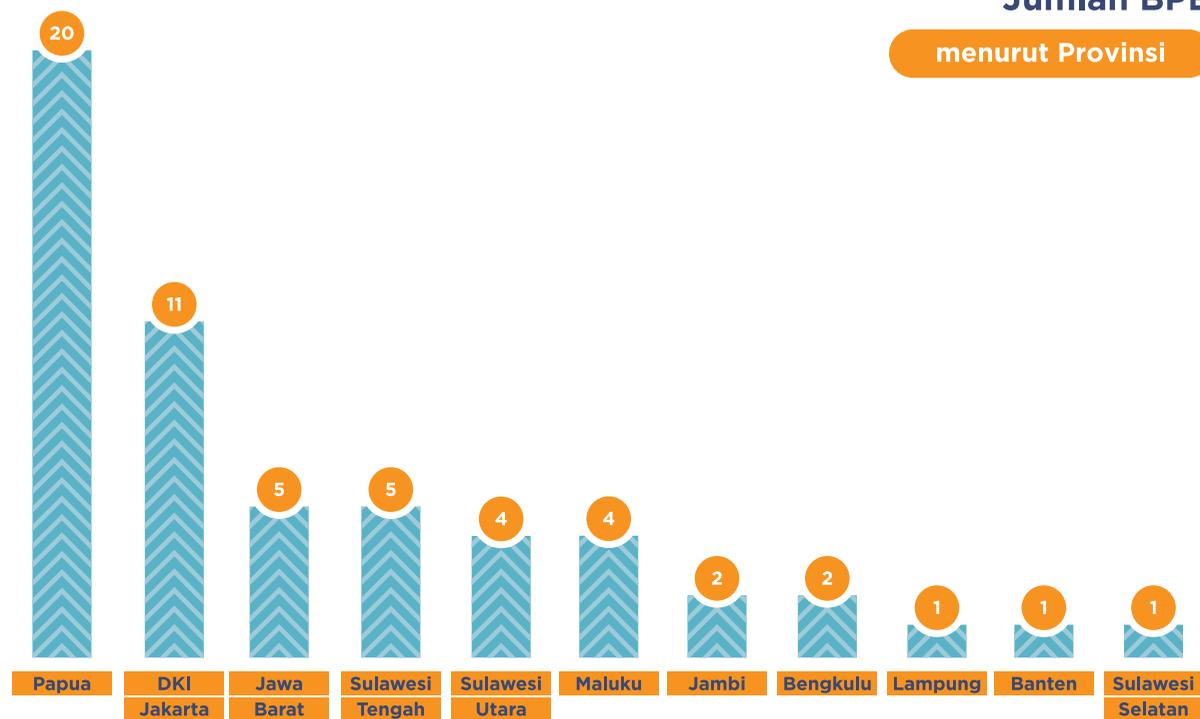
Berdasarkan diagram diatas, cakupan layanan IPLT terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya keluarga 512.476 KK. Sedangkan total infrastruktur IPLT terbangun adalah 222 IPLT dengan jumlah IPLT terbanyak terdapat pada Provinsi Aceh yaitu sebanyak 20 IPLT.

**Sumber**  
Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya  
30 September 2022

## F. BINA PENATAAN BANGUNAN (BPB)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur,

dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara. Program dari Bina Penataan Bangunan di antaranya adalah penataan bangunan kawasan pesisir, renovasi atau penataan kawasan sarana ibadah, penataan istana kepresidenan, kebun raya, gedung pemerintah, dan lain-lain.



**Sumber**  
Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 05 Oktober 2022

## G. POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)

Nama PLBN	Kabupaten/Kota	Provinsi
PLBN Serasan	Natuna	Kepulauan Riau
PLBN Motaain	Belu	Nusa Tenggara Timur
PLBN Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
PLBN Napan	Timor Tengah	Nusa Tenggara Timur
PLBN Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
PLBN Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
PLBN Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
PLBN Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
PLBN Jagoi Babang	Bengkayang	Kalimantan Barat
PLBN Labang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Long Midang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Long Nawang	Malinau	Kalimantan Utara
PLBN Sei Pancang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Skouw	Kota Jayapura	Papua
PLBN Sota	Merauke	Papua
PLBN Yetetkun	Boven Digoel	Papua

**Sumber**  
Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 05 Oktober 2022

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah NKRI yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, kawasan perbatasan juga menjadi wajah terdepan dan representasi

bangsa sekaligus pintu gerbang keluar dan masuknya manusia dan barang. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan pengembangan infrastruktur pendukung di sekitarnya. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Fungsi yang dijalankan oleh PLBN antara lain keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang diperlukan.

# H. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)

Terbangunnya gedung-gedung dan Penataan Lingkungan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan cita-cita yang dapat diwujudkan melalui kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan.

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Sebagai wujud dari salah satu upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian PUPR memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memuat ketentuan program, rencana, ketentuan pengendalian pengembangan lingkungan antar kawasan bangunan dan lingkungan.



## Jumlah PBL berdasarkan Provinsi

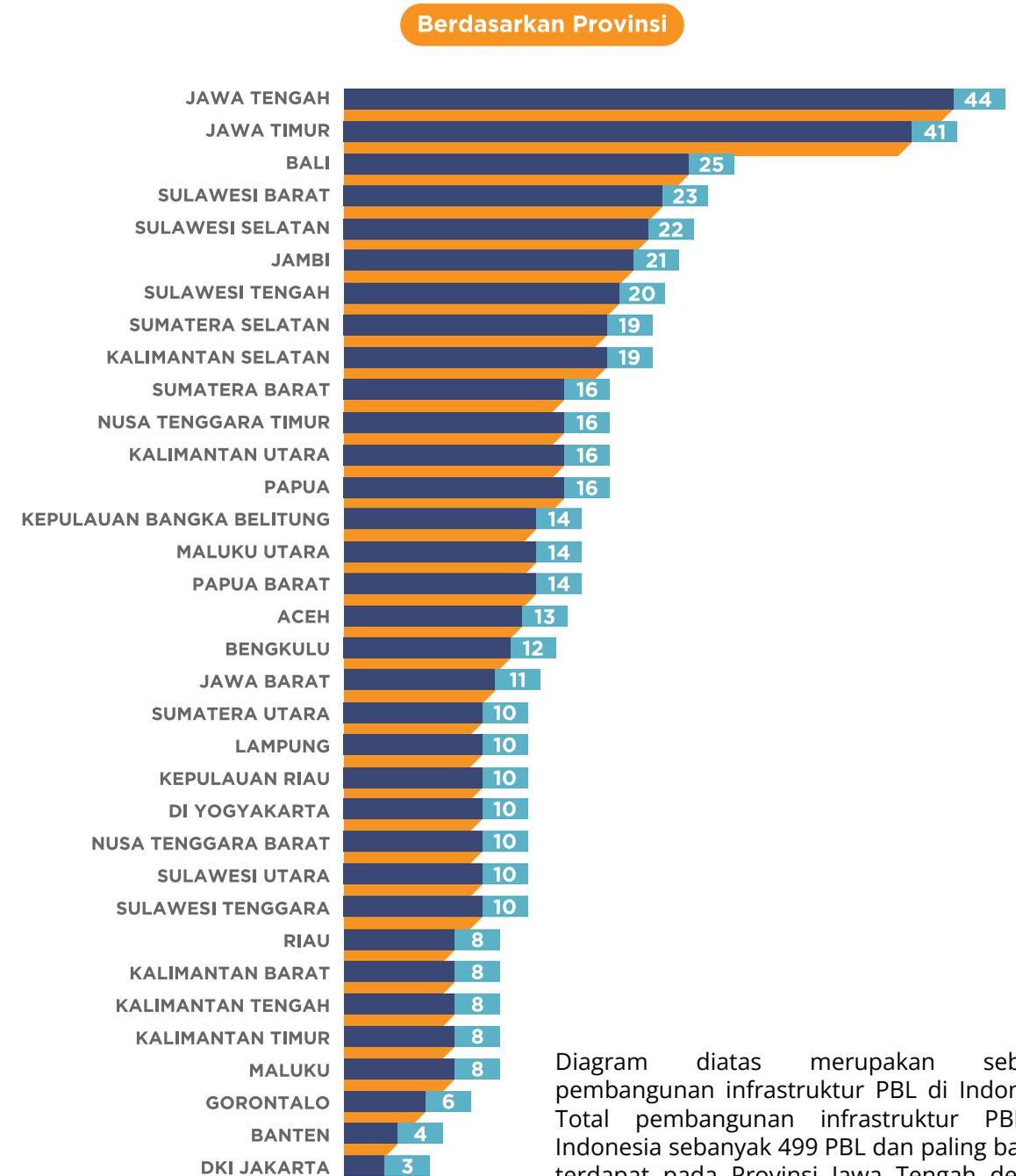


Diagram diatas merupakan sebaran pembangunan infrastruktur PBL di Indonesia. Total pembangunan infrastruktur PBL di Indonesia sebanyak 499 PBL dan paling banyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan yaitu 44 PBL.

**Sumber**  
Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 05 Oktober 2022

# I. FASILITAS PENDIDIKAN

Sejak tahun 2019 Kementerian PUPR mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan yang terdiri dari sekolah, madrasah, Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam peningkatan kualitas pendidikan Nasional.

Pekerjaan rehabilitasi dan rehabilitas fasilitas pendidikan dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



Sekolah

3.735



Madrasah

581



PTN

278



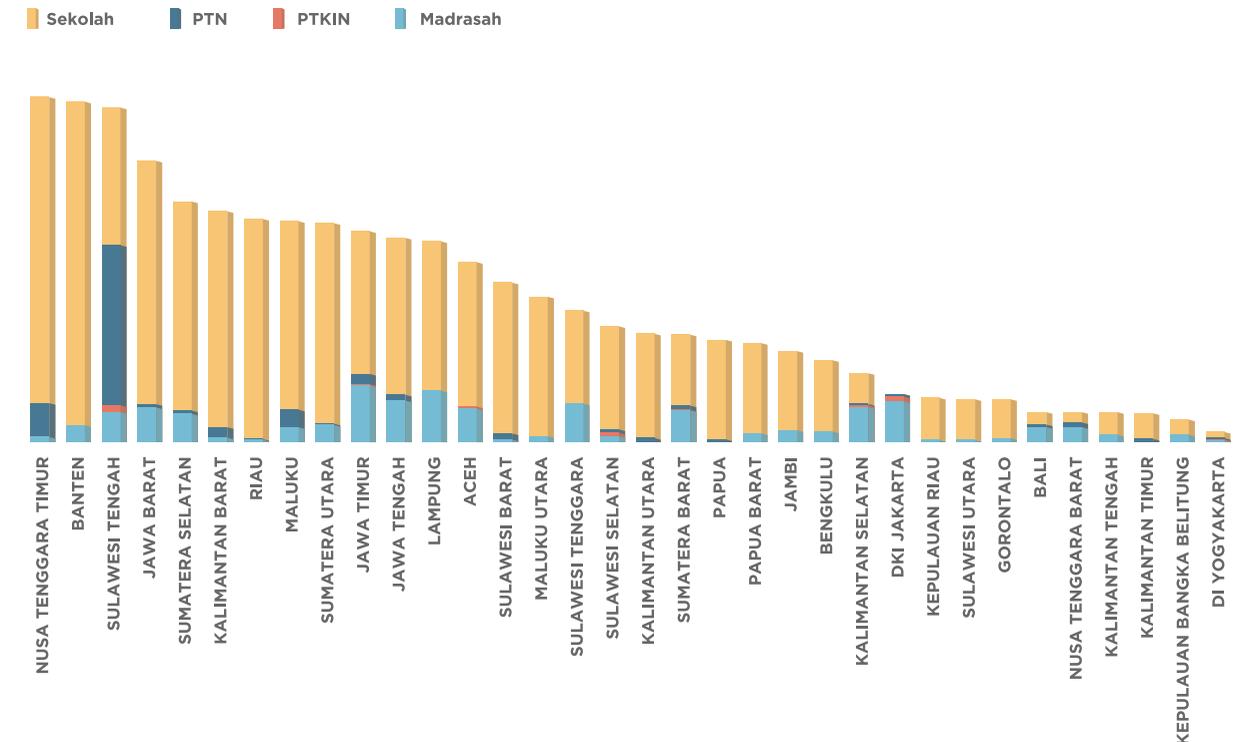
PTKIN

25

Sampai dengan tahun 2022, rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR mencapai 4.619 fasilitas pendidikan. Dengan rincian 3.735 sekolah, 581 madrasah, 278 PTN, dan 25 PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).

## Jumlah Sarana Pendidikan

Berdasarkan Provinsi



**Sumber**  
Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 05 Oktober 2022

Berdasarkan diagram diatas, rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan paling banyak terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total 332 fasilitas pendidikan yang terdiri dari 294 sekolah, 32 PTN, dan 6 Madrasah. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mendorong pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

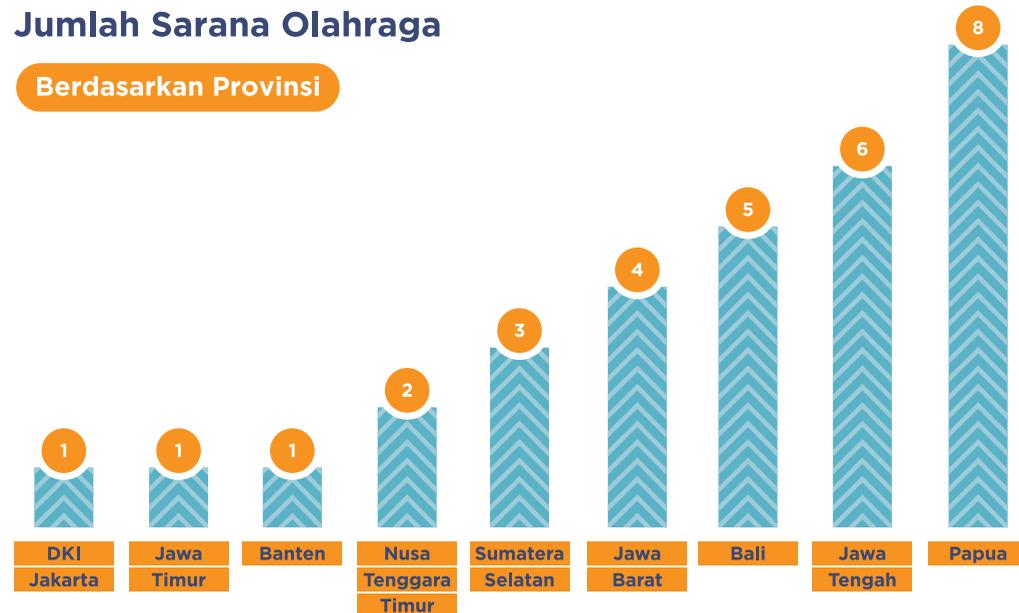
# J. SARANA OLAHRAGA

Selain melakukan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan, Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas untuk melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019.

Dukungan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta memberikan ruang pembinaan bagi atlet dan pengembangan prestasi olahraga.

## Jumlah Sarana Olahraga

Berdasarkan Provinsi



**Sumber**  
Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 05 Oktober 2022

Berdasarkan diagram diatas, total sarana olahraga yang telah dibangun atau direnovasi atau direhabilitasi oleh Kementerian PUPR sebanyak 31 sarana olahraga, dengan sarana olahraga terbanyak pada Provinsi Papua sebanyak 8 sarana olahraga. Sarana olahraga yang dibangun di Provinsi Papua ini digunakan untuk mendukung kegiatan PON Papua 2020.

# K. PASAR RAKYAT

Dalam rangka dukungan untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi pasar rakyat. Pembangunan infrastruktur pasar

dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata.

## Jumlah Infrastruktur Pasar

Berdasarkan Provinsi



**Sumber**  
Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 05 Oktober 2022

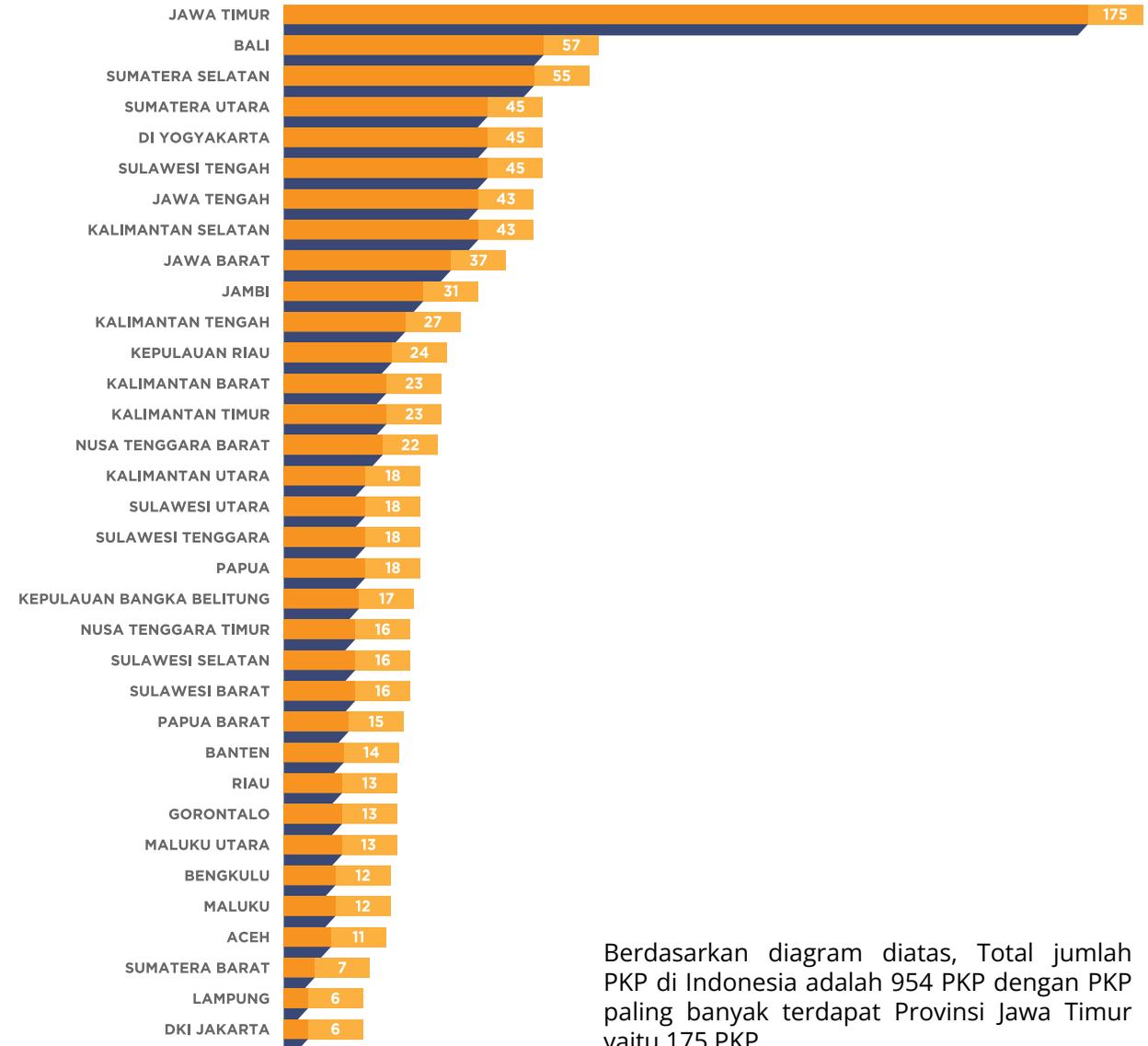
Berdasarkan diagram diatas, total pembangunan pasar yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah 27 pasar, dengan jumlah infrastruktur pasar terbanyak pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 11 pasar.

# L. PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)

Bertambahnya jumlah penduduk dan gaya hidup masyarakat di Indonesia menyebabkan peningkatan arus urbanisasi. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Kebutuhan tempat tinggal yang layak huni berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pengembangan kawasan permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan permukiman.

**Jumlah PKP**  
Berdasarkan Provinsi



Berdasarkan diagram diatas, Total jumlah PKP di Indonesia adalah 954 PKP dengan PKP paling banyak terdapat Provinsi Jawa Timur yaitu 175 PKP.

**Sumber**  
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman,  
Direktorat Jenderal Cipta Karya,  
05 Oktober 2022



Rumah Susun  
Rumah Khusus  
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  
Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)



# 04

DIREKTORAT JENDERAL

**PERUMAHAN**  
KEMENTERIAN PUPR



# PERUMAHAN

Rumah merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam UU tersebut dijelaskan pula penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan meluncurkan beberapa program pembangunan rumah dan juga bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan. Program-program tersebut antara lain pembangunan rumah susun, rumah khusus, pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

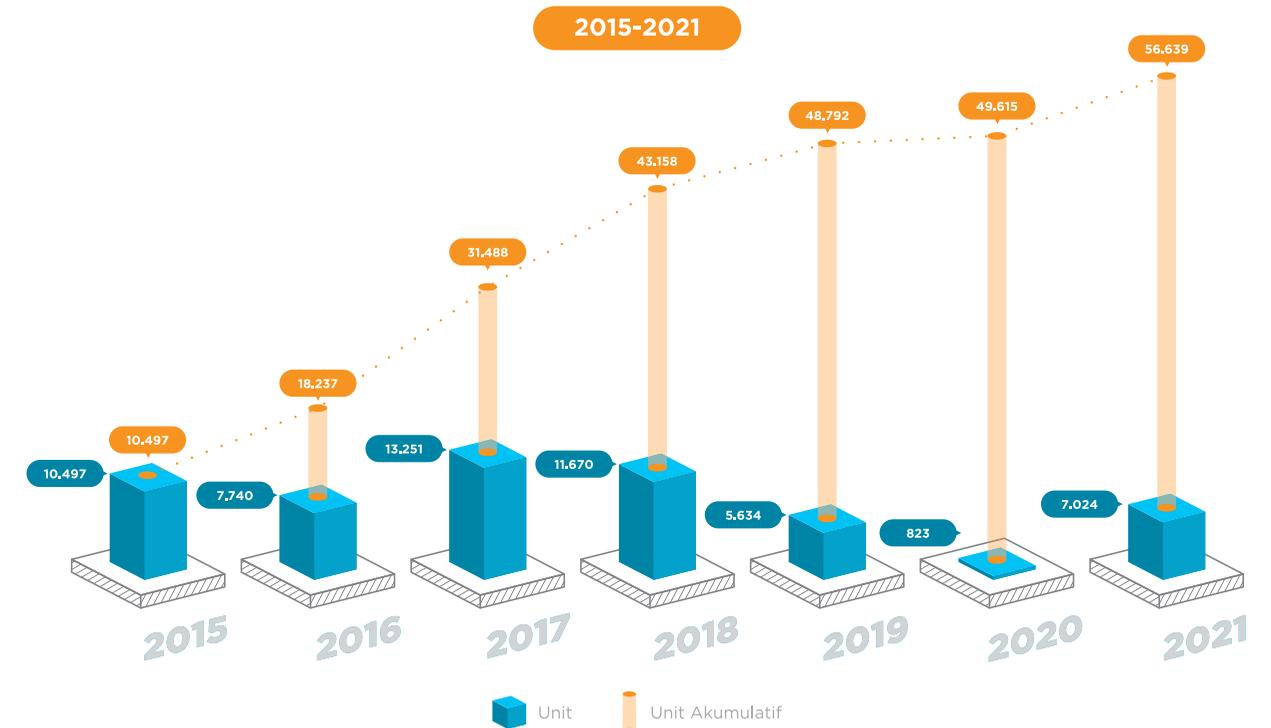


# 01. RUMAH SUSUN

Undang Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menjelaskan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian, benda, dan tanah bersama. Pembangunan rumah susun bisa menjadi alternatif untuk menjawab

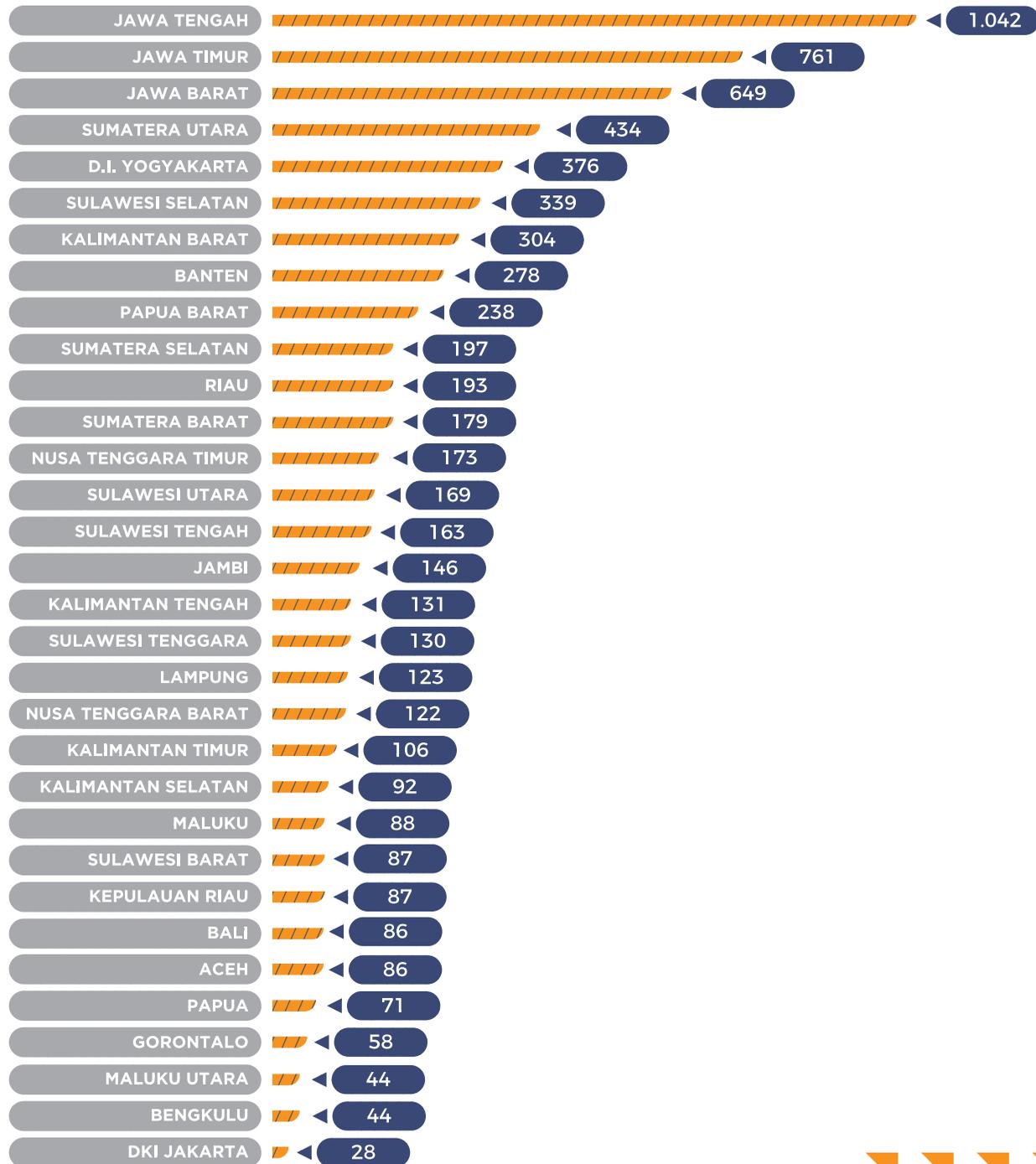
kebutuhan perumahan dan permukiman di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan ketersediaan lahan yang terbatas. Melalui desain *vertical housing*, pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan lahan dan mengoptimalkan ruang terbuka untuk kepentingan bersama. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, Kementerian PUPR telah membangun 56.639 unit rumah susun. Berikut ini adalah jumlah unit rumah susun yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR tahun 2015-2021.

Jumlah Rumah Susun



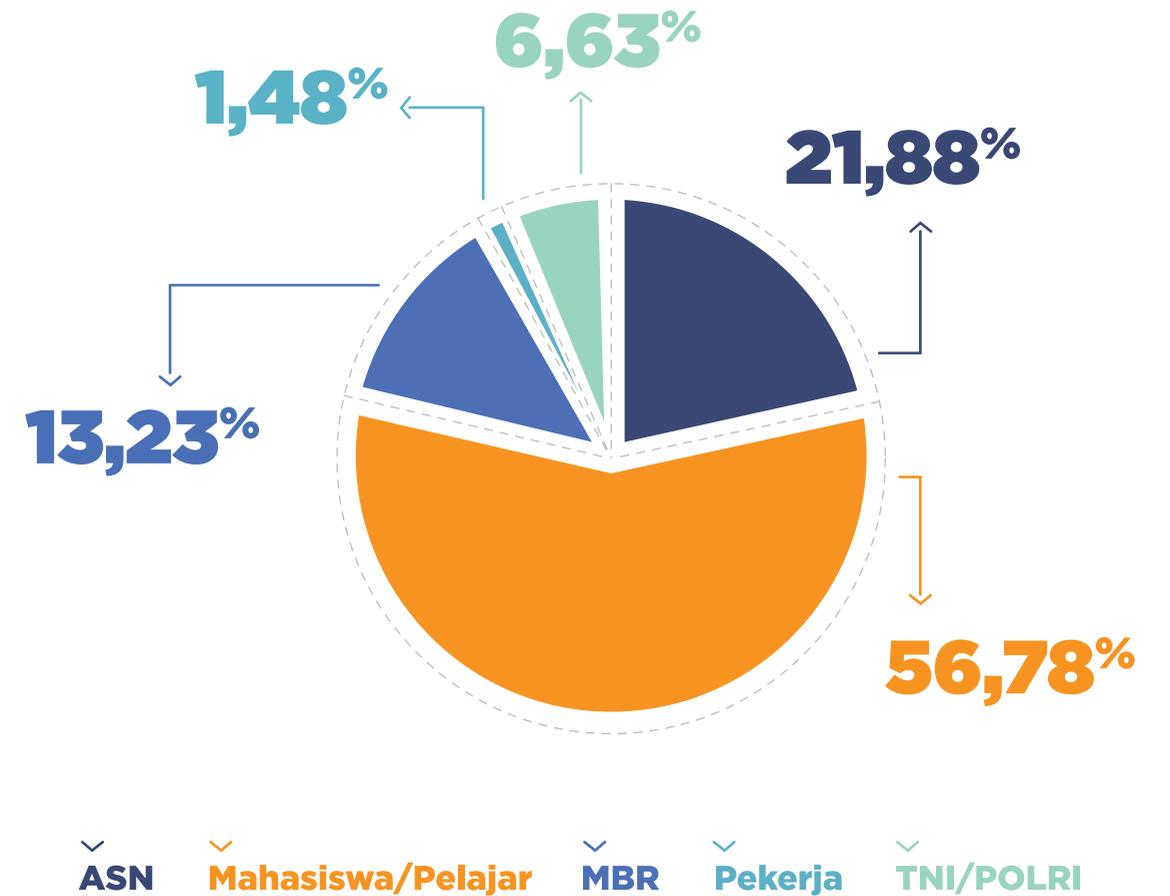
### Sebaran Rumah Susun

Tahun 2021



### Penerima Rumah Susun

Tahun 2021



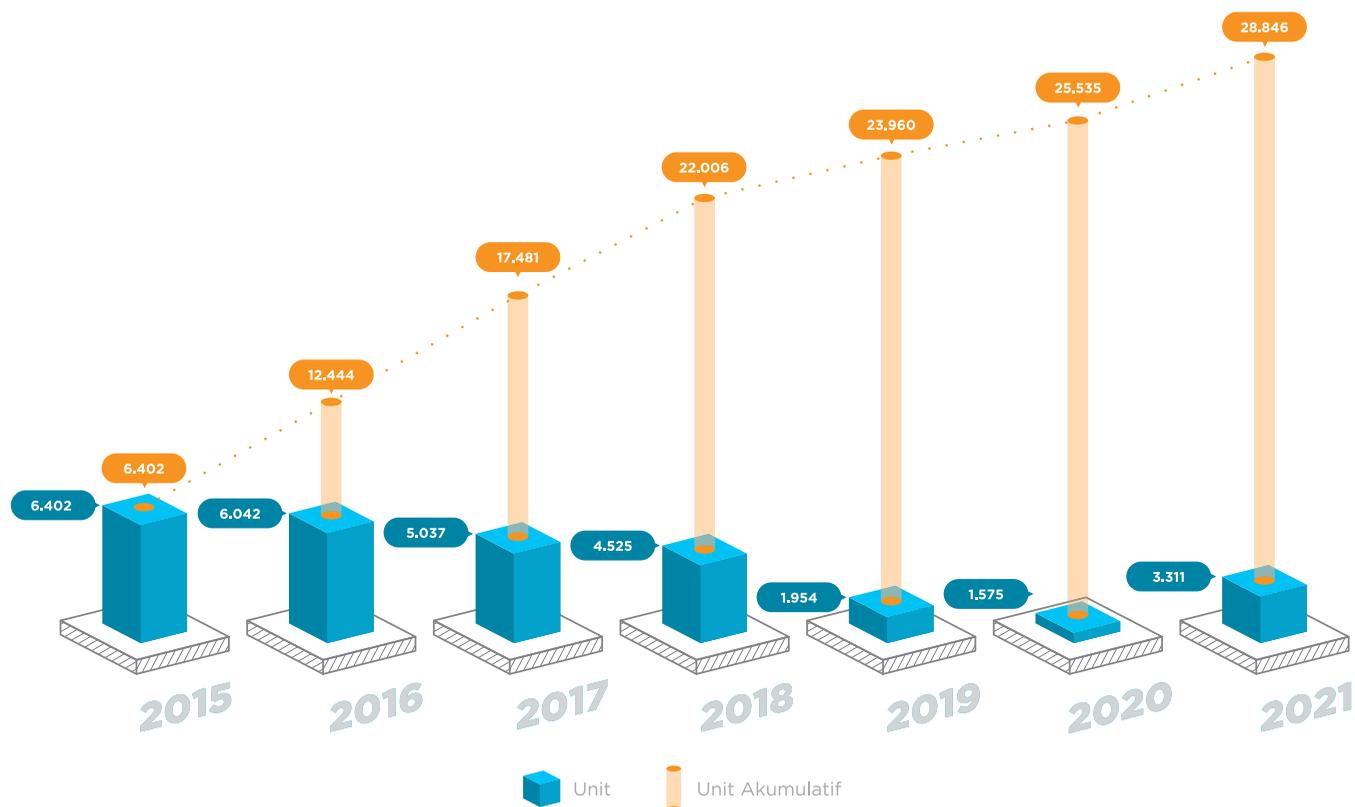
## 02. RUMAH KHUSUS

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa, rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah peruntukan pembangunan tersebut, seperti rumah untuk korban bencana,

masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, tokoh, TNI/Polri, dan lainnya. Berikut adalah jumlah unit rumah khusus yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR beserta komposisi penerima manfaat rumah khusus tahun 2015-2021.

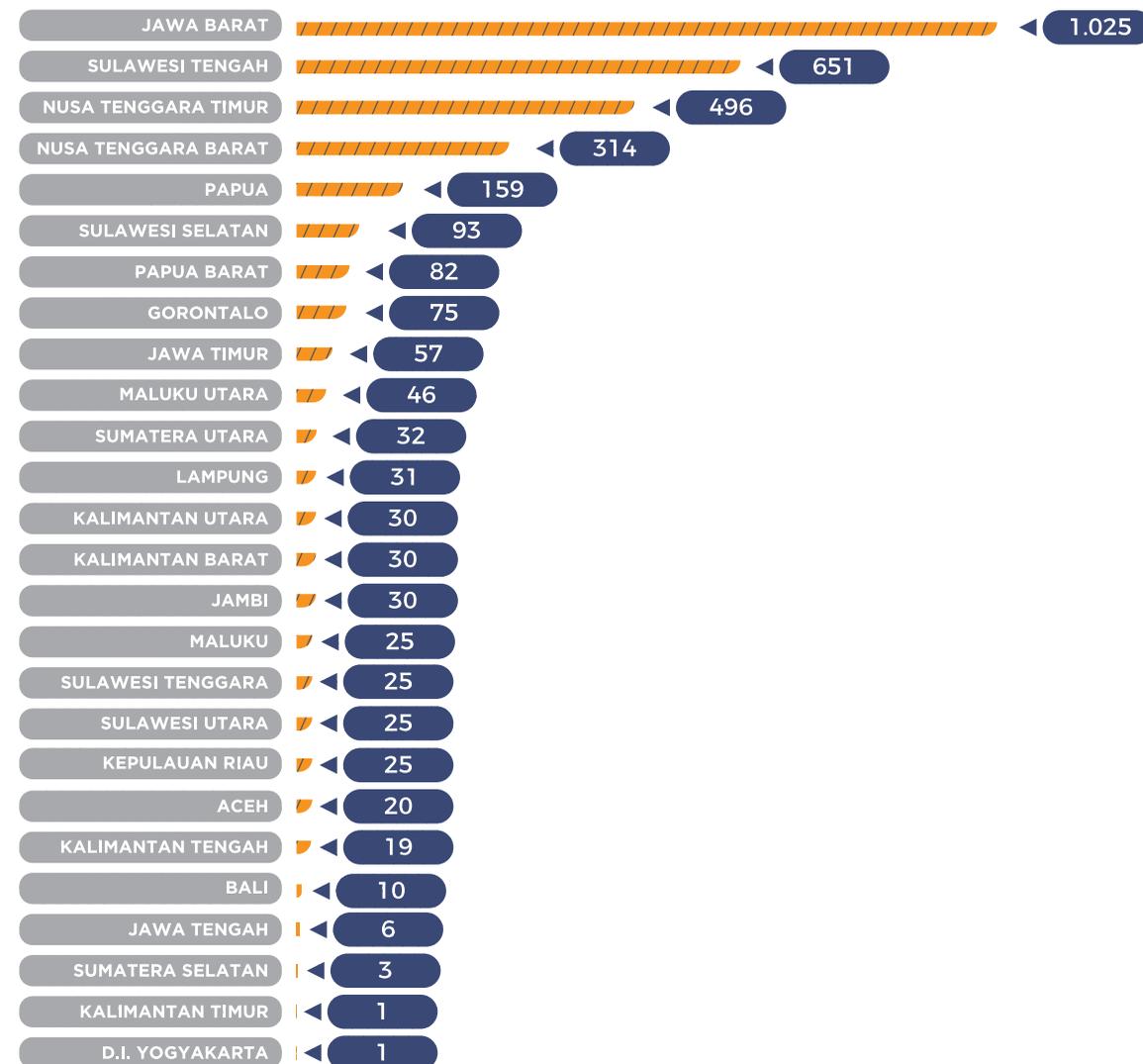
Grafik Jumlah Data Rumah Khusus

2015-2021



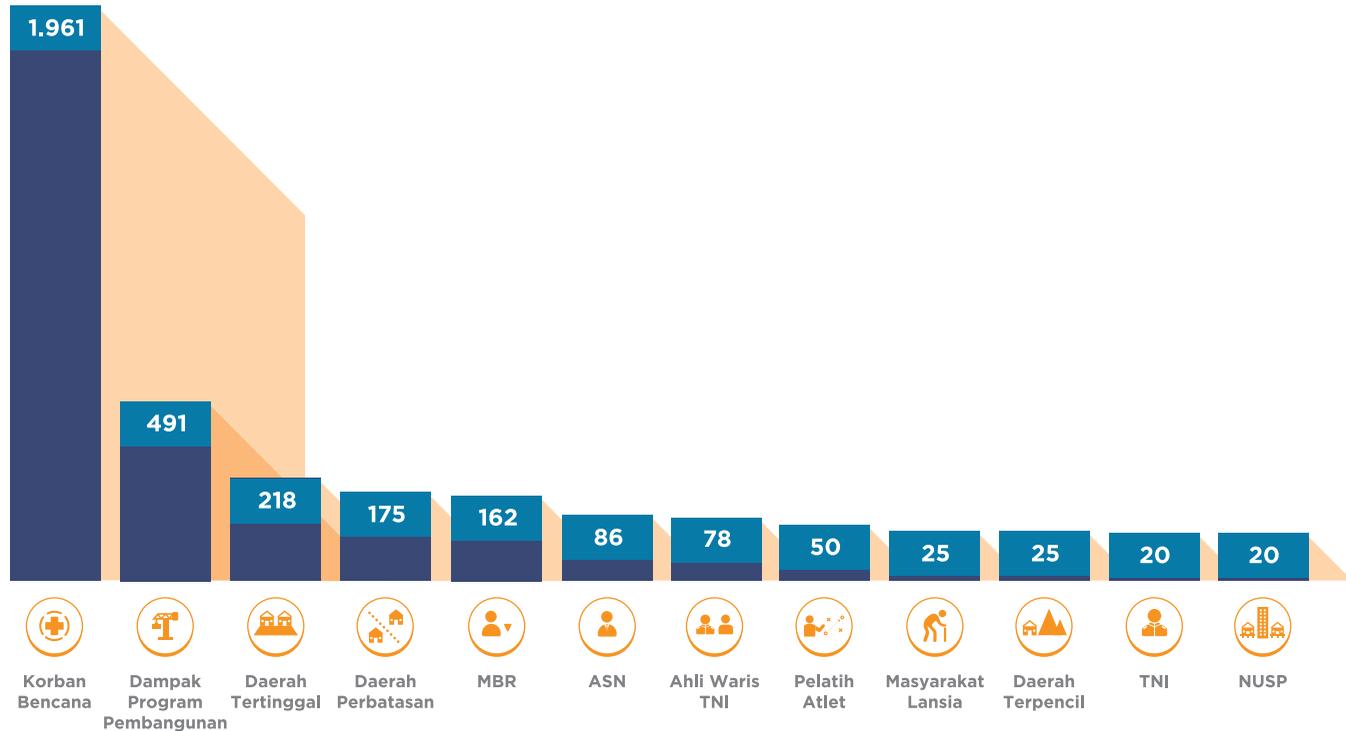
### Sebaran Rumah Khusus

Tahun 2021



## Penerima Rumah Khusus

Tahun 2021



Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.



### 03. BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Undang Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Namun kegiatan pembangunan rumah secara swadaya seringkali belum memenuhi kualitas rumah layak huni dari segi sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai. BSPS hadir sebagai program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. BSPS merupakan bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

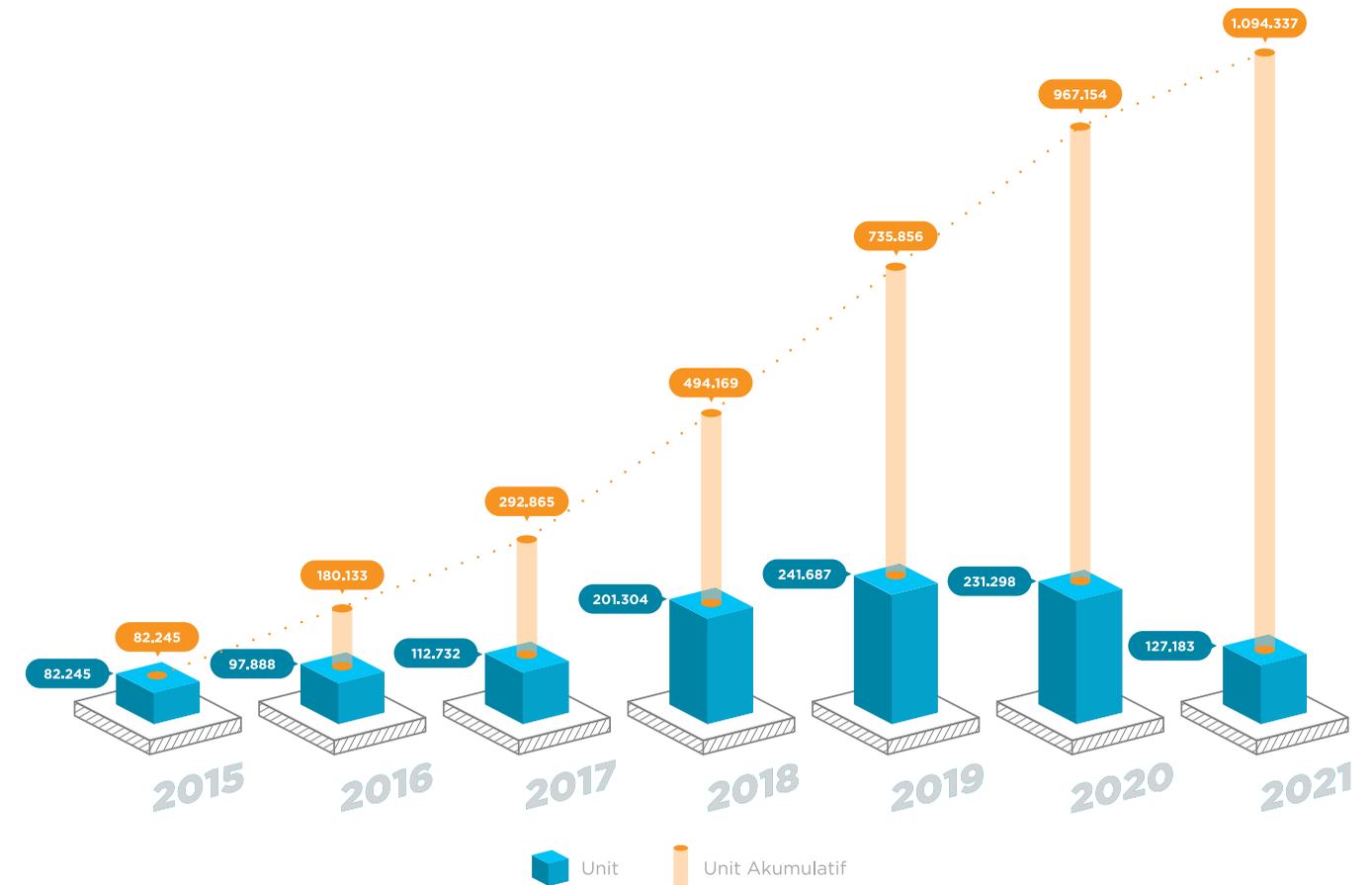
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2018, masyarakat yang menjadi sasaran penerima BSPS adalah MBR yang memenuhi persyaratan, diantaranya adalah menguasai tanah dengan alas hak yang sah, tidak dalam sengketa, sesuai tata ruang wilayah, menempati

satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi, bersedia berswadaya, dll. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. BSPS dapat dilakukan untuk rumah terdampak bencana, terdampak program pemerintah, dan/ atau rumah tradisional dengan ukuran lantai paling luas 45 m persegi.



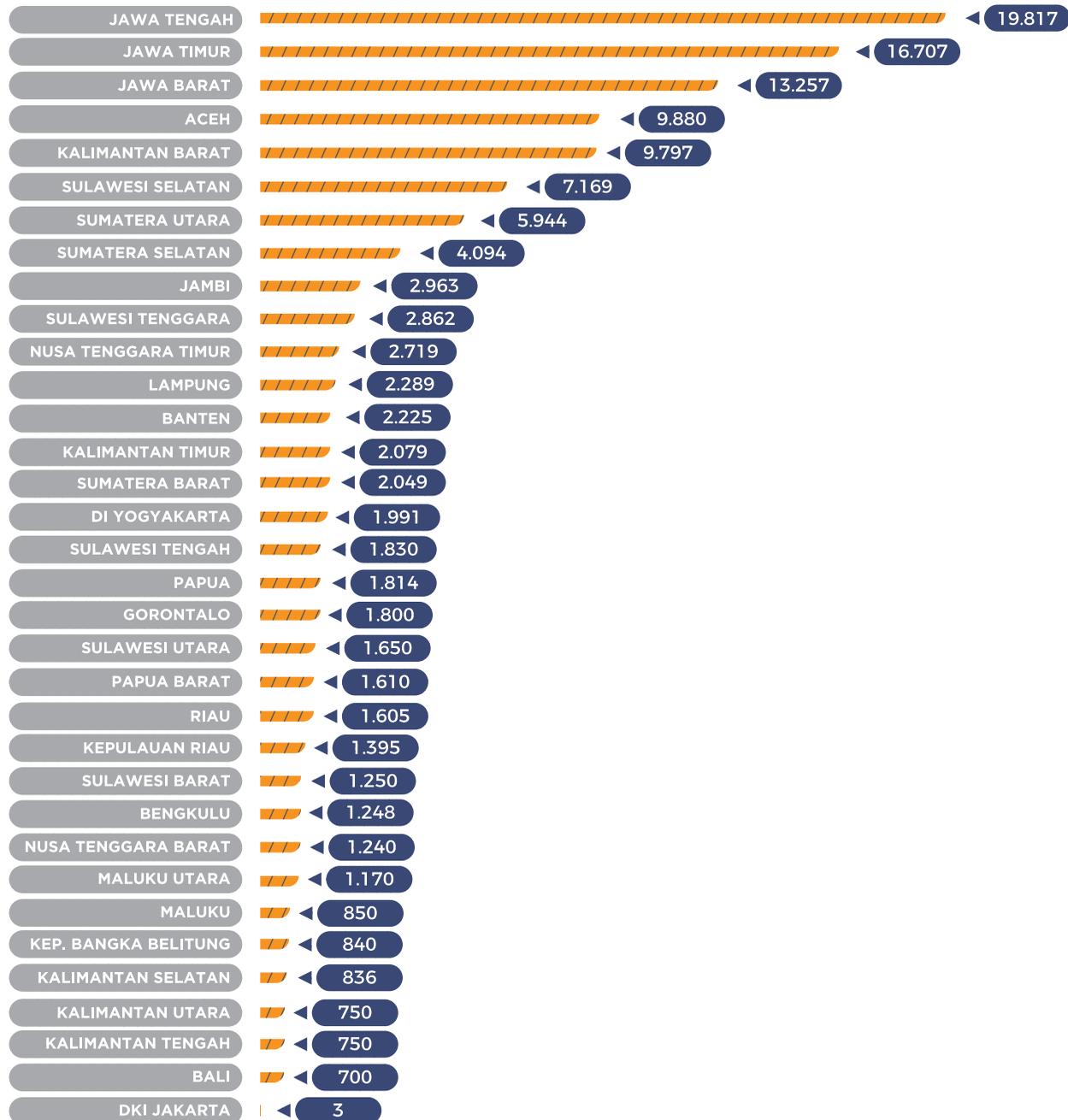
#### Realisasi BSPS

2015-2021



### Sebaran BSPTS

Tahun 2021



## 04. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)

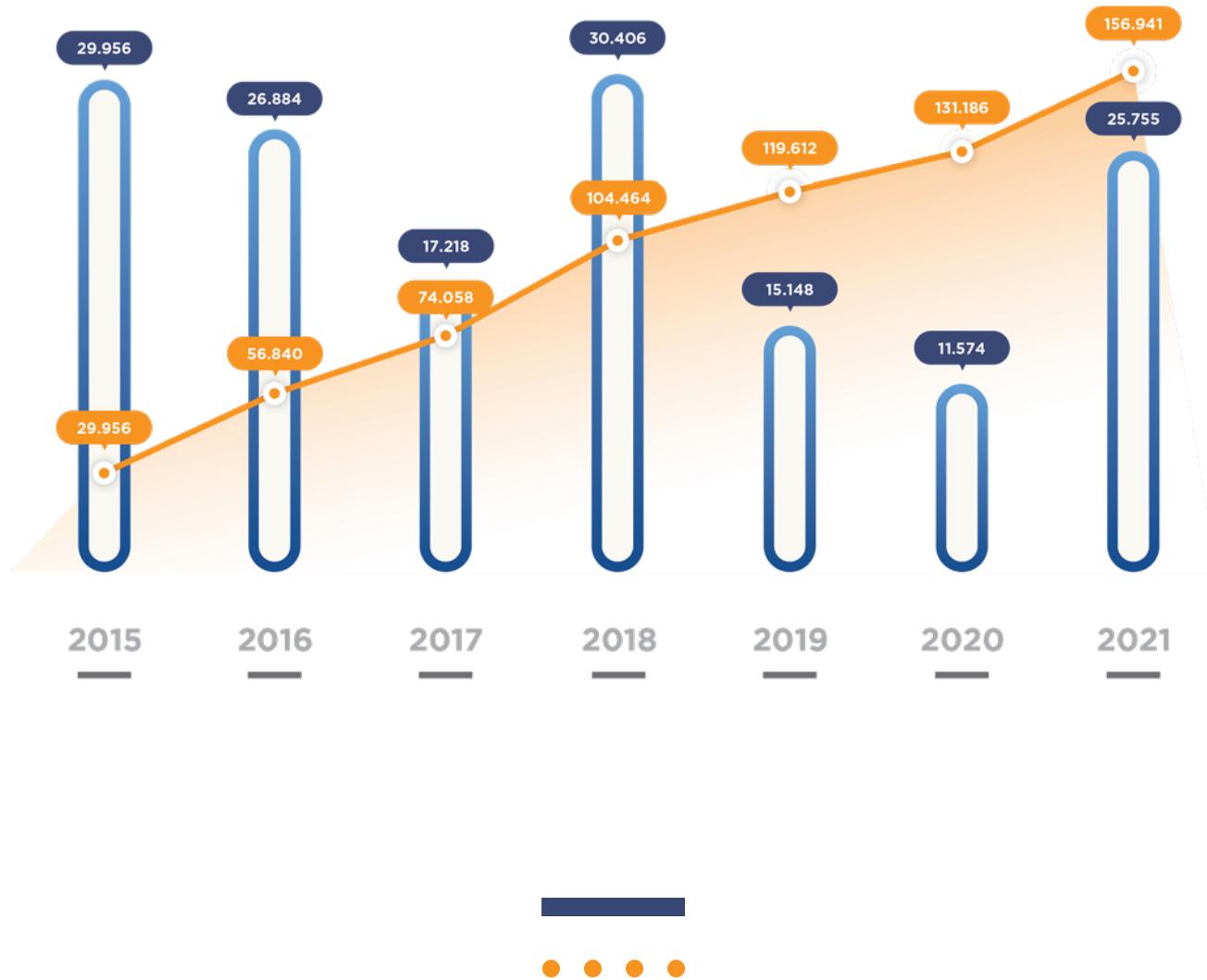
Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian untuk memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sarana adalah fasilitas yang berfungsi

untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 38/PRT/M.2015 bantuan PSU bisa meliputi jalan, ruang terbuka non-hijau, sanitasi, air minum, rumah ibadah, jaringan listrik, dan penerangan jalan umum. Berikut ini adalah jumlah unit rumah yang mendapat bantuan PSU tahun 2015-2021.



### Grafik Jumlah PSU

2015-2021





Badan Usaha Jasa Konstruksi  
Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi  
Tenaga Kerja Konstruksi



DIREKTORAT JENDERAL

# BINA KONSTRUKSI

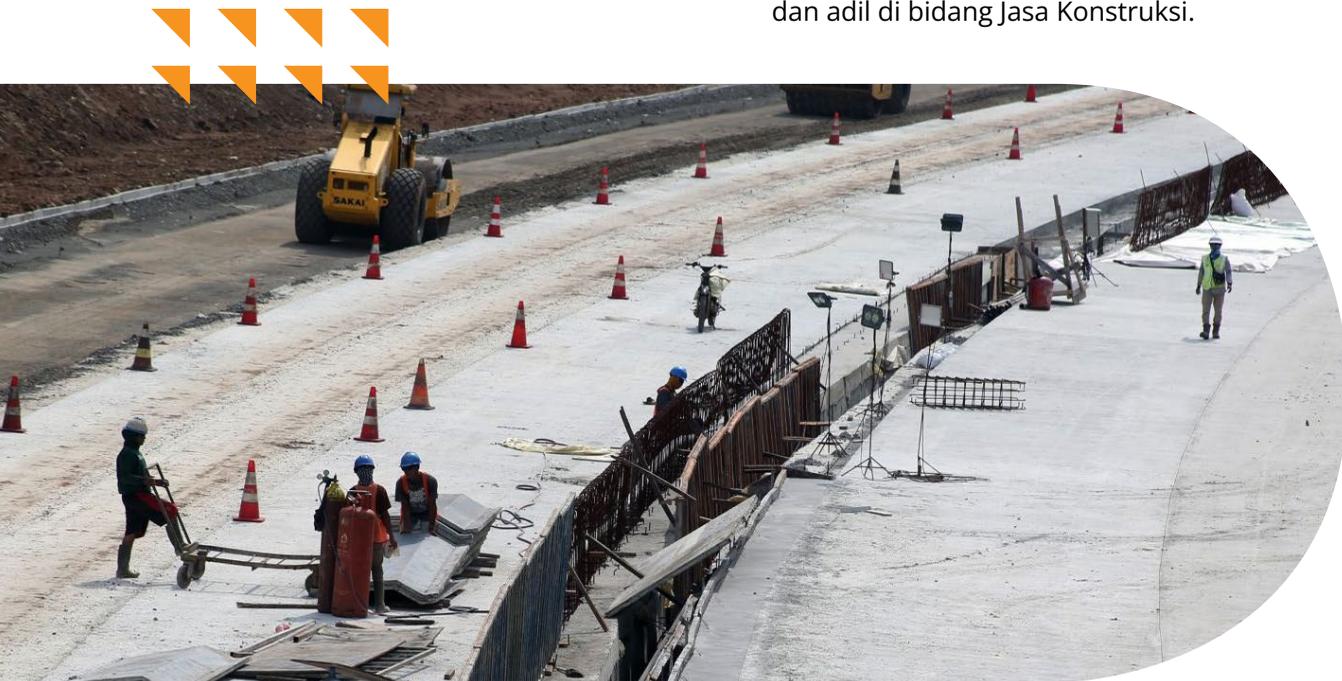
KEMENTERIAN PUPR



# BINA KONSTRUKSI

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari kegiatan konstruksi. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2021, konstruksi merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Hasil kegiatan konstruksi antara lain, gedung, jalan, jembatan, bangunan air, drainase dan sanitasi, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, dibutuhkan iklim industri konstruksi yang efektif dan efisien. Industri jasa konstruksi harus diselenggarakan secara tertib, didukung dengan kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha, kemitraan yang kuat antara Pemerintah dan mitra terkait, modernisasi pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan sumber daya perlu dilakukan secara berkesinambungan. Dalam pengembangan industri konstruksi, dibutuhkan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan. Kementerian PUPR terus berupaya untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan tumbuh positif melalui pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah dengan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang Jasa Konstruksi.



## 01. BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

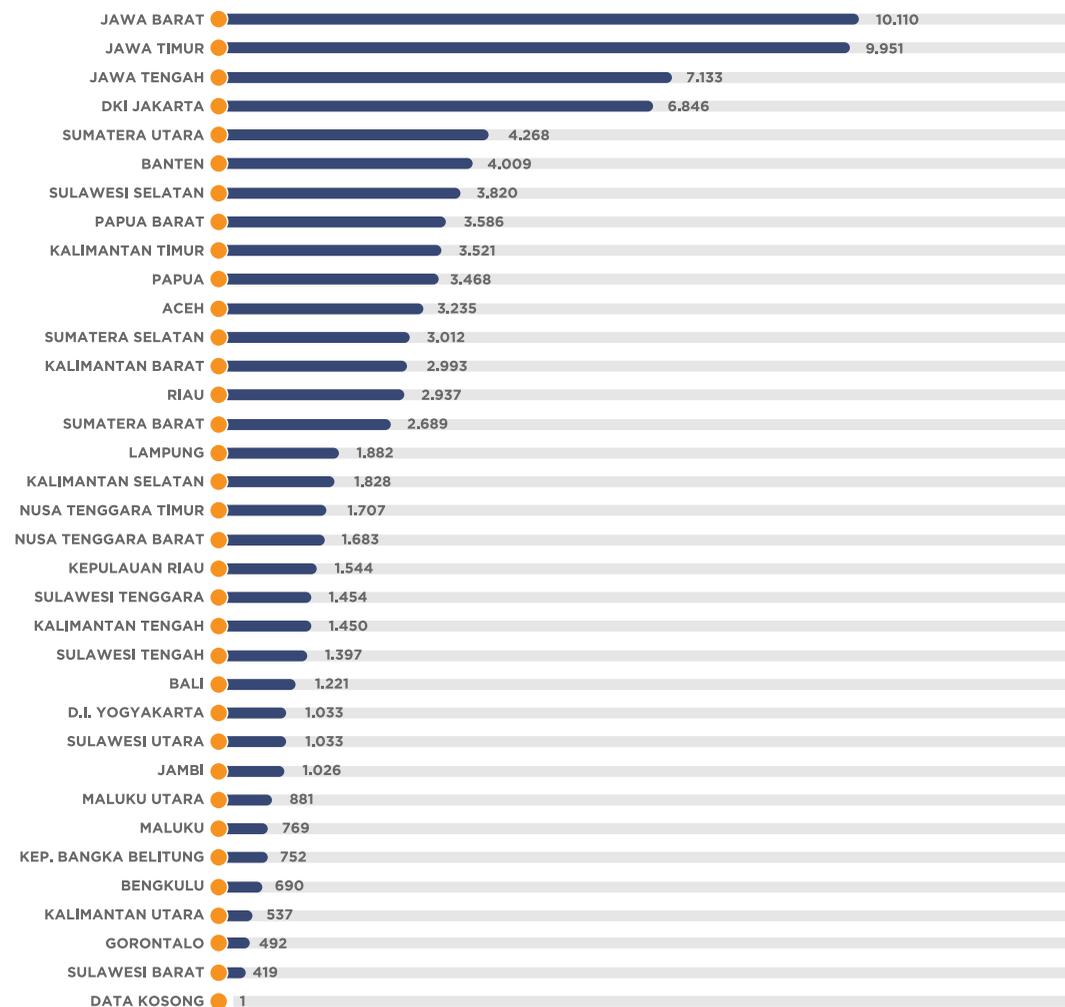
Seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin pesat, banyak perusahaan penyedia jasa konstruksi bermunculan, baik perseorangan atau badan usaha. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, struktur usaha jasa konstruksi meliputi: jenis,

sifat, klasifikasi dan layanan usaha, serta bentuk dan kualifikasi usaha. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Setiap jenis usaha memiliki sifat, klasifikasi, dan layanan usaha.



## Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Provinsi



Dari grafik sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di atas, pada tahun 2022, tercatat ada 93.342 BUJK dengan jumlah BUJK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 10.110 badan usaha.

**Sumber**  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

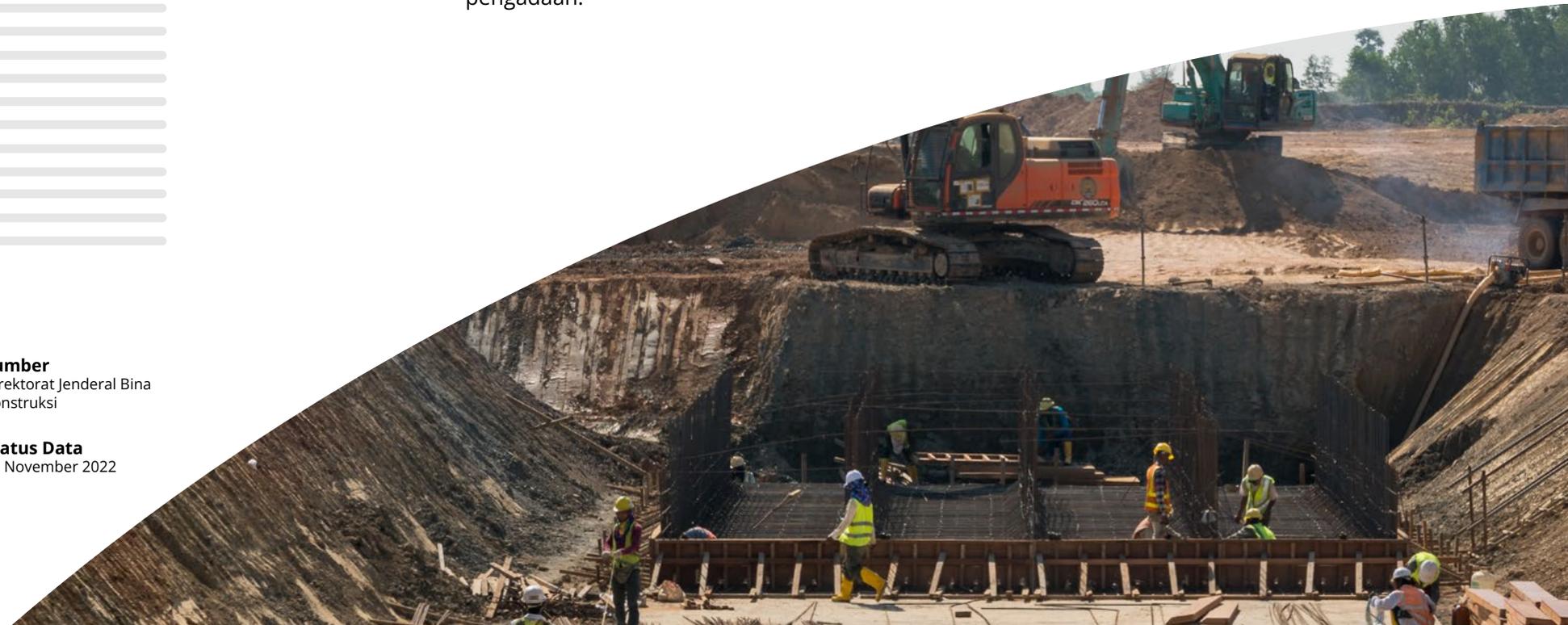
**Status Data**  
11 November 2022

## 02. SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Salah satu persyaratan BUJK untuk dapat menjalankan usahanya, adalah memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU). SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJK asing. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait. Sementara kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha. Kualifikasi juga menunjukkan pangsa (segmentasi) pasar Jasa Konstruksi yang dapat diikuti oleh badan usaha dalam suatu proses pengadaan.

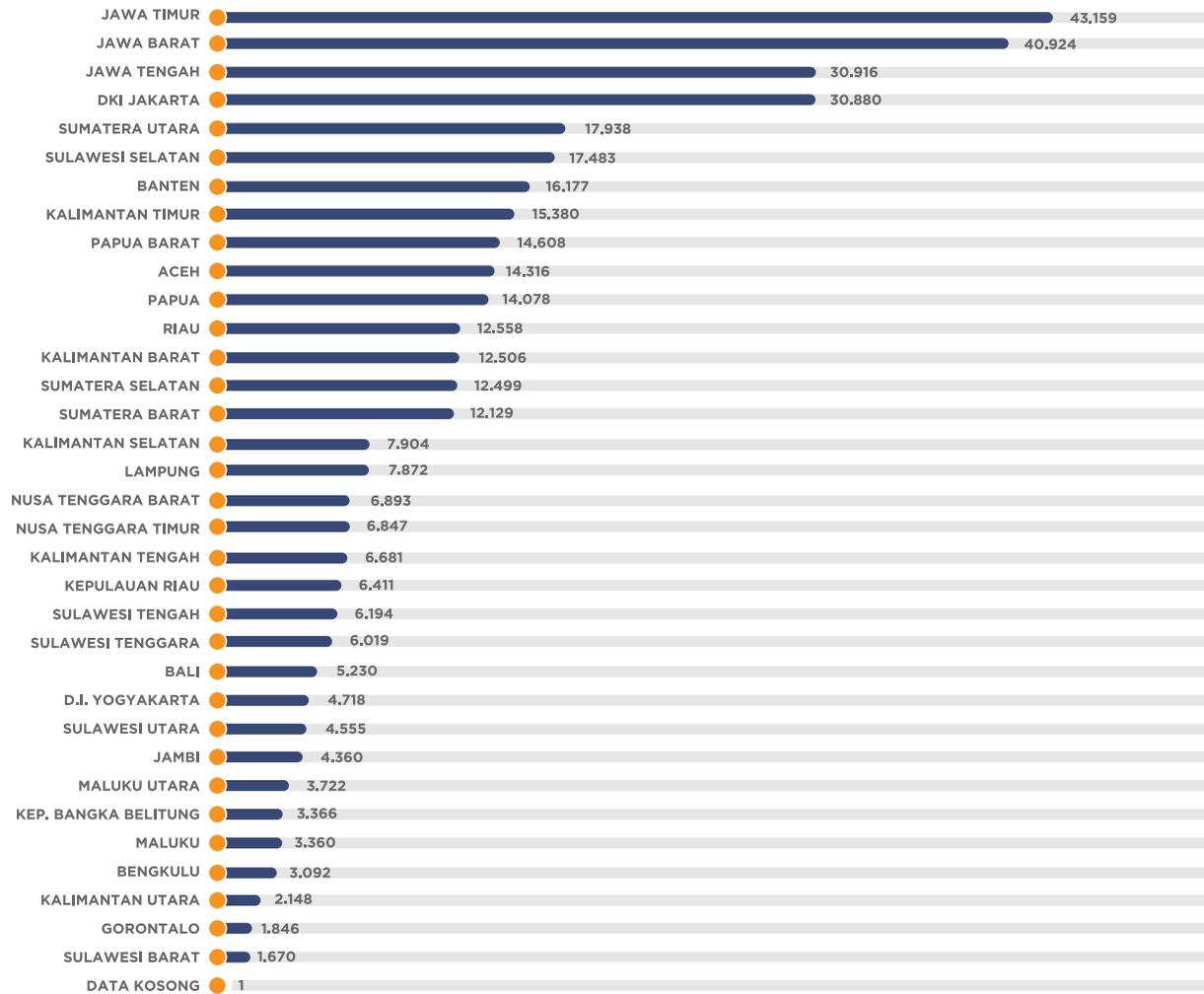
Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, mekanisme perizinan saat ini menjadi lebih sederhana dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Pusat melalui Lembaga One Single Submission (OSS). Dengan adanya sistem perizinan yang terintegrasi, pelaku usaha dapat lebih mudah mengajukan perizinan berusaha.

Tercatat pada tahun 2022 terdapat 398.440 SBUJK di Indonesia. Provinsi yang memiliki SBUJK paling banyak adalah Jawa Timur dengan jumlah 43.159 sertifikat.



## Sebaran Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Provinsi



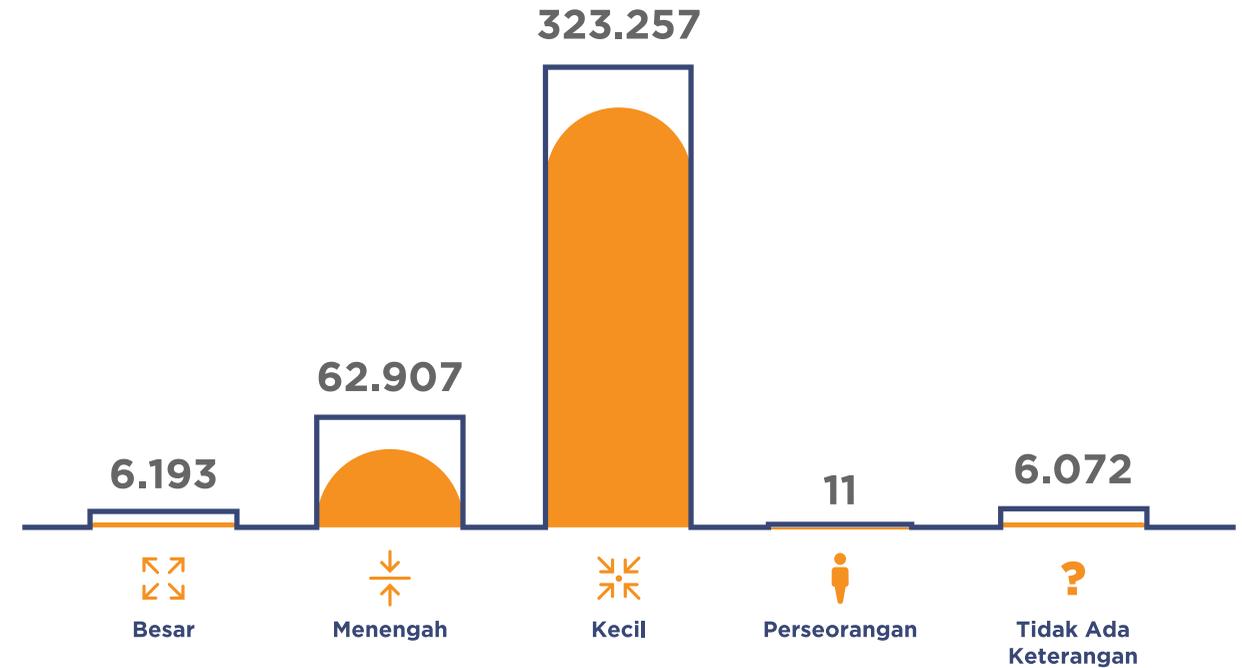
Kualifikasi SBU adalah pengelompokan jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan jumlah tenaga kerja, pengalaman, modal usaha, dan nilai proyek yang diperbolehkan untuk dikerjakan. Berdasarkan diagram di atas, kualifikasi SBU terbanyak ada pada kualifikasi kecil sebanyak 323.257 sertifikat.

**Sumber**  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

**Status Data**  
11 November 2022

## Sebaran Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Kualifikasi



**Sumber**  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

**Status Data**  
11 November 2022



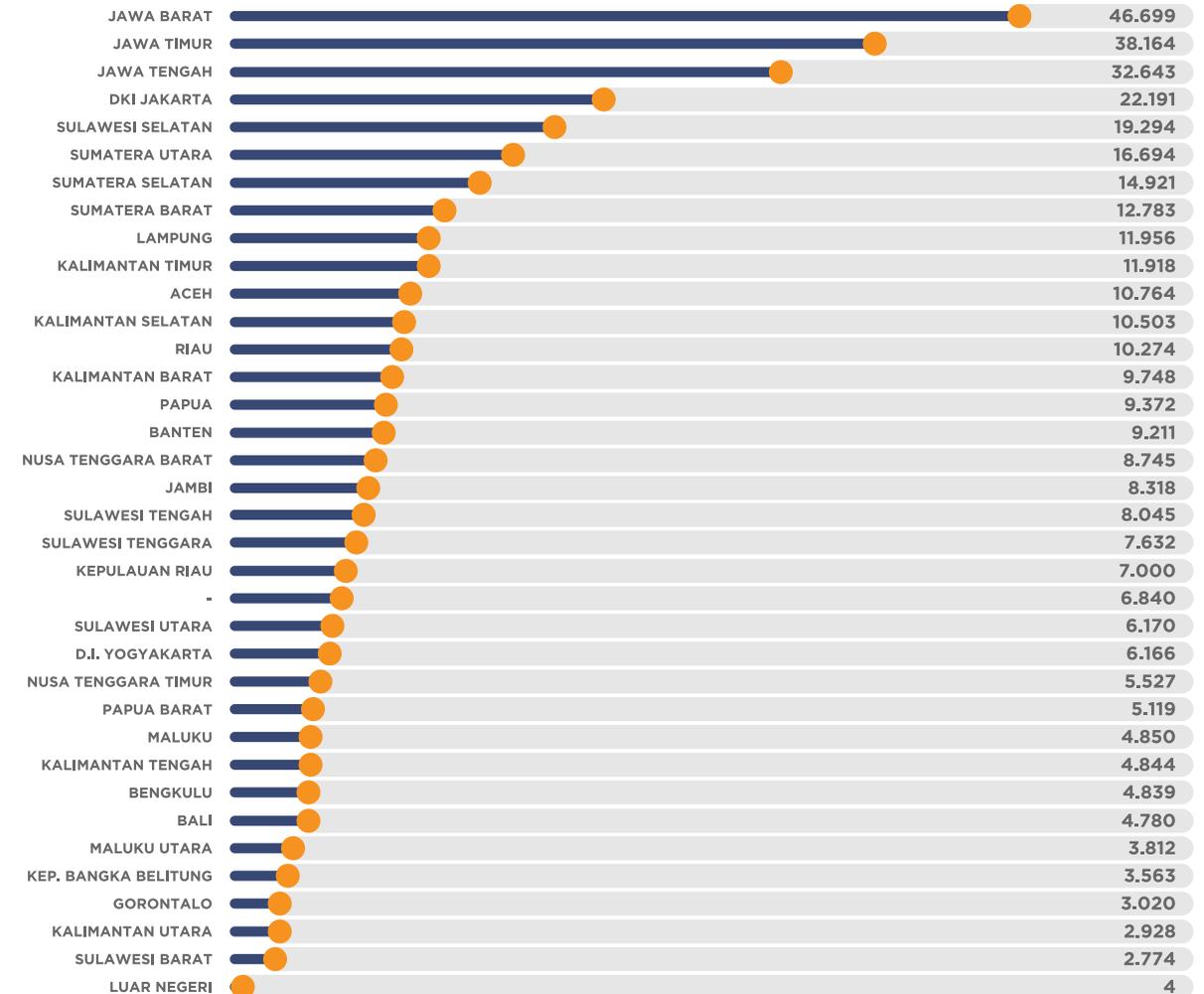
### 03. TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi terbagi menjadi tiga yaitu operator, teknisi/analisis, dan ahli.



### Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi

Berdasarkan Provinsi



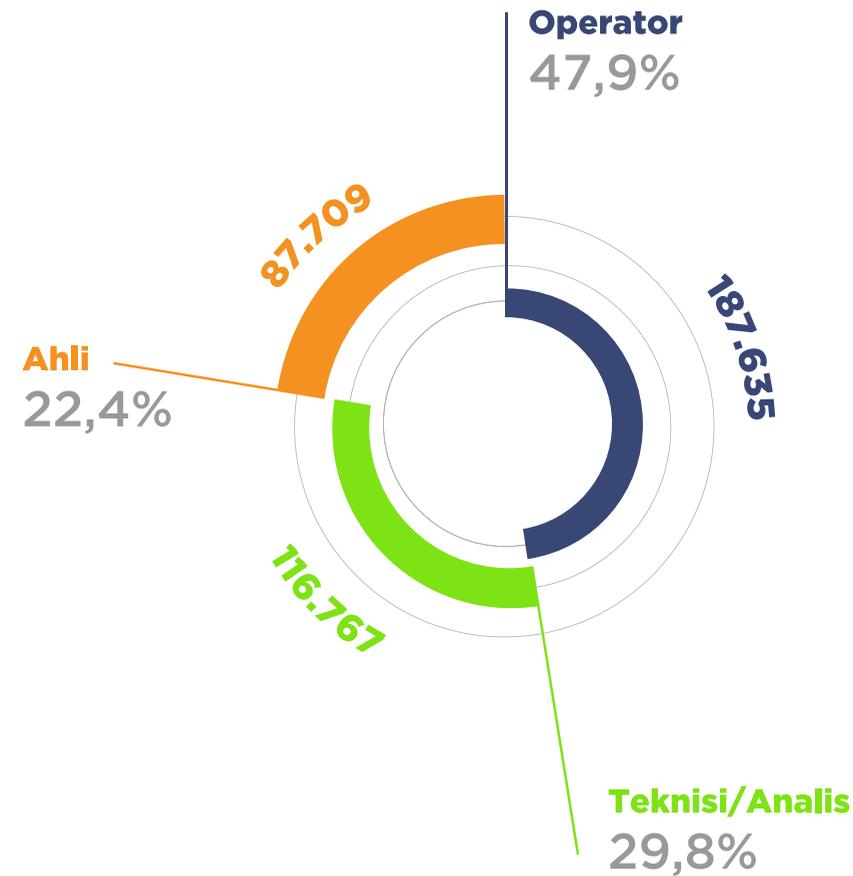
Berdasarkan data Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebaran Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Indonesia tercatat ada 349.866 tenaga kerja dengan jumlah TKK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 46.699 tenaga kerja.

 **Sumber**  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

**Status Data**  
11 November 2022

## Tenaga Kerja Konstruksi

Berdasarkan Kualifikasi



Berdasarkan grafik di atas, terdapat 349.866 orang TKK yang tersertifikasi. Persentase TKK dengan kualifikasi Operator merupakan kualifikasi terbanyak yaitu sebesar 47,9% atau 187.635 orang, persentase TKK dengan kualifikasi Teknisi/Analis sebesar 29,8% atau 116.767 orang, dan persentase kualifikasi Ahli sebesar 22,4% atau 87.709 orang.

**Sumber**  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

**Status Data**  
11 November 2022

## Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

Berdasarkan Jenjang

Jenjang I Jenjang II Jenjang III



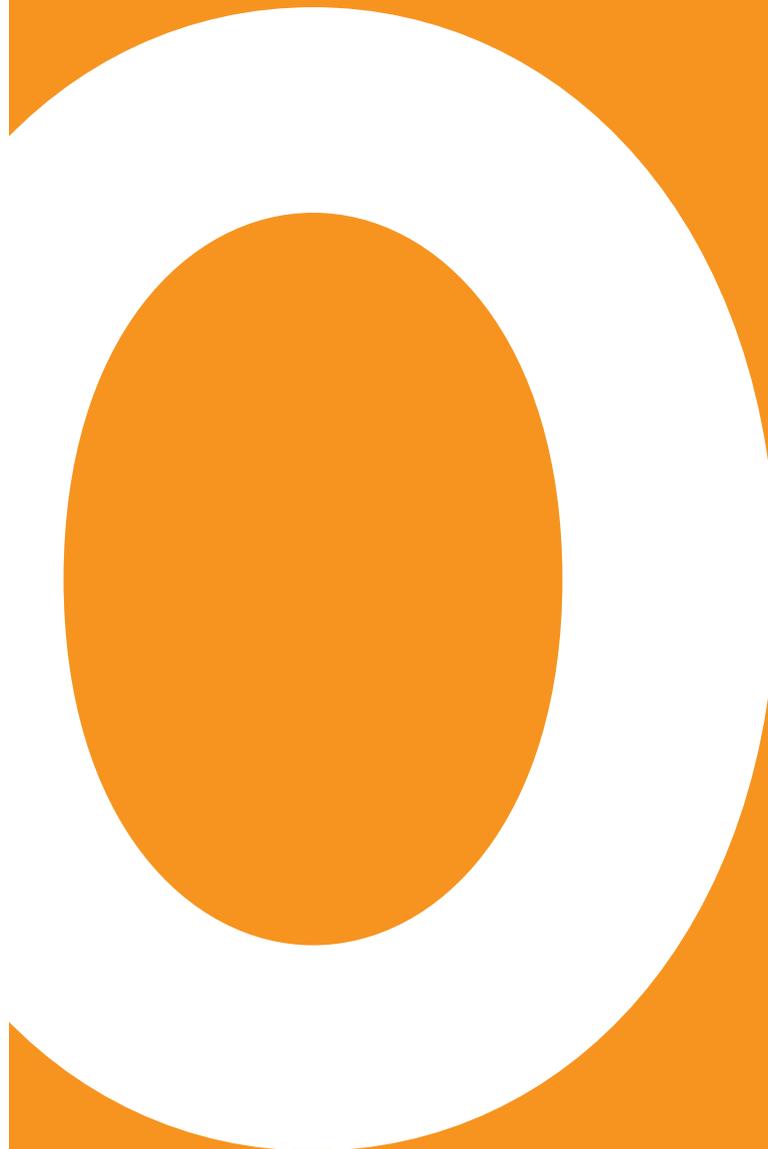
Berdasarkan informasi dari sumber data, kualifikasi TKK dibagi menjadi tiga yaitu operator, teknisi/ analis, dan ahli. Pada masing-masing kualifikasi memiliki tiga jenjang yaitu jenjang I, jenjang II, dan jenjang III. TKK terbanyak ada pada kualifikasi operator pada jenjang I yaitu sebanyak 81.565 orang.

**Sumber**  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

**Status Data**  
11 November 2022



Pengarusutamaan Gender



**SUMBER  
DAYA  
MANUSIA**  
KEMENTERIAN PUPR



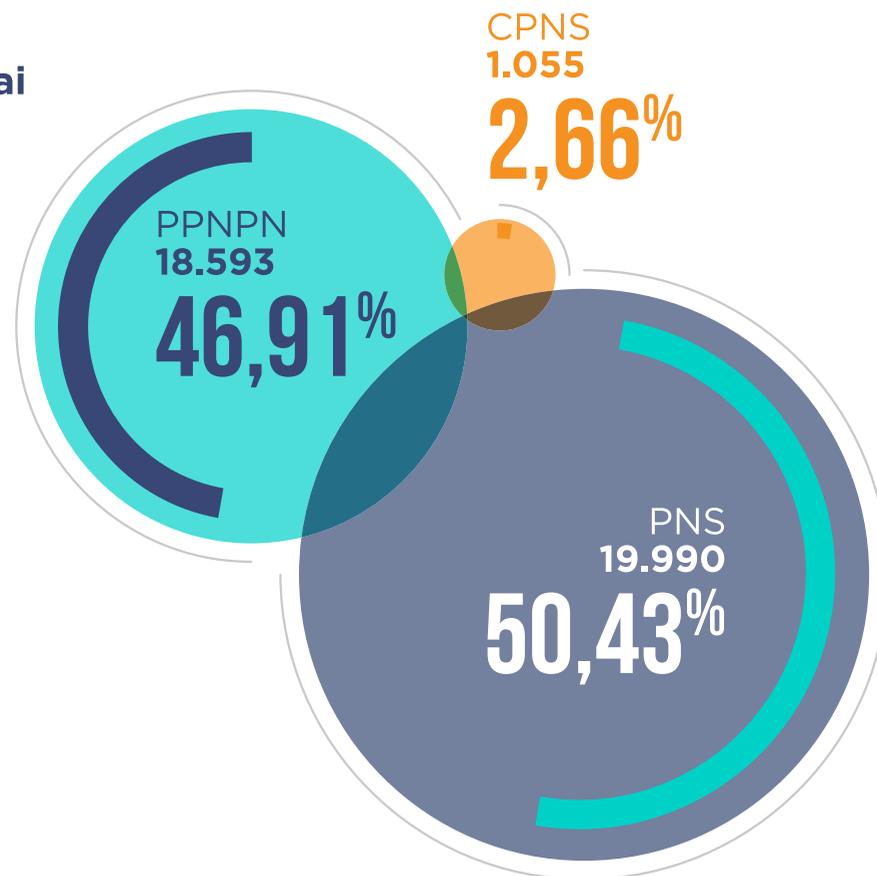
# SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur. Kualitas maupun kuantitas SDM infrastruktur berpengaruh langsung terhadap *project & policy delivery*; tidak terbatas pada pelaksanaan proyek di lapangan. Oleh karena itu peningkatan dari segi kapasitas dan kompetensi SDM Kementerian PUPR perlu dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur.

Saat ini pegawai Kementerian PUPR hingga bulan November tahun 2022 mencapai 39.638 pegawai yang terdiri dari 19.990 (50,43%) pegawai PNS, 1.055 (2,66%) pegawai CPNS dan 18.593 (46,91%) pegawai PPNPN.

## Persentase Pegawai

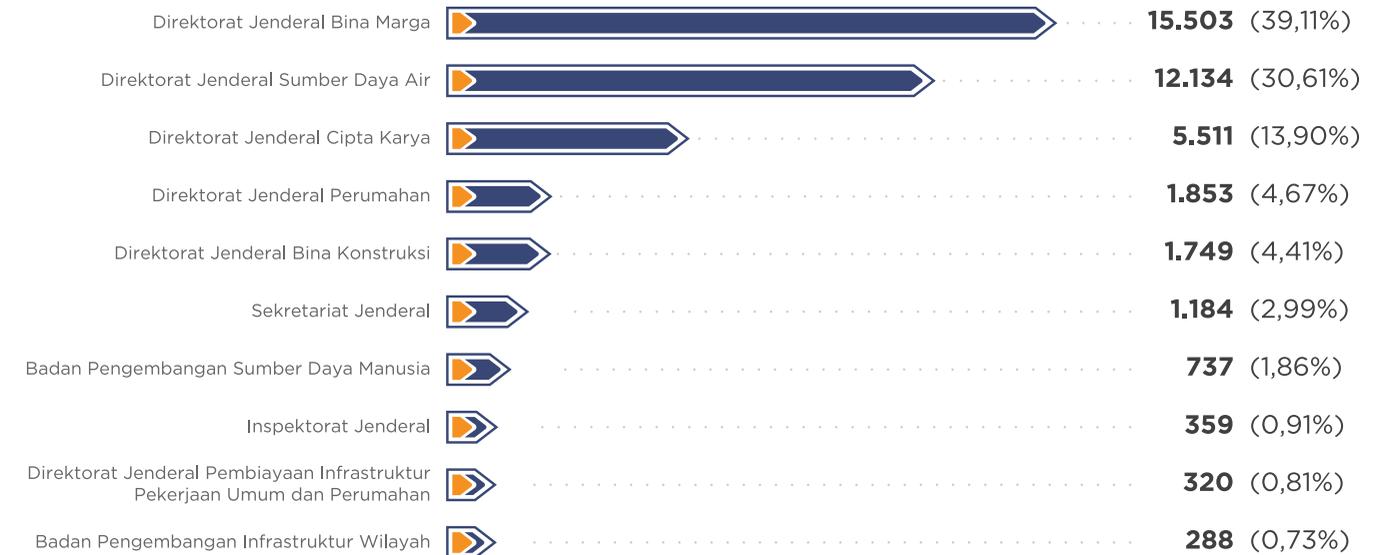
Kementerian PUPR



Berdasarkan unit organisasinya, persentase pegawai terbanyak berada di Ditjen Bina Marga (39,11%), Ditjen Sumber Daya Air (30,61%), dan Ditjen Cipta Karya (13,90%). Adapun unor dengan pegawai paling sedikit ialah BPIW dengan 288 orang (0,73%).

## Jumlah dan Persentase Pegawai

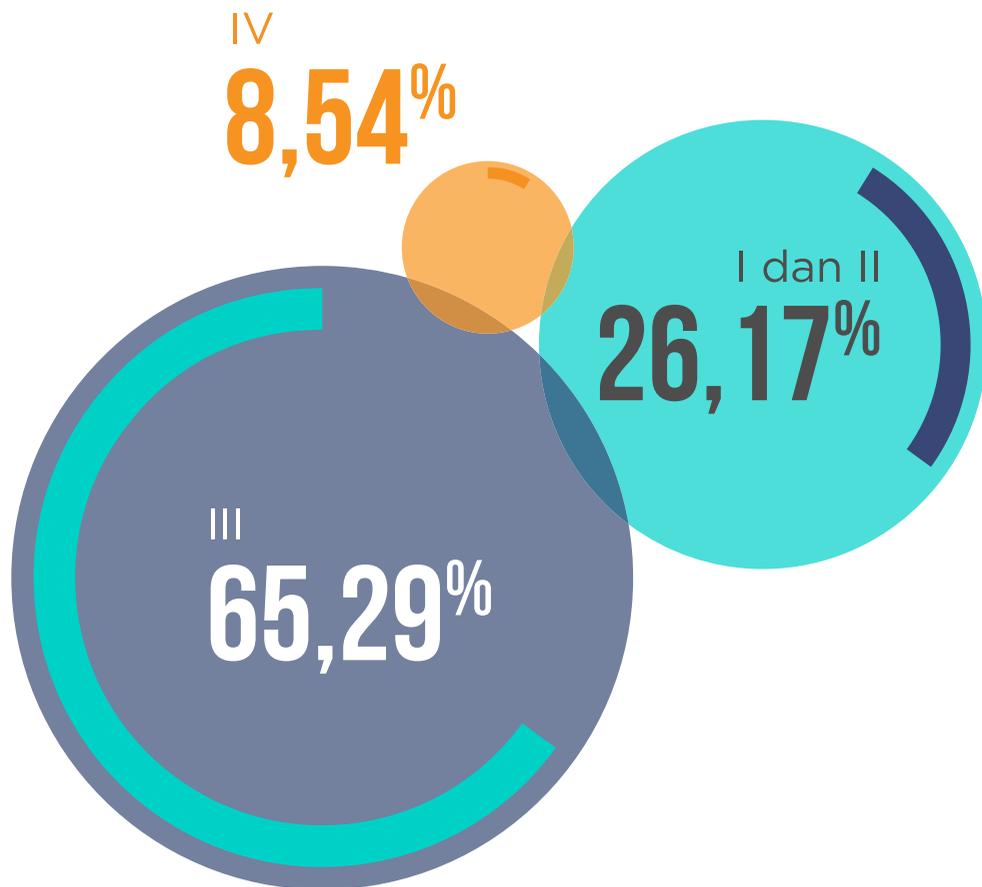
Berdasarkan Unit Organisasi



Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai ASN (PNS dan CPNS) Kementerian PUPR dengan golongan IV mencapai 1.797 pegawai atau sebesar 8,54%. Kemudian pegawai dengan golongan III sebanyak 13.740 pegawai atau sebesar 65,29% serta golongan II dan kurang terdapat 5.508 pegawai atau sebesar 26,17%.

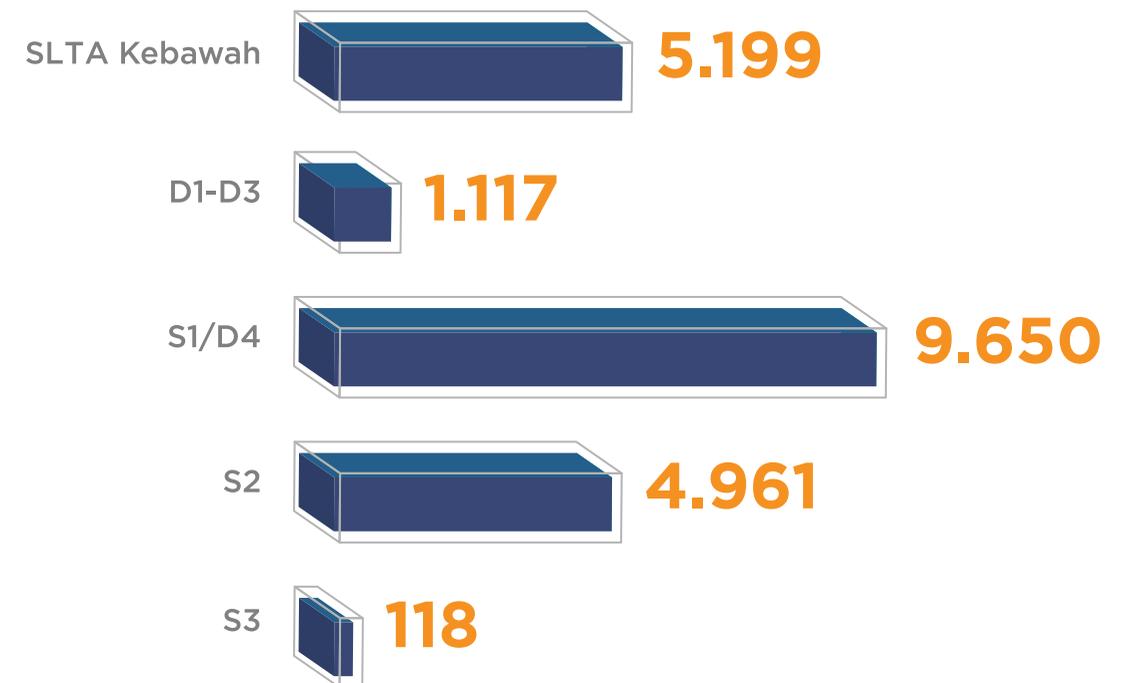
### Persentase Pegawai ASN

Berdasarkan Golongan Kepangkatan



### Jumlah ASN

Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai dengan jenjang pendidikan S1/D4 menempati posisi terbanyak yaitu 9.650 orang atau sebesar 45,85%. Terbanyak kedua diikuti oleh pegawai dengan pendidikan yang ditamatkan paling tinggi SLTA, lalu kemudian Pascasarjana atau S2 sebanyak 4.961 orang. Sementara itu jumlah paling sedikit adalah pegawai dengan jenjang pendidikan S3 yang mencapai 118 orang.

**Sumber**  
e-HRM Kementerian PUPR  
**Status Data**  
November 2022



# A. PENGARUSUTAMAAN GENDER

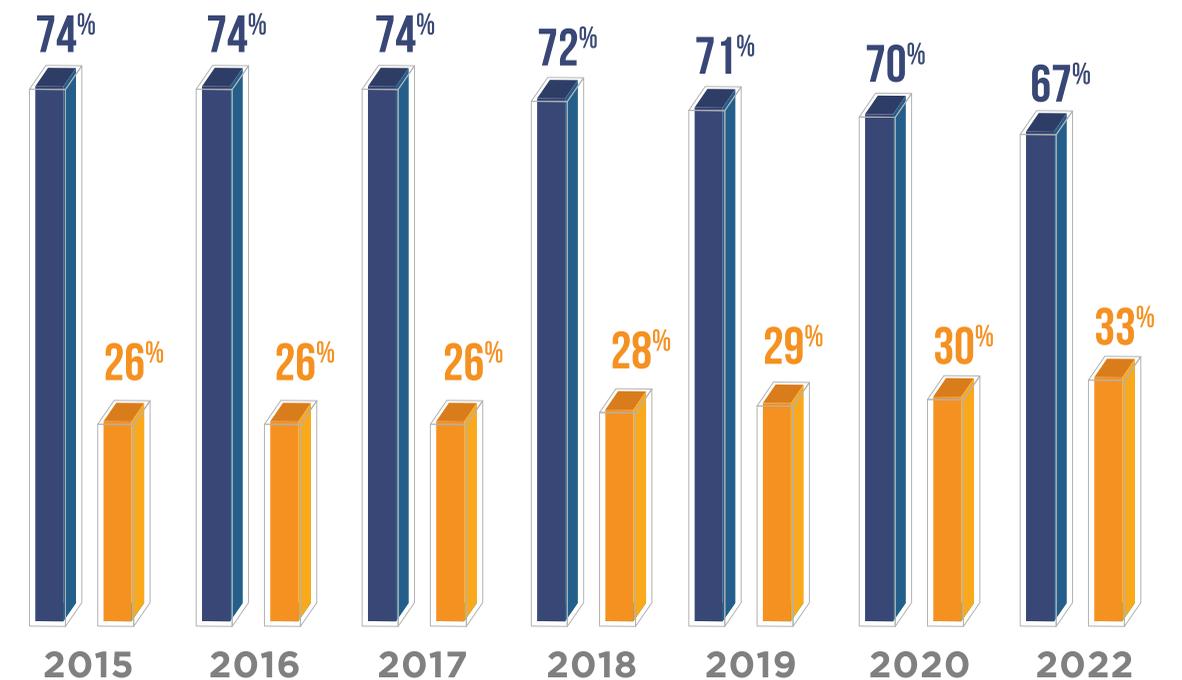
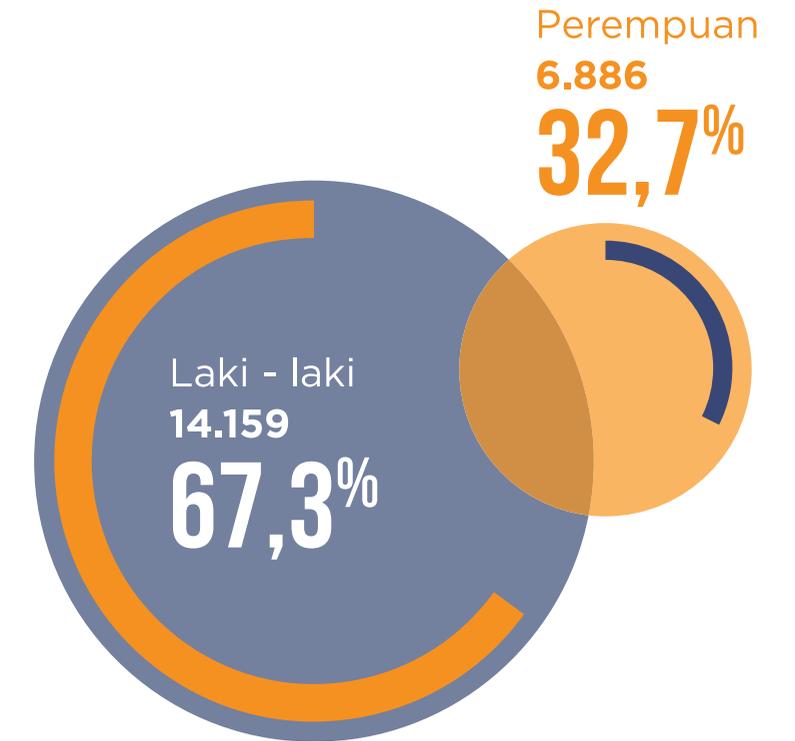
Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan tersebut tercipta apabila masyarakat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama.

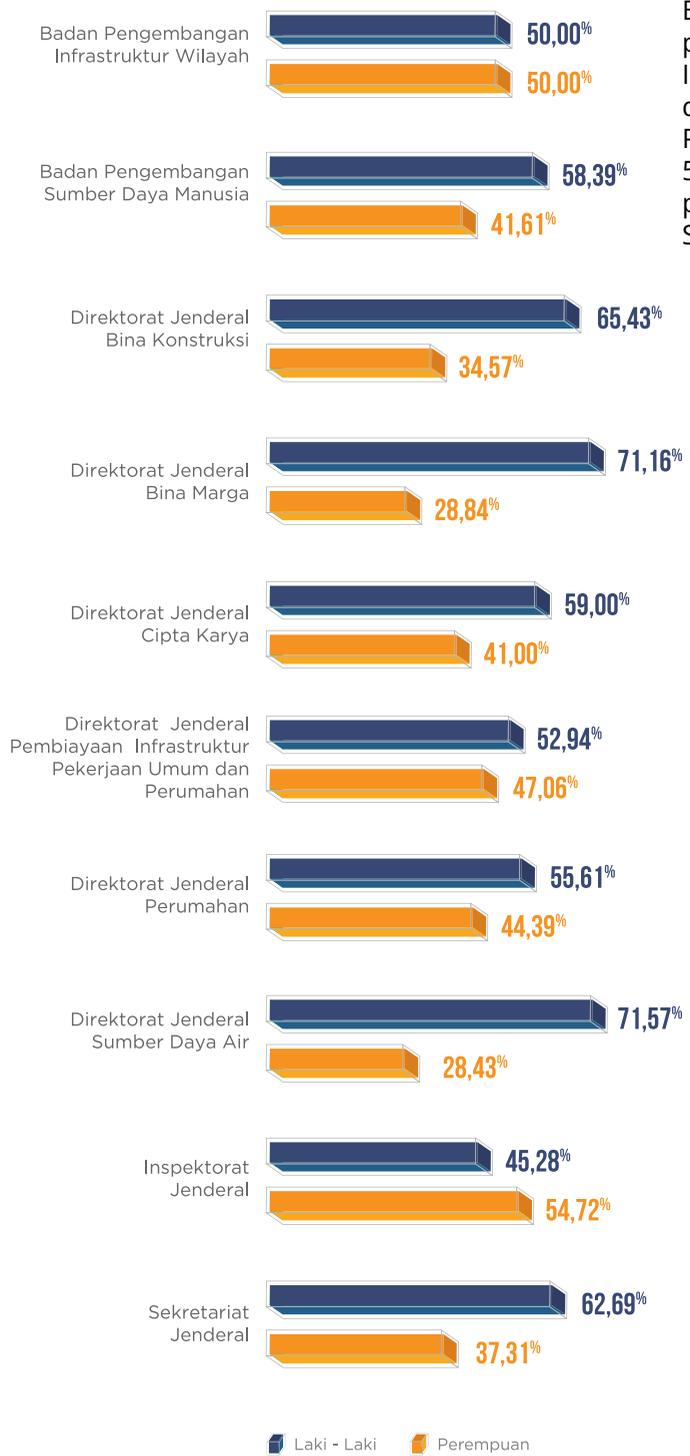
Secara umum PUG bukan merupakan konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi seluruh kebutuhan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak dan difabel. Formulasi mekanisme kebijakan yang tepat perlu dirancang, agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan berbagai upaya pengarusutamaan gender. Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas telah mengamanatkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi hal yang harus diperhatikan karena sebagai strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Adapun saat ini Kementerian PUPR juga telah memiliki *Roadmap* PUG Tahun 2020-2024 sebagai bukti pelaksanaan komitmen tersebut.

Salah satu keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR yang terus meningkat tiap tahunnya. Secara umum di tahun 2022 pegawai Kementerian PUPR masih didominasi pegawai laki-laki, yaitu sebesar 67,28%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 32,72%. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki, namun kenaikannya yang terjadi tiap tahun menandakan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



■ Laki - Laki ■ Perempuan



Berdasarkan unit organisasinya, persentase pegawai perempuan terbesar berada di Inspektorat Jenderal yang mencapai 54,72% dari total jumlah pegawai; diikuti dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 50,00%. Adapun untor dengan persentase pegawai perempuan paling kecil ialah Sekretariat Jenderal dengan 37,31%.





Penutup



**PENUTUP**  
BUKU INFORMASI STATISTIK  
INFRASTRUKTUR PUPR



# PENUTUP



Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR ini merupakan perwujudan tugas Pusdatin dalam pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian, dan sebagai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data, penyajian data dan informasi statistik infrastruktur PUPR. Sumber data

dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2022 diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat menurut provinsi dan beserta analisis statistik singkatnya. Rintisan nama Buku Informasi Statistik per tahun seperti berikut:

- 2006:** Buku Induk Kestatistikan
- 2007:** Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2008:** Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2009:** Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2010:** Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2011:** Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- 2012:** Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
- 2013:** Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
- 2014:** Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum
- 2015:** Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2016:** Buku Induk Statistik
- 2017:** Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2018:** Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2019:** Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2020:** Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2021:** Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Dalam rangka penyebarluasan data dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan yang bermanfaat dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, serta diharapkan buku ini juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas dalam sajian yang lebih mudah dipahami dan sebagai referensi data dan informasi tentang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.



# INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2022



## Pengarah

Mohammad Zainal Fatah

## Koordinator

Nazib Faizal

Komang Sri Hartini

## Penulis

Setia Dewi Prihapsari

Nida Ashma Adilah

Ariyany Yaman

Mayta Utari

Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi

Lintang Ayu Pratiwi

Naufal Azaki

Rozi Abrori Fathurrochim

Nita Fikhriani Azhari

## Editor dan Tata Letak

Siti Nurdini

## Kontributor

Sekretariat Jenderal

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Jenderal Perumahan

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Badan Pusat Statistik

Arief Ardhian Nugroho

Irwan Ahmad Sugiharto

## Penerbit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

## Desember 2022

Informasi Statistik Infrastruktur PUPR

# INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR

PUPR 2022

ISBN 978-979-8230-34-9



9 789798 230349

